

**INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

**Sanksi pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
Pasal 44 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Tim Penulis



INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Tim Penulis

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2021
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting cover: Anggita Feisabella Rizanti
Setting & Lay Out Isi : Devi
Cetakan Pertama, Januari 2021
xiv + 252 halaman : 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,
baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau
dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-913-8

KATA SAMBUTAN

Syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, dan karunia-Nya penyusunan buku yang berjudul “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” dapat terselesaikan. Saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menyambut dengan baik dan penuh rasa syukur atas terbitnya buku ini. Adanya buku ini merupakan suatu kehormatan dan



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.,
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya

kebanggaan bagi saya karena melalui buku ini Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dapat diperkenalkan. Buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” merupakan hal penting, karena buku ini dapat menjadi sumber informasi mengenai pengukuran dalam menganalisis berbagai indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah dan dilengkapi dengan berbagai tinjauan Pustaka baik teoritis maupun empiris. Pada kesempatan ini, saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun materil.

Akhir kata, semoga buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Januari 2021

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.

KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhitungkan karena pembangunan ekonomi mengindikasikan keberhasilan suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi, yang mana kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dapat menggunakan otonomi daerah sebagai cara terbaik, karena kemandirian dalam melaksanakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama menyajikan berbagai pengukuran yang digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi dan kinerja keuangan daerah. Penyajiannya secara ringkas meliputi konsep dan definisi dasar, formulasi dan contoh perhitungan yang dilengkapi dengan contoh data dan interpretasinya. Pada bagian kedua, buku ini menyajikan berbagai tinjauan literatur baik secara teoritis maupun empiris yaitu lingkungan dan pembangunan, upah tenaga kerja, aglomerasi industri, efisiensi perbankan, perkembangan inklusi keuangan, struktur ekonomi serta keuangan desa.

Buku ini terdiri dari 8 bab, bab 1 membahas mengenai analisis ekonomi daerah yang menyajikan informasi tentang dasar-dasar ekonomi wilayah serta perhitungan PDRB juga produktivitas ekonomi. Pada bab 2 membahas mengenai analisis keuangan daerah yang meliputi konsep keuangan daerah, komposisi APBD serta

penilaian kinerja keuangan daerah. Bab 3 membahas mengenai lingkungan dan pembangunan, yang meliputi hubungan antara lingkungan dan pembangunan, pembangunan berkelanjutan serta kebijakan yang digunakan untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bab 4 membahas mengenai determinan dan struktur upah pekerja.

Pada bab 5 membahas mengenai potensi aglomerasi industri kecil di Sumatera Selatan baik ditinjau dari skala ekonomi, biaya bahan baku dan pemasaran serta upah pekerja. Bab 6 menyajikan informasi mengenai efisiensi perbankan. Bab 7 membahas mengenai perkembangan inklusi keuangan Sumatera Selatan. Bab 8 membahas mengenai dana desa serta kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan perkembangan wilayah.

Buku ini dikemas sedemikian rupa agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu proses penyusunan buku ini, yang telah bersedia menyumbangkan ide, pikiran, waktu dan tenaga sehingga pada akhirnya buku ini dapat selesai dan diterbitkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I Analisis Ekonomi Daerah	
Imelda, M. Deassy Apriani, Anggita Feisabella Rizanti, Mega Debiyanti.....	1
BAB II Analisis Keuangan Daerah	
Azwardi, Imelda, Kurnia Sari, Nadiya Angraini	43
BAB III Lingkungan dan Pembangunan	
Abdul Bashir, Mukhlis, Bambang Bemby Soebyakto, Ichsan Hamidi	79
BAB IV Upah Pekerja: Determinan dan Struktur	
Yunisvita	103
BAB V Aglomerasi Industri: Telaah Prospek Untuk Industri Kecil di Sumatera Selatan	
Mukhlis, Bernadette Robiani, Dirta Pratama Atiyatna, Hamira	151
BAB VI Efisiensi Perbankan	
Suhel	181
BAB VII Perkembangan Inklusi Keuangan Sumatera Selatan	
Sri Andaiyani dan Ariodillah Hidayat	217
BAB VIII Dana Desa: Perspektif Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Wilayah	
Sukanto, Azwardi, Wika Indriyani	227

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Contoh PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019....	7
Tabel 1.2 Contoh PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2007-2019	9
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan PDRB Kota Palembang	11
Tabel 1.4 PDRB Provinsi Lampung dan PDRB Kota Bandar Lampung	16
Tabel 1.5 Contoh Struktur PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha (%) tahun 2015-2019	18
Tabel 1.6 Tahapan pembangunan dan Kontribusi Sektoral terhadap PDB	19
Tabel 1.7 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	28
Tabel 1.8 Perhitungan Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	29
Tabel 1.9 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	30
Tabel 1.10 Kriteria Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Kinerja Sektor I di suatu Wilayah	31
Tabel 2.1 Komposisi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	50
Tabel 2.2 Perkembangan APBD dan Jumlah Penduduk Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2018-2019	55
Tabel 2.3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD untuk Provinsi Se-Sumbagsel	56

Tabel 2.4 Perbandingan Rata-rata Rasio Pertumbuhan APDB dan Rata-rata Rasio APBD Per Kapita di Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	58
Tabel 2.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	60
Tabel 2.6 Klasifikasi Indeks Kemandirian Wilayah	62
Tabel 2.7 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	63
Tabel 2.8 Penghitungan Elastitas PAD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019	65
Tabel 2.9 Penghitungan Share PAD Provinsi Lampung Tahun 2019	66
Tabel 2.10 Penghitungan Growth PAD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 (Rupiah)	66
Tabel 2.11 Perbandingan rata-rata <i>share</i> PAD dan <i>Growth</i> PAD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	67
Tabel 2.12 Klasifikasi Kinerja Pembiayaan Pembangunan Wilayah	70
Tabel 2.13 Perkembangan Belanja Pembangunan dan Total Belanja Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	70
Tabel 2.14 Klasifikasi Rasio Efektifitas	72
Tabel 2.15 Klasifikasi Rasio Efisiensi	73

Tabel 2.16 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019	73
Tabel 2.17 Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 (Rupiah)	74
Tabel 2.18 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah) ..	75
Tabel 5.1 Indikator Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	171
Tabel 7.1 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan di Sumatera Selatan	223
Tabel 8.1 Perkembangan Tipologi Desa di Indonesia Tahun 2015 dan 2020	243
Tabel 8.2 Perkembangan Tipologi Desa di Regional Sumatera 2018 dan 2020	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah	45
Gambar 2.2 Tipologi Kinerja APBD	57
Gambar 2.3 Tipologi Kinerja APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	58
Gambar 2.4 Kriteria Share and Growth	65
Gambar 2.5 Analisa Kriteria Share and Growth Provinsi Lampung Tahun 2018-2019	68
Gambar 3.1 Hubungan antara Degradasi Lingkungan dan Pembangunan	87
Gambar 3.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan	91
Gambar 4.1 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan tingkat Pendidikan Pekerja	141
Gambar 4.2 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan Gender Pekerja ..	142
Gambar 4.3 Rata-rata Upah Laki-laki Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama	143
Gambar 4.4 Rata-rata Upah Perempuan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama	143
Gambar 5.1 Pertumbuhan Industri Kecil di Indonesia	152
Gambar 5.2 Pangsa IK terhadap PDB Harga Berlaku Indonesia, 2019	152
Gambar 5.3 Pangsa IK terhadap PDB Harga Konstan Indonesia 2019	152
Gambar 5.4 Perkembangan Unit Usaha Industri Kecil di Sumatera Selatan, 2009-2019	153

Gambar 5.5 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil di Sumatera Selatan 2009-2019	154
Gambar 5.6 Dukungan Skala Ekonomi terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	163
Gambar 5.7 Sistem Pengupahan pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	165
Gambar 5.8 Dukungan Upah terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	165
Gambar 5.9 Dukungan Biaya Bahan Baku dan Pemasaran terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	167
Gambar 6.1 Efisiensi Teknik dan Efisiensi Alokatif	184
Gambar 6.2 Kerangka Konseptual Efisiensi Perbankan	187
Gambar 8.1 Tren Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020 (Persen)	230
Gambar 8.2 Rincian Dana Desa Tahun 2015-2020 (Triliun Rupiah)	231
Gambar 8.3 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten	240
Gambar 8.4 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di kabupaten Muara Enim	241

BAB I

ANALISIS EKONOMI DAERAH

Oleh:

Imelda, Deassy Apriani, Anggita Feisabella Rizanti, Mega Debiyanti

1.1 Konsep dan Definisi Ekonomi Wilayah

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan hubungan ekonomi dan regional serta mempercepat pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Dengan demikian, pembangunan ekonomi mengupayakan agar pendapatan masyarakat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang lebih baik pula.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat tersebut, maka statistik pendapatan nasional/regional dapat digunakan. Angka-angka pada pendapatan nasional/regional dapat dipakai sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pihak swasta dan juga dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Pembangunan pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia memerlukan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk perencanaan sekaligus evaluasi di bidang ekonomi sesuai dengan batas wilayah administrasi pemerintahan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam satu periode tertentu. PDRB yaitu nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat diartikan juga sebagai nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh elemen ekonomi.

Selain itu, perhitungan PDRB bermanfaat untuk berbagai kebutuhan penghitungan dalam perekonomian (Badan Pusat Statistik, 2008) antara lain:

1. Sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi
2. Mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah yang biasa diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan perkapita.
3. Mengetahui struktur perekonomian dan perubahannya, pendapatan regional biasanya ditunjukkan menurut sektor. Apabila pendapatan regional diakumulasikan dari waktu ke waktu maka akan terlihat perubahan kontribusi dari masing-masing sektor serta perubahan struktur ekonominya.
4. Mengetahui produktivitas per sektoral, apabila data tenaga kerja disajikan secara sektoral maka produktivitas per sektor dapat diketahui besarannya. Produktivitas tenaga kerja sektoral ini sangat berguna untuk mempertimbangkan penentuan alokasi tenaga kerja secara sektoral.
5. Mengukur elastisitas kesempatan kerja dengan bantuan employment data, apabila data pendapatan regional dan data

employment disajikan berdampingan secara runtut waktu, maka dapat dihitung angka elastisitas kesempatan kerja terhadap pendapatan regional. Angka elastisitas kesempatan kerja mencerminkan pengaruh kenaikan dan penurunan pendapatan regional terhadap kesempatan kerja.

Selain manfaat ada juga keterbatasan yang dihadapi dalam penghitungan PDRB sebagai indikator ekonomi makro. Menurut Badan Pusat Statistik (2008) ada beberapa keterbatasan dalam penghitungan PDRB, yaitu:

1. Jasa yang tidak dapat dinilai.

Jasa ini misalnya jasa seorang anak dalam membantu orang tuanya, jasa pelayanan seorang teman ke teman lainnya dan jasa lain yang dilakukan tanpa perhitungan materi.

2. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ilegal

Kegiatan ini misalnya penyelundupan, prostitusi dan kegiatan lainnya yang secara hukum negara maupun adat tidak boleh dilakukan.

3. Konsep pembelian oleh rumah tangga terhadap barang-barang yang sifatnya tahan lama.

Ada beberapa barang tahan lama yang dibeli oleh rumah tangga yang tidak habis dipakai dalam satu periode tertentu, contohnya mobil, dan perabot lainnya. Tetapi dalam konsep neraca ekonomi pembelian barang-barang semacam ini khusus oleh rumah tangga dan dianggap sebagai barang konsumsi bukan barang modal.

4. Konsep pengeluaran untuk pendidikan.

Jika konsep pengeluaran dikaitkan dengan konsep pembentukan modal maka konsep pengeluaran pendidikan akan dimasukkan ke dalam pembentukan modal. Hal ini dikarenakan pengeluaran untuk pendidikan umumnya akan dinikmati atau akan diperoleh pada masa yang akan datang. Dalam neraca ekonomi, pengeluaran untuk pendidikan dimasukkan ke dalam biaya atau *current cost*.

5. Anggaran tabungan sama dengan investasi.

Teori pendapatan dan regional memiliki anggapan bahwa pendapatan akan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah tabungan akan sama dengan investasi periode yang sama. Tapi pada kenyataannya dalam satu tahun, jumlah pendapatan tidak sama dengan konsumsi ditambah investasi. Hal ini dikarenakan konsumsi pada akhir tahun berasal dari pendapatan tahun sebelumnya, begitu pula sebaliknya.

PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga konstan dan maupun harga berlaku. PDRB Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasarnya. Sedangkan PDRB Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Penghitungan PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil (nyata) dari tahun ke tahun, pada penghitungan harga konstan faktor perubahan harga tidak ada. Sedangkan PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi. Secara lebih rinci dapat dijelaskan dengan formulasi sebagai berikut:

1. PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau seluruh sektor dari tahun ke tahun. faktor perubahan harga tidak ada.

$$\text{PDRB} = \sum_i^n \bar{P}_i Q_i$$

Dimana \bar{P}_i adalah harga yang dipakai untuk perhitungan tahun dasar.

2. PDRB harga berlaku menggambarkan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun itu. Jika nilai PDRB tinggi, maka hal ini mengindikasikan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar pula.

$$\text{PDRB} = \sum_i^n P_i Q_i$$

Dimana P_i adalah harga yang digunakan untuk perhitungan harga berlaku saat output diproduksi atau tahun berjalan. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang dinikmati oleh penduduk suatu daerah.

Terdapat tiga pendekatan untuk menghitung PDB/PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut memberikan hasil yang sama antara hasil jumlah pengeluaran dengan hasil jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama jumlah dengan pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Indonesia menggunakan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi/kabupaten/kota dalam periode tertentu. Unit produksi dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha, yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2 Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4 Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estate; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Rumus perhitungan pendekatan produksi, yaitu:

$$\text{Output } b,t = \text{Produksi } t \times \text{Harga } t$$

$$\text{NTBb},t = \text{Output } b,t - \text{Biaya Antara } b,t$$

Atau

$$\text{NTBb},t = \text{Output } b,t - \text{Rasio BTBo}$$

Keterangan :

Output b,t : Output/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t

NTBb, t : Nilai tambah bruto atas dasar harga belaku tahun ke y

Produksi t : Kuantum produksi tahun ke t

Harga t : Harga produksi tahun ke t

Rasio NTB : Perbandingan NTB terhadap Output (NTB/Output)

Rasio NTBo : Rasio NTB pada tahun dasar (o)

Tabel 1.1 Contoh PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)					
	Harga Konstan 2010			Harga Berlaku		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,258,376	1,307,374	1,354,957	1,787,963	1,900,804	2,013,627
B. Pertambangan dan Penggalian	779,678	796,505	806,206	1,029,555	1,198,987	1,149,914
C. Industri Pengolahan	2,103,466	2,193,368	2,276,683	2,739,712	2,947,451	3,119,617
D. Pengadaan Listrik dan Gas	101,551	107,109	111,437	162,340	176,640	185,115
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,985	8,430	9,006	9,439	10,024	10,736
F. Konstruksi	987,925	1,048,083	1,108,425	1,410,514	1,562,297	1,701,741
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,311,747	1,376,883	1,440,523	1,768,865	1,931,819	2,060,773
H. Transportasi dan Pergudangan	406,679	435,382	463,255	735,230	797,847	881,663
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	298,130	315,069	333,358	387,013	412,710	440,268
J. Informasi dan Komunikasi	503,421	538,763	589,435	513,716	558,938	626,425
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	398,971	415,621	443,042	571,204	616,315	671,356
L. Real Estate	289,569	299,648	316,837	382,259	406,014	439,367
M,N. Jasa Perusahaan	172,764	187,691	206,936	238,217	267,094	304,286
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	326,514	349,375	365,678	499,344	542,029	572,457
P. Jasa Pendidikan	304,811	321,132	341,329	447,138	481,724	522,746
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,498	117,326	127,507	144,831	158,064	174,802
R,S,T,U. Jasa lainnya	170,175	185,432	204,999	239,259	268,626	308,840
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	9,531,259	10,003,188	10,499,612	13,066,596	14,237,382	15,183,730
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	381,669	422,209	449,632	523,230	600,930	523,230
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9,912,928	10,425,397	10,949,244	13,589,826	14,838,312	13,589,826

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang juga ikut dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yaitu sewa tanah, gaji dan upah, bunga modal dan keuntungan yang sebelum dipotong pajak

penghasilan dan pajak langsung lainnya. Rumus perhitungan pendekatan pendapatan yaitu:

$$\text{PDRB} = \text{Sewa} + \text{Upah} + \text{Bunga} + \text{Laba}.$$

Misalnya, pada PDB Indonesia atas harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 13,589,826 milyar rupiah, artinya nya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 13,589,826 milyar rupiah.

PDRB yaitu semua komponen pengeluaran akhir antara lain: 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Lembaga swasta nirlaba; 2. Pengeluaran Konsumsi LNPR; 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; 4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto; 5. Perubahan Inventor; 6. Ekspor Barang dan Jasa; dan 7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa. PDRB didapat dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Rumus perhitungan pendekatan pengeluaran, yaitu :

$$\text{PDRB} = C + \text{Investasi} + \text{Pengeluaran Pemerintah} + (\text{Ekspor} - \text{Impor}).$$

Tabel 1.2 Contoh PDB Indonesia Atas Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2007-2019

PDB Penggunaan (Seri 2010)	[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)			[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)		
	2,017	2,018	2,019	2,017	2,018	2,019
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5,126,308	5,651,454	5,936,400	7,623,056	8,274,212	8,965,837
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	105,362	122,917	135,974	160,594	180,815	206,013
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	774,305	828,683	855,597	1,239,470	1,336,613	1,385,882
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,041,585	3,443,242	3,596,364	4,370,575	4,789,385	5,119,491
5. Perubahan Inventori	133,400	197,370	129,954	210,636	338,634	226,923
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,971,183	2,287,090	2,267,120	2,742,061	3,111,923	2,914,636
a. Barang	1,752,865	2,038,154	2,018,128	2,386,700	2,708,683	2,500,984
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,818,133	2,198,263	2,029,280	2,606,283	3,268,839	2,991,963
Diskrepansi Statistik	100,604	92,905	57,116	-150,283	75,569	7,126
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9,434,613	10,425,397	10,949,244	13,589,826	14,838,312	15,833,943

Sumber: Badan Pusat Statistik

1.2 Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pengukuran tingkat kemakmuran ekonomi daerah yang sering juga disebut dengan tingkat kemakmuran kasar karena hanya memuat aspek ekonomi saja. Aspek kemakmuran lainnya menyangkut bidang sosial belum termasuk di dalamnya. Namun penggunaan pendapatan perkapita sebagai gambaran tingkat kemakmuran ekonomi lazim dipakai sebagai ukuran kemakmuran masyarakat baik di daerah maupun nasional (Sjafrizal, 2014). Dengan demikian, pendapatan perkapita merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Pendapatan per kapita tersebut didapatkan dengan cara membagi pendapatan regional/produk regional neto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Rumus menghitung PDRB per kapita (Rp/Kapita), yaitu:

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk}}$$

Semakin tinggi PDRB/kapita semakin tinggi tingkat dan maju tingkat perekonomian suatu wilayah. Kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan dari hasil PDRB saja, namun juga tergantung banyaknya jumlah penduduk, penduduk yang banyak dapat memperkecil pendapatan per kapita. PDRB/Kapita diukur dengan Rp/Kapita, namun juga dapat dinyatakan dengan dolar AS untuk membandingkan posisi regional terhadap pendapatan negara lain dalam skala global. Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapita dalam 4 kategori, yaitu (Kuncoro, 2004):

1. *Low Income* (negara berpenghasilan rendah) adalah kelompok negara dengan pendapatan per kapita kurang atau sama dengan US\$ 1.035;
2. *Lower Middle Income* (negara berpenghasilan menengah) yaitu kelompok negara dengan pendapatan per kapita antara US\$1.036 – US\$ 4.045;
3. *Upper Middle Income* (negara berpenghasilan menengah atas) dengan pendapatan per kapita antara US\$ 4.046 – US\$ 12.535; dan

4. *High Income* (negara berpenghasilan tinggi) yaitu kelompok negara dengan pendapatan per kapita lebih dari US\$ 12.535.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan PDRB Kota Palembang

Kota Palembang	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1,602,071	1,623,099	1,651,857
PDRB Kota Palembang (Juta Rp)	87,073,353.9	92,476,406.6	98,661,068.9

Sumber : Badan Pusat Statistik

Contoh Menghitung Pendapatan Perkapita:

$$PDRB \text{ perkapita tahun } 2016 = \frac{87,073,353.9}{1,602,071}$$

$$= 54,350,496.26$$

$$PDRB \text{ perkapita tahun } 2017 = \frac{92,476,406.6}{1,623,099}$$

$$= 56,975,210.14$$

$$PDRB \text{ perkapita tahun } 2018 = \frac{98,661,068.9}{1,651,857}$$

$$= 59,727,366.78$$

Berdasarkan hasil hitung di atas dapat dikatakan bahwa Kota Palembang masuk dalam *Upper Middle Income* dengan pendapatan per kapita rata-rata US\$ 4.046 – US\$ 12,535.

1.3 Produktivitas Sektoral

Produktivitas sektoral adalah pembagian antar PDRB sektor tertentu dengan penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Produktivitas wilayah menurut sektor menjadi ukuran yang penting dalam

membandingkan kemampuan masing-masing sektor dalam memberikan kesejahteraan perekonomian untuk pekerja sektor tersebut.

Rumus dalam menghitung produktivitas sektoral, yaitu:

$$\text{Produktivitas Sektor (i)} = \text{PDRB}_{si} / \text{JP}_{si}$$

Keterangan:

PDRB_{si} = Produk Domestik Regional Bruto Sektor (i)

JP_{si} = Jumlah tenaga kerja sektor (i), 9 sektor produksi

Contoh Menghitung Produktivitas Sektoral:

Jumlah tenaga kerja Kepulauan Riau tahun 2017 sebesar 78,782 dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian sebesar 5,945,614.56

$$\text{Produktivitas Sektor (i)} = \text{PDRB}_{si} / \text{JP}_{si}$$

$$\text{Produktivitas Sektor (i)} = 5,945,614.56 / 78,782$$

$$\text{Produktivitas Sektor (i)} = 75.46$$

Produktivitas sektoral memperlihatkan nilai Rp yang diterima penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan nilai produktivitas sektoral dengan pendapatan per kapita dan perbandingan antar sektor. Semakin tinggi produktivitas suatu sektor, maka semakin besar perannya bagi pembangunan.

1.4 Struktur dan Transformasi Ekonomi Wilayah

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan maka diperlukan analisa tentang struktur ekonomi daerah. Hal ini menjadi penting

untuk menentukan arah pembangunan daerah. jika struktur perekonomian suatu daerah didominasi oleh kegiatan pertanian atau agraris, maka arah pembangunan akan disesuaikan dengan struktur perekonomian tersebut. Sebaliknya, jika struktur perekonomian suatu daerah sudah mulai didominasi oleh sektor industri dan jasa maka kebijakan pembangunan daerah juga harus difokuskan pada sektor tersebut.

Analisa struktur ekonomi daerah dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan dengan melihat pada perubahan struktur ekonomi daerah kajian. Perekonomian dapat dikatakan maju apabila kontribusi sektor industri sudah lebih tinggi dari sektor pertanian dan jasa. Hal ini dikarenakan sektor industri mencerminkan kegiatan ekonomi yang sudah maju dan menggunakan teknologi modern sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Struktur ekonomi dapat diukur secara sederhana yaitu dengan menghitung kontribusi dari masing-masing sektor dalam nilai PDRB daerah yang bersangkutan berdasarkan harga berlaku. Kontribusi sektoral PDRB dapat dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Kontribusi sektor } i = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor } i}{\text{Jumlah Nilai PDRB}} \times 100\%$$

Angka kontribusi sektoral ini umumnya telah disediakan dalam publikasi Badan Pusat Statistik, sehingga dapat langsung digunakan. Apabila berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi sektor pertanian adalah yang paling tinggi atau dominan, ini berarti struktur ekonomi daerah tersebut bersifat agraris atau tradisional. Tetapi jika hasil perhitungan menunjukkan kontribusi sektor industri yang lebih

dominan maka daerah atau wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai daerah industri atau *modern*. Sektor industri yang dimaksud tidak hanya berasal dari industri pengolahan saja, tapi juga sektor pertambangan, listrik serta air minum.

Sukirno (2006) menjelaskan bahwa, berdasarkan lapangan usaha maka sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Sektor primer, terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian;
2. Sektor sekunder, terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan; dan
3. Sektor tersier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan sewa dan jasa perusahaan, jasa-jasa lain (termasuk pemerintahan).

Transformasi struktur ekonomi bisa terjadi dikarenakan oleh sifat manusia dalam kegiatan ekonomi. Menurut hukum *Engels*, semakin tinggi pendapatan, maka semakin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan dalam membeli barang produksi industri menjadi semakin bertambah besar (Muta'Ali, 2015). Sebagai akibatnya, peranan sektor pertanian semakin kecil dibandingkan dengan sektor industri.

Manfaat dari analisis struktur dan transformasi ekonomi wilayah, yaitu:

1. Mengetahui peran perekonomian sub wilayah terhadap wilayah yang lebih besar;
2. Peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah;
3. Identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi;
4. Analisis proses dan tahap transformasi struktural; serta
5. Mampu menunjukkan tingkat industrialisasi suatu wilayah

a. Struktur perekonomian Regional (*Share Regional*)

Jika dalam wilayah Provinsi (i) dilakukan analisis mengenai peran masing-masing kabupaten baik secara keseluruhan maupun sektoral. Data struktur perekonomian menunjukkan peran suatu sub wilayah terhadap wilayah yang lebih besar termasuk peran masing-masing sektor dalam perekonomian wilayah. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten juga memperlihatkan tingkat pemerataan perekonomian wilayah. Struktur juga dapat menunjukkan distribusi suatu perekonomian wilayah terhadap wilayah lain atau terhadap wilayah yang lebih besar, sehingga pemerataan atau ketimpangan wilayah dapat diidentifikasi. Semakin besar presentasi PDRB pada suatu sektor atau wilayah, maka semakin besar perannya untuk pembangunan perekonomian.

$$\text{share PDB kabupaten } i_t = \frac{PDB_{it}}{\sum_{i=1}^N PDB_{it}} \times 100$$

Keterangan:

PDB_i = PDB Kabupaten i

$\sum PDB_i$ = PDB Provinsi i

t = Tahun t

i = Kabupaten

(menggunakan PDRB Harga Berlaku)

**Tabel 1.4 PDRB Provinsi Lampung dan PDRB
Kota Bandar Lampung**

PDRB	2016	2017	2018
PDRB Prov. Lampung	209,793,728.29	220,626,096.76	232,207,677.93
PDRB Kota Bandar Lampung	32,859,032.5	34,921,075.6	37,089,488.8

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah

$$\begin{aligned} \text{share PDB kabupaten } i_t &= \frac{32,859,032.5}{209,793,728.29} \times 100 \\ &= 15,662,542.81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{share PDB kabupaten } i_t &= \frac{34,921,075.6}{220,626,096.76} \times 100 \\ &= 15,828,170.88 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{share PDB kabupaten } i_t &= \frac{37,089,488.8}{232,207,677.93} \times 100 \\ &= 15,972,550.58 \end{aligned}$$

b. Struktur Perekonomian Sektoral (*Share Sectoral*)

Jika pada suatu daerah (i) dilakukan analisis tentang peran sektor dalam pembangunan wilayah. Analisis dominasi peran suatu sektor dalam perekonomian dapat menunjukkan basis perekonomian wilayah.

$$\text{share PDB sektor } i_t = \frac{PDB_{it}}{\sum_{i=1}^N PDB_{it}} \times 100$$

Keterangan:

PDB_i = PDB sektor i

$\sum PDB_i$ = Total PDB i

t = Tahun t

i = Sektor

(menggunakan PDRB Harga Berlaku, pada 17 sektor ekonomi)

Pengamatan pada struktur ekonomi dalam dua waktu yang berbeda dapat mengukur pergeseran peran sektor yang menunjukkan adanya proses transformasi struktural dari pertanian menuju sektor industri dan atau sektor jasa (Muta'Ali, 2015). Melalui kriteria Simon Kuznet dapat diketahui tahapan pembangunan.

Tabel 1.5 Contoh Struktur PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Harga Berlaku			TOTAL
	2019	2018	2017	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,72	12,81	13,16	38,69
B. Pertambangan dan Penggalian	7,26	8,08	7,58	22,92
C. Industri Pengolahan	19,7	19,86	20,16	59,72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	1,19	1,19	3,55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,21
F. Konstruksi	10,75	10,53	10,38	31,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,01	13,02	13,02	39,05
H. Transportasi dan Pergudangan	5,57	5,38	5,41	16,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,78	2,78	2,85	8,41
J. Informasi dan Komunikasi	3,96	3,77	3,78	7,55
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,24	4,15	4,2	12,59
L. Real Estate	2,77	2,74	2,81	8,32
M,N. Jasa Perusahaan	1,92	1,8	1,75	3,72
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,62	3,65	3,67	3,67
P. Jasa Pendidikan	3,3	3,25	3,29	9,84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1	1,07	1,07	3,24
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,95	1,81	1,76	5,52
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100	100	100	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah

**Tabel 1.6 Tahapan pembangunan dan Kontribusi Sektoral
Terhadap PDB**

Tahap Pembangunan	Peran Sektor terhadap PDB (%)		
	Pertanian	Indutri	Jasa
Awal	50-60	20-30	20
Akhir	10-20	40-50	40

Sumber: Simon Kuznet *Modern Economic Growth* Yale University Press, 1996

Dengan menggunakan kriteria UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*) dapat diketahui peran sektor industri dapat digunakan untuk menilai tingkar industrialisasi, sebagai berikut:

1. PDB atau PDRB sektor industri < 10% merupakan kelompok negara atau wilayah non industri (*non industrial country*)
2. PDB atau PDRB sektor Industri 10-20% merupakan kelompok negara atau wilayah memasuki proses industrialisasi (*Industrializing country*)
3. PDB atau PDRB sektor industri 20-30%, yaitu negara atau wilayah tergolong semi industri (*Semi Industrializing country*)
4. PDB atau PDRB sektor industri >30% menunjukkan wilayah atau negara industri (*Industrial country*).

1.5 Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan aspek penting dalam proses

pembangunan daerah di samping aspek pemerataan dan stabilitas. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kegiatan pembangunan suatu daerah akan sukar diwujudkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro dan Smith 2004). Boediono (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu berbagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDB atau PDRB.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil atau tidak dihitung dengan kenaikan harga, baik dalam bentuk barang atau jasa dalam periode tertentu pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk menghindari kenaikan harga dalam perhitungan maka data yang digunakan adalah PDRB harga konstan.

Manfaat dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi yaitu (Muta'Ali, 2015):

1. Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;
2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral dan regional;
3. Menyusun tipologi perkembangan perekonomian wilayah yaitu Tipologi Klassen;

4. Sebagai dasar bagi perumusan kebutuhan investasi sebagai dasar pembuatan
5. Sebagai perkiraan bisnis antar ke perekonomian wilayah
6. Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi

Terdapat tiga teknik perhitungan pertumbuhan ekonomi yaitu secara tahunan, rata-rata tiap tahun, dan *compounding factor*.

1. Cara Tahunan

Cara menentukan laju pertumbuhan ekonomi pada tahunan tertentu (misalnya tahun 2019 dan 2018), menggunakan rumus:

$$LPE_t = [(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}] \times 100\%$$

Keterangan:

LPE_t = Laju pertumbuhan ekonomi (%) tahun t

$PDRB_t$ = PDRB riil pada tahun t (Harga Konstan)

$PDRB_{t-1}$ = PDRB riil pada tahun t-1 (Harga Konstan)

Contoh:

PDRB Kota Palembang memiliki PDRB tahun 2018 sebesar Rp 98,661,068.9 milyar dan tahun 2017 Rp 92,476,406.6 milyar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dapat dihitung:

$$\begin{aligned} LPE_t &= [(98,661,068.9 - 92,476,406.6) / 92,476,406.6] \times 100\% \\ &= 6.68\% \end{aligned}$$

2. Cara Rata-rata tiap Tahun

Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata (misalnya antara tahun 2015 sampai dengan 2019) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \left[\left(\sqrt[n-1]{\frac{PDRB_{tn}}{PDRB_{to}}} - 1 \right) \right] \times 100\%$$

Keterangan:

r = Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun

n = Jumlah tahun (dihitung mulai awal dengan sampai dengan tahun akhir pengamatan)

$PDRB_{tn}$ = PDRB tahun terakhir periode

$PDRB_{to}$ = PDRB tahun awal periode

Contoh:

PDRB Aceh pada awal perencanaan (2010) memiliki PDRB Rp 101,545,236.83 milyar dan pada akhir perencanaan (2018) PDRB diprediksi meningkat menjadi Rp 126,824,491.42 milyar. Dengan waktu (n=9) dapat dihitung nilai pertumbuhan ekonomi (r):

$$r = \left(\sqrt[9]{\frac{126,824,491.42}{101,545,236.83}} \right) - 1$$

$$r = (\sqrt[9]{1,2489}) - 1$$

$$\text{Log } r = (1/9 \log 1.2489 - 1)$$

$$= (1/9 \times 0,0965) - 1$$

$$= 0.0107 - 1$$

$$\begin{aligned}
r &= (\text{anti log } 0,0107) - 1 \\
&= (1.9671513573e-20 - 1) \times 100\% \\
&= 0.9675 \times 100\% \\
r &= 96.75 \%
\end{aligned}$$

3. *Compounding Factor*

$$PDRB_{t_n} = PDRB_{t_0} (1 + r)^{n-1}$$

Keterangan:

- r = Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun
- n = Jumlah tahun (dihitung mulai awal dengan sampai dengan tahun akhir pengamatan)
- $PDRB_{t_n}$ = PDRB tahun terakhir periode
- $PDRB_{t_0}$ = PDRB tahun awal periode

Sebagai contoh dengan menggunakan data tersebut maka nilai perhitungan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan *Compounding Factor* dapat dihitung:

Contoh:

PDRB Aceh pada awal perencanaan (2010) memiliki PDRB Rp 101,545,236.83 milyar dan pada akhir perencanaan (2018) PDRB diprediksi meningkat menjadi Rp. 126,824,491.42 milyar. Dengan waktu (n=9) dapat dihitung nilai pertumbuhan ekonomi (r):

$$(1 + r)^{n-1} = PDRB_{t_n} / PDRB_{t_0}$$

$$(1 + r)^{9-1} = 101,545,236.83 / 126,824,491.42$$

$(1 + r)^8 = 0.80067$ berdasarkan tabel *compounding* didapat angka yang mendekati, pada tingkat pertumbuhan ekonomi 7.2%

1.6 Formulasi Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Sumber-sumber pertumbuhan didapat dari kemampuan suatu wilayah untuk mengembangkan potensi sumber dayanya. Semakin besar kuantitas dan semakin tinggi kualitas sumber daya tersebut, maka makin besar juga potensi wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mengetahui sumber-sumber pertumbuhan wilayah menurut sektor ekonomi digunakannya analisis sumber pertumbuhan (*source of growth*). Formulasi yang digunakan dalam analisis *source of growth* yaitu:

$$\text{Sogi} = \text{Dpi} \times \text{LPEi}$$

Keteranga:

$$\text{Dpi} = Wi_{t-1} / \sum Wi_{(t-i)}$$

$$\text{LPEt} = [(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}) / \text{PDRB}_{t-1}] \times 100\%$$

Keterangan:

SoGi = Sumber Pertumbuhan sektor ke-i

DPI = Distribusi persentase PDRB sektor ke-i

Pei = Pertumbuhan ekonomi sektor ke-i

Wi_{t-1} = Penimbangan sektor ke-I pada tahun ke (t-1) dan

$$Wi_{(t-1)} = 100$$

PDRB_{tn} = PDRB tahun terakhir periode

PDRB_{t0} = PDRB tahun awal periode

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan pertumbuhan bahan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin

cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Todaro dan Smith 2004).

Contoh:

PDRB Kota Palembang memiliki PDRB tahun 2018 sebesar Rp 98,66,068.9 milyar dan tahun 2017 Rp 92,476,406.6 milyar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dapat dihitung:

$$LPE_t = [(98,661,068.9 - 92,476,406.6) / 92,476,406.6] \times 100\% = 6.68\%$$

PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Palembang memiliki PDRB tahun 2018 sebesar Rp 14,122,512.70 milyar dan tahun 2017 Rp 12,691,860.60 milyar sehingga laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dapat dihitung:

$$Dpi = Wi_{t-1} / \sum Wi_{(t-i)}$$

$$Dpi = 14,122,512.70 / 12,691,860.60$$

$$Dpi = 1.1127$$

$$Sogi = 1.1127 \times 6.68$$

$$Sogi = 7.52836$$

1.7 Laju Pertumbuhan Produktivitas Ekonomi

Laju pertumbuhan produktivitas ekonomi merupakan konsep yang membandingkan antara pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk idealnya pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk sehingga masih terdapat surplus yang didapatkan untuk melakukan investasi dan pembangunan.

Tingkat kemajuan suatu wilayah secara real dapat ditunjukkan dengan indikator laju pertumbuhan produktivitas ekonomi wilayah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LPPK} = \text{LPE} - \text{LPP}$$

Keterangan

LPPK = Laju pertumbuhan produktivitas ekonomi (%)

LPE = Laju pertumbuhan ekonomi (%)

LPP = Laju pertumbuhan penduduk (%)

Contoh:

Laju pertumbuhan PDRB Kota Palembang pada tahun 2018 sebesar 6.69% dan laju pertumbuhan penduduk tahun dengan periode 2018 1.42% maka laju produktivitas atau pendapatan per kapita tumbuh sebesar $6.69\% - 1.42\% = 5.27\%$.

Semakin besar nilai LPPK, maka semakin tinggi laju pertumbuhan produktivitas ekonomi wilayah. jika LPPK positif ($\text{LPE} > \text{LPP}$) maka perekonomian berkembang, sedangkan jika LPPK negatif ($\text{LPP} > \text{LPE}$) maka terjadi kemerosotan ekonomi wilayah. Berdasarkan hasil hitung di atas didapat kesimpulan bahwa laju Pertumbuhan Produktivitas ekonomi mengalami perkembangan sebesar 5.27%.

1.8 Analisis Tipologi Klassen

Prinsip analisis tipologi kelas digunakan untuk klasifikasi potensi perkembangan perekonomian wilayah dan klasifikasi sektor ekonomi.

1. Analisis Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Potensi Perkembangan Perekonomian Wilayah

Tipologi kelas digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah dengan menggunakan basis data besaran pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi dengan pembagian berdasarkan rata-rata. Hasilnya berupa klasifikasi wilayah.

Manfaat dari analisis tipologi kelas yaitu:

1. Menentukan potensi perkembangan perekonomian wilayah
2. Menganalisis kinerja perekonomian wilayah
3. Menyusun klasifikasi tingkat perekonomian wilayah
4. Dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan wilayah
5. Menentukan prioritas wilayah pengembangan wilayah

Berdasarkan Tipologi Klassen, wilayah dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu:

1. *High growth and high income* (wilayah maju dan cepat tumbuh) adalah wilayah yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten atau kota di provinsi;
2. *High growth but high income* (wilayah maju tapi tertekan) adalah wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita lebih

- tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten atau kota di provinsi;
3. *High growth but low income* (wilayah berkembang cepat) adalah wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten atau kota di provinsi; dan
 4. *Low growth and low income* (Wilayah relatif tertinggal) adalah wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten atau kota di provinsi.

Formulasi tipologi klassen potensi perkembangan wilayah (misalnya dapat di kabupaten kabupaten dalam provinsi) sebagai berikut:

**Tabel 1.7 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan
Ekonomi Wilayah**

Laju Petumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh (<i>high growth and high income</i>)	Wilayah berkembang cepat (<i>high growth but low income</i>)
$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan (<i>high growth but high income</i>)	Wilayah relatif tertinggal (<i>high growth and low income</i>)

Keterangan:

r_i = Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota i

r = Laju pertumbuhan PDRB Provinsi

Y_i = PDRB per kapita Kabupateb/Kota i

Y = PDRB per kapita Provinsi

(dapat juga digunakan untuk membandingkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kecamatan terhadap kabupaten atau provinsi terhadap nasional).

Tabel 1.8 Perhitungan Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	PDRB Per kapita (Y)	laju Pertumbuhan Ekonomi	Y	R	Kwadrant
Ogan Komering Ulu	25.67	5	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Ogan Komering Ilir	23.39	5.01	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Muara Enim	61.82	8.67	$Y_i > Y$	$R_i > R$	I
Lahat	28.90	4.07	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Musi Rawas	32.29	5.79	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Musi Banyuasin	66.68	3.23	$Y_i > Y$	$R_i < R$	I
Banyuasin	22.44	5.14	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Ogan Komering Ulu Selatan	15.18	5.16	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Ogan Komering Ulu Timur	14.17	4.43	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Ogan Ilir	16.76	5.26	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Empat Lawang	13.54	4.28	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Pali	23.63	6.43	$Y_i < Y$	$R_i > R$	II
Musi Rawas Utara	28.03	4.22	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Palembang	59.73	6.69	$Y_i > Y$	$R_i > R$	I
Prabumulih	27.44	5.82	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Pagar Alam	15.66	4.98	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Lubuk Linggau	17.87	6.01	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Sumatera Selatan	35.58	6.04			

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

**Tabel 1.9 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan
Ekonomi Wilayah**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Muara Enim Musi Banyuasin Palembang	Pali
$r_i < r$	-	Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Lahat, Musi rawas, Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir Empat Lawang, Musi Rawas Utara, Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah

2. Analisis Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Produktivitas Sektor Ekonomi

Analisis tipologi kelas untuk klasifikasi produktivitas sektor ekonomi digunakan sebagai dasar untuk mengetahui gambaran pola serta struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Hasil dari analisis ini digunakan dalam mengklasifikasikan laju pertumbuhan sektor ekonomi (17 lapangan usaha) berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu sektor yang cepat maju dan tumbuh cepat, sektor yang berkembang dengan cepat, sektor maju tetapi tertekan, dan sektor relatif tertinggal. Berikut manfaat analisis tipologi kelas untuk produktivitas sektor ekonomi:

1. Menyusun klasifikasi kinerja sektoral dalam perekonomian wilayah
2. Menentukan potensi perkembangan sektor ekonomi;
3. Menganalisis kinerja sektoral dalam suatu wilayah
4. Dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan wilayah
5. Menentukan prioritas sektor andalan pengembangan wilayah

Formulasi tipologi klassen untuk potensi sektor ekonomi wilayah (misalnya tipologi sektor kabupaten dalam provinsi) dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10 Kriteria Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Kinerja Sektor I di suatu wilayah

Kontribusi (y) Pertumbuhan (r)	Kontribusi sektor i di kabupaten lebih besar dari kontribusi provinsi ($y_{ik} > y_i$)	Kontribusi sektor i di kabupaten lebih kecil dari kontribusi provinsi ($y_{ik} < y_i$)
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih besar dari laju pertumbuhan provinsi ($r_{ik} > r_i$)	Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Berkembang Cepat
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih kecil dari laju pertumbuhan provinsi ($r_{ik} < r_i$)	Sektor Maju Tertekan	Sektor Relatif Tertinggal

Keterangan:

r_{ik} = Laju pertumbuhan sektor (i) di Kabupaten (k)

r_i = Laju pertumbuhan sektor (i) di tingkat Provinsi (atau dapat juga menggunakan tingkat nasional)

y_{ik} = Kontribusi sektor (i) terhadap nilai produksi total PDRB Kabupaten (k)

y_i = Kontribusi sektor (i) terhadap nilai produksi total PDRB Provinsi (atau dapat juga menggunakan tingkat nasional)

Laju pertumbuhan nilai produksi sektor i di kabupaten k (r_{ik}) dan tingkat provinsi atau nasional (r_i) serta kontribusi sektor terhadap total PDRB kabupaten k (y_{ik}) dan tingkat provinsi atau nasional dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$r_{ik} = \frac{P_{ikt} - P_{iko}}{P_{iko}} \times 100\% \qquad r_i = \frac{P_{it} - P_{io}}{P_{io}} \times 100\%$$

$$y_{ik} = \frac{P_{ik}}{P_{tk}} \times 100\% \qquad r_{ik} = \frac{P_i}{P_t} \times 100\%$$

Keterangan:

P_{ikt} = Nilai produksi sektor i tingkat kabupaten pada tahun ke-t

P_{iko} = Nilai produksi sektor i tingkat kabupaten pada awal tahun

P_{it} = Nilai produksi sektor i tingkat provinsi atau nasional pada tahun ke-t

P_{io} = Nilai produksi sektor i tingkat provinsi atau nasional pada awal tahun

P_{ik} = Total nilai produksi sektor i tingkat kabupaten

P_{tk} = Total nilai produksi PDRB tingkat kabupaten

P_i = Total nilai produksi sektor i tingkat provinsi atau nasional

P_t = Total nilai produksi sektor PDRB tingkat provinsi atau nasional

Menurut tipologi klassen, klasifikasi produktivitas sektor ekonomi sektor perekonomian wilayah dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Sektor maju dan cepat tumbuh, merupakan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral dan kontribusi yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten atau kota di provinsi;

2. Sektor maju tapi tertekan, merupakan sektor yang mempunyai kontribusi sektor lebih tinggi namun tingkat pertumbuhan ekonomi sektoralnya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten atau kota di provinsi;
3. Sektor berkembang cepat, merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral tinggi namun konstitusi sektor lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten atau kota di provinsi; dan
4. Sektor relatif tertinggal, merupakan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral tinggi dan kontribusi sektor yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten atau kota di provinsi.

1.9 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sering juga disebut koefisien modal. ICOR merupakan metode yang dikembangkan untuk menghubungkan faktor produksi atau pembentukan modal tetap PDRB dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan regional. Teori yang mendasari analisis ICOR yaitu teori pertumbuhan Harrod-Domar tentang *Capital Output Ratio (COR)* atau koefisien modal yang menunjukkan hubungan antara besarnya investasi (modal) dengan nilai output. Dengan demikian, ICOR dapat didefinisikan sebagai hubungan antara investasi yang ditanamkan dan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari suatu investasi.

ICOR menjadi penting untuk menguji konsistensi antara target pertumbuhan dengan tambahan modal yang mungkin dapat

dikumpulkan dari investasi yang sedang berjalan (Widodo, 2006). Oleh karena itu, ICOR dapat digunakan untuk menghitung besarnya kebutuhan modal (investasi) yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Menurut Susanti, dkk (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi ICOR antara lain:

1. Komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi. Hal ini disebabkan karena tingkat penggunaan modal berbeda-beda menurut sektor tertentu dan faktor lain adalah masa tenggang produksi dari berbagai sektor;
2. Laju pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya ICOR berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi
3. Tingkat pendapatan per kapita suatu negara. ICOR suatu negara cenderung meningkat dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, yang menjadi tujuan adalah bagaimana mengupayakan daerah dengan pendapatan per kapita rendah dapat menjadi daerah dengan pendapatan per kapita tinggi. Konsep ICOR menyangkut dengan jenis teknologi produksi yang digunakan yang dapat dilihat dari tambahan penggunaan kapital yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan output. Hal ini menunjukkan negara yang sedang berkembang dengan kegiatan utamanya didominasi oleh sektor pertanian yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada modal (*labor intensive*) akan cenderung memiliki nilai ICOR yang rendah. Sedangkan negara maju yang kegiatan ekonominya lebih didominasi oleh sektor industri dan

jasa menggunakan modal lebih besar (capital intensive) akan cenderung memiliki nilai ICOR yang lebih tinggi.

Rasio modal-output adalah hubungan antara besarnya stok modal dan output total (Asryad, 1999). Stok total (K) berkaitan langsung dengan kemampuan memproduksi output (Y) yang ditunjukkan oleh *capital output ratio* (COR) sama dengan K/Y, dalam bentuk perubahan. $ICOR = \Delta K / \Delta Y$ dikenal dengan rasio tambahan kapital output (ICOR). rumusnya:

$$ICOR = \Delta K_t / \Delta Y_t$$

Keterangan:

ΔK_t = Tambahan kapital (modal) atau investasi

ΔY_t = Perubahan output, yang ditunjukkan oleh perubahan PDRB atau pertumbuhan ekonomi

Contoh, investasi bruto Daerah ABC tahun 2018 sebesar 123.874.081,56 dengan tingkat perubahan output (PDRB) sebesar 9.912.928.10

$$ICOR = \Delta K_t / \Delta Y_t$$

$$ICOR = 123.874.081,56 / 9.912.928.10$$

$$ICOR = 12,49$$

Dalam menghitung jangka panjang selama n tahun maka ICOR rata-rata dihitung dengan rumus:

$$ICOR = \frac{\sum ICOR_t}{n}$$

Keterangan:

$\sum ICOR_t$ = Jumlah ICOR selama periode n

n = Jumlah tahun pengamatan

Dapat juga ditulis dalam bentuk operasional berikut:

$$ICOR = \frac{\frac{I}{PDB} \times 100\%}{\Delta PDB (\%)}$$

Keterangan:

$I/PDB \times 100\%$ = Persentase investasi terhadap PDB (%)

ΔPDB = Laju pertumbuhan ekonomi (%)

Umumnya target pertumbuhan ekonomi berada dalam batas tertentu, maka angka ICOR yang dianggap mempunyai produktivitas investasi yang baik yaitu di antara 3 hingga 4, hal ini dikarenakan jika ICOR semakin tinggi, maka semakin mahal penciptaan output pada wilayah tertentu. Dengan perkataan lain, jika ICOR semakin tinggi, maka modal (investasi) yang dibutuhkan akan semakin besar untuk mencapai tingkat pertambahan output wilayah atau pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dengan demikian, ICOR yang tinggi mengindikasikan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi.

Contoh:

Jika diketahui Daerah ABC memiliki investasi bruto (pembentukan modal bruto) terhadap PDRB suatu wilayah yaitu sebesar 12.49% dan nilai atau target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.07%, maka ICOR dapat dihitung yaitu:

$$ICOR = \frac{12.49}{5.07}$$

$$ICOR = 2.46$$

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan pertambahan output daerah ABC sebesar 5.07 dibutuhkan tambahan kapital sebesar 2.46.

1.10 Analisis Kebutuhan Investasi

1. Kebutuhan Investasi

Investasi dalam ilmu ekonomi adalah pembelian atas barang-barang modal, persediaan atau inventori dan struktur usaha. Investasi menjadi komponen dalam perhitungan pendapatan daerah/wilayah. Investasi dibutuhkan sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan proses produksi yang selanjutnya akan menambah output daerah/wilayah. Dengan demikian, investasi berperan penting karena besarnya investasi berdampak pada terciptanya output, sehingga pendapatan daerah/wilayah juga meningkat. Prasentiano (2005) mengemukakan bahwa penambahan investasi memiliki dampak lainnya yaitu konsumsi masyarakat meningkat, penerimaan pajak juga meningkat sehingga penerimaan pemerintah juga meningkat yang berakibat pada kemampuan belanja pemerintah juga meningkat.

Faktor utama yang menentukan besar kecilnya kebutuhan investasi setiap tahunnya adalah (Muta'Ali, 2015):

- (1) Rasio tambahan kapital dan output (ICOR) suatu sektor;
- (2) Target pertumbuhan sektor yang direncanakan; dan
- (3) Nilai tambah PDRB sektor tahun sebelumnya.

Dalam konsep ICOR diasumsikan bahwa (Y) adalah pendapatan domestik suatu wilayah dan (r) merupakan pertumbuhan pendapatan tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung kebutuhan investasi yaitu (Arsyad 1999).

$$ICOR = \frac{I}{\Delta PDRB}$$

Maka

$$I_t = ICOR \cdot r \cdot PDRB$$

Keterangan:

ICOR = *Incremental Capital Output Ratio*

I = Jumlah investasi pada tahun-t

I_t = Jumlah investasi yang dibutuhkan

r = Tingkat pertumbuhan regional

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar tahun harga konstan tahun-t

$\Delta PDRB$ = Perubahan PDRB

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama, investasi yang dibutuhkan oleh suatu daerah yang memiliki nilai ICOR yang tinggi akan lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki nilai ICOR yang lebih rendah, hal tersebut menggambarkan besarnya peranan nilai ICOR dalam menentukan jumlah investasi yang dibutuhkan. Dengan demikian konsep ICOR menunjukkan bahwa besarnya laju pertumbuhan PDRB riil dan ICOR berbanding lurus dan mempengaruhi kebutuhan investasi secara sektoral maupun total. Oleh karena itu perencanaan investasi menjadi penting karena

terkait dengan target pencapaian pertumbuhan output baik secara sectoral maupun regional dan investasi yang berasal dari pemerintah, swasta dan asing.

Contoh:

ICOR wilayah yaitu 4.35 dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4.6% serta PDRB mencapai 7,842 milyar, maka kebutuhan investasi:

$I_t = 4.35 \times 4.6 \times 7,842 = 156,918.42$ milyar. Jadi, dalam mencapai pertambahan output wilayah sebanyak 4.6% dibutuhkan tambahan kapital 156,918.42 milyar.

2. Formulasi *Propensity to Invest*

Propensity to Invest merupakan ukuran yang menyatakan besarnya peranan investasi dalam perekonomian wilayah. Untuk menghitung *Propensity to Invest* dibutuhkannya data PDRB dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta perubahan stok atau investasi.

$$PI_t = \frac{I_t}{PDRB_t}$$

Keterangan:

PI_t = Propensity to invest tahun t

I_t = Investasi total (PMTB + Perubahan stok)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

3. Rasio Investasi Terhadap Tenaga Kerja

Semakin besar investasi yang ditanamkan di dalam sebuah perekonomian, maka peluang terbukanya kesempatan kerja semakin

tinggi. Oleh karena itu, penambahan investasi seharusnya diarahkan pada investasi padat karya, bukan hanya padat modal. Untuk menganalisis peran investasi dalam penyerapan tenaga kerja yaitu:

$$PITK_t = \frac{I_t}{JTK_{it}}$$

Keterangan:

$PITK_t$ = Peran investasi dalam penyerapan tenaga kerja tahun t

I_t = Investasi total (PMTB + Perubahan stok)

JTK_{it} = Jumlah tenaga kerja sektor i pada tahun t

Contoh, Investasi Daerah ABC tahun 2018 sebesar 123,874,081,564.256 dan Jumlah tenaga kerja Daerah ABC tahun 2018 sebesar 121.022.423

$$PITK_t = \frac{I_t}{JTK_{it}}$$

$$PITK_t = \frac{123,874,081,564.256}{121,022,423}$$

$$PITK_t = 1,023.563$$

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. R. (2005). *Pembangunan Ekonomi Perkotaan. Graha Ilmu: Yogyakarta.*
- Arsyad, Licolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta.*
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Buku I Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota. BPS. Jakarta.*
- Boediono, 1999:81, *Teori Pertumbuhan Ekonomi, seri Sinopsis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.*
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomika Regional: Teori dan Praktik. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.*
- Muhyiddin, N. T. (2017). *Pembangunan Berkelanjutan Interaksi Desa-Kota Rural Urban Fringe. Unsri Press: Palembang.*
- Sukirno, Sadono. (2006) *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: Bima Grafika.*
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Rajawali Pers, Jakarta.*
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya Di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada.*
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Rajawali Pers, Jakarta.*
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.*
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.*

BAB II

ANALISIS KEUANGAN DAERAH

Oleh:

Azwardi, Imelda, Kurnia Sari, Nadiya Angraini

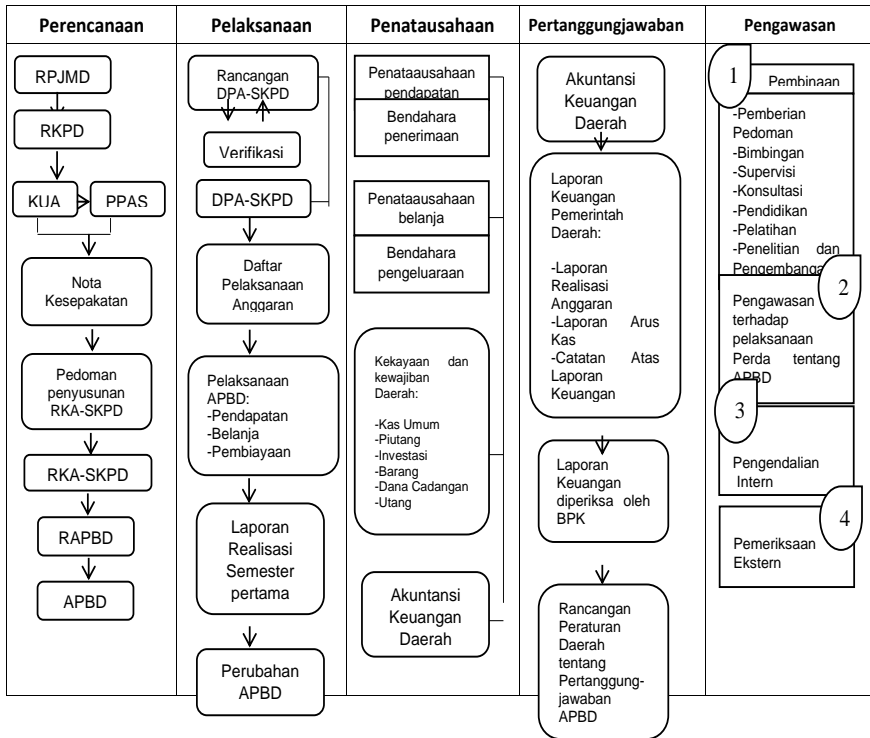
2.1 Konsep dan Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keuangan merupakan faktor yang penting dalam melihat tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah seharusnya menjalankan fungsi dan peranan secara efisien terutama mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Menurut Nataluddin (2001), dua isu utama yang berkaitan dengan implikasi keuangan daerah terhadap otonomi daerah, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan

keuangan pusat dan daerah sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Halim (2012) menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan hak serta kewajiban yang dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai atau dimiliki oleh negara maupun daerah yang lebih tinggi maupun pihak lain sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kinerja yang menggunakan ukuran indikator keuangan disebut kinerja keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 1, menyebutkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 1 ayat 2 menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.



Sumber: Mardiasmo (2005)

Gambar 2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1 mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dengan menggunakan konsep nilai uang atau *value for money* serta prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Akan tetapi, pengelolaan keuangan pemerintah daerah otonom secara umum belum dijalankan fungsi dan peranannya secara efisien. Situasi ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan adalah pendekatan ikremental, dimana pendekatan ini digunakan dalam penentuan besarnya alokasi dana untuk setiap kegiatan. Pendekatan ikremental didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, misalnya jumlah penduduk atau pertumbuhan ekonomi atau laju inflasi. Selain pendekatan ikremental, digunakan juga pendekatan lain misalnya pendekatan *line-item budget* yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan pada pos anggaran yang sudah ada sebelumnya. Pada pendekatan ini, pemerintah daerah tidak menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang ada meskipun pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Perencanaan pengeluaran yang kurang memadai tersebut akhirnya menimbulkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*. Keduanya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah (Halim, 2017). Masalah utama yang dihadapi oleh unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja dalam pemenuhan kebutuhan dan tuntutan public. Sedangkan unit kerja yang mengalami *overfinancing* adalah efisiensi yang rendah. Situasi tersebut dapat menyebabkan layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan publik, sementara dana yang ada pada anggaran keuangan merupakan dana publik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut cenderung membuat peran pemerintah daerah

semakin lemah dalam hal sebagai stimulator, fasilitator, koodinator dan entrepreneur dalam proses pembangunan daerah.

2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Aspek keuangan dan fiskal menjadi modal dasar yang perlu diperhatikan yang tercermin dari Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah alat atau instrumen kebijakan untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sebagai alat bantu pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dan alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang menjadi target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran adalah satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Fungsi Otorisasi: anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan: anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan: anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi: anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi: kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi: anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

APBD dapat digunakan sebagai indikator hubungan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mengukur kreativitas dan kemandirian pemerintah daerah khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah pusat menjadikan APBD khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah, sehingga menuntut kreativitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya dan ekonomi wilayah.

Struktur dan komposisi dalam APBD terdiri dari aspek pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hal milik daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Sedangkan belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

1. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 bagian yakni:

- 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- 2). Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTP), Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Selengkapnya komposisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Komposisi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

No.	Sumber Penerimaan Daerah (Pendapatan Daerah)	No.	Pengeluaran Daerah
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1 Pajak Daerah 1.2 Retribusi Daerah 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	A.	1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Bunga 1.3 Belanja Subsidi 1.4 Belanja Hibah 1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota/Pemerintah Desa

			1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/Pemerintah Desa 1.8 Belanja Tidak Terduga
B.	DANA PERIMBANGAN 2.3 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2.3.1 Bagi Hasil Pajak 2.3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)	B.	2. BELANJA LANGSUNG 1.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.3 Belanja Modal Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.1 Pendapatan Hibah 3.2 Dana Darurat 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	C.	BELANJA MENURUT FUNGSI (BELANJA PEMBANGUNAN) 1. Pelayanan Umum 2. Ketertiban dan Keamanan 3. Ekonomi (sektoral) 4. Lingkungan Hidup 5. Perumahan dan Fasilitas Umum 6. Kesehatan 7. Pariwisata dan Budaya 8. Pendidikan 9. Perlindungan Sosial
D.	PINJAMAN DAERAH Pinjaman dalam negeri Pinjaman luar negeri		
	Pendapatan Daerah = (A + B + C + D)		Pengeluaran Daerah = (A + B + C)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (E)		= Pendapatan - Pengeluaran

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Keterangan lebih rinci dari masing-masing komponen dapat dipelajari dalam UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 32 Tahun 2004, serta PP No. 12 Tahun 2019.

Data komposisi APBD tersebut memberikan manfaat untuk berbagai analisis (Muta'ali, 2015), diantaranya yaitu:

1. Penilaian tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan;
2. Kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;
3. Menilai efektivitas dan efisiensi dalam pendapatan dan belanja daerah;
4. Menilai kinerja penyelenggaraan pembangunan khususnya alokasi biaya pembangunan untuk sektor-sektor pembangunan
5. Menilai peran daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah;
6. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan merupakan pilar penting dalam pembangunan dan otonomi daerah, sehingga jika kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembiayaannya (Pendapatan Asli Daerah) dijadikan sebagai instrument dalam menilai keberhasilan otonomi.

Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk penilaian kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis sehingga didapatkan posisi keuangan yang mewakili realitas dari entitas dan potensi-potensi

kinerja yang akan berlanjut. Dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan maka indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebenarnya belum ada kesepakatan secara umum mengenai nama dan kaidah pengukuran dari rasio keuangan, hal ini dikarenakan analisis rasio yang dilakukan pada sektor publik terhadap APBD belum banyak dilakukan. Namun dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien serta akuntabel maka analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh sektor swasta (Halim, 2012).

Dengan menggunakan struktur APBD dapat disusun serangkaian ukuran kuantitatif kinerja keuangan dan pembangunan daerah yang mendasarkan pada prinsip-prinsip otonomi dan kemandirian penyelenggaraan pembangunan daerah. analisa struktur keuangan daerah pada sisi pendapatan dapat digunakan untuk melihat kapasitas fiskal dan kemandirian daerah serta kinerja otonomi daerah. sedangkan pada sisi pengeluaran atau pembelanjaan dapat diukur efektifitas dan kinerja pembangunan daerah.

Penilaian kinerja keuangan daerah untuk daerah otonom sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Keuangan pemerintah daerah berbasis anggaran dan tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan (profit). Meskipun ada istilah surplus atau defisit untuk pendapatan dan belanja. Surplus dan defisit tersebut menunjukkan sebuah “muara” dari “komitmen” atau “kesepakatan” antara eksekutif dengan legislatif (DPRD) dalam satu tahun anggaran.

Menurut Halim (2012) pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD terdiri dari:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
2. Badan Eksekutif
3. Investor, Kreditor dan Donatur
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
5. Masyarakat

Adapun tujuan pengukuran kinerja menurut Putra (2018) yaitu:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawahh serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Halim (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa rasio keuangan yang dikembangkan dalam organisasi pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan. Menurut penelitian Sularso dan Restianto (2011) indikator ukuran kinerja keuangan meliputi derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio

efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan.

Berikut formulasinya dapat disusun sebagai berikut:

1. Kinerja APBD

Untuk menganalisa kinerja APBD dapat diformulasikan dalam bentuk rasio yaitu membandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan APBD dari tahun ke tahun. Formulasi kinerja keuangan daerah atau APBD dirumuskan sebagai berikut:

1).APBD per kapita adalah rasio APBD dengan jumlah penduduk

$$\text{Rasio APBD dan penduduk} = \frac{\text{APBD (Rp)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Tabel 2.2. Perkembangan APBD dan Jumlah Penduduk Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2018-2019

Provinsi	APBD (Juta Rupiah)		Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio APBD Per Kapita	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jambi	4,412,464	4,575,192	3,570,272	3,624,579	1.24	1.26
Sumatera Selatan	9,141,371	9,280,742	8,391,489	8,470,683	1.09	1.10
Bengkulu	2,851,808	2,934,057	1,963,262	1,991,793	1.45	1.47
Lampung	7,098,983	7,266,993	8,370,467	8,447,672	0.85	0.86
Bangka belitung	2,556,977	2,694,205	1,459,873	1,488,792	1.75	1.81

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Pada Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa selama 2 tahun terakhir, Provinsi Bangka Belitung memiliki Rasio APBD Per Kapita yang paling tinggi. Sedangkan provinsi yang memiliki APBD per kapita terendah adalah Provinsi Lampung.

2). Rasio Pertumbuhan APBD

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) APBD mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan APBD diperoleh dengan mengurangi realisasi penerimaan APBD tahun sekarang dengan realisasi penerimaan APBD tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan realisasi penerimaan APBD tahun sebelumnya.

$$P_{APBD} = \frac{(APBD_t - APBD_{(t-1)})}{APBD_{(t-1)}}$$

Keterangan:

P_{APBD} = Rasio pertumbuhan APBD

$APBD_t$ = APBD pada tahun t

$APBD_{t-1}$ = APBD pada tahun t-1

Tabel 2.3. Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD untuk
Provinsi Se-Sumbagsel

Provinsi	APBD (Juta Rupiah)		Rasio Pertumbuhan APBD
	2018	2019	
Jambi	4,412,464	4,575,192	0.037
Sumatera Selatan	9,141,371	9,280,742	0.015
Bengkulu	2,851,808	2,934,057	0.029
Lampung	7,098,983	7,266,993	0.024
Bangka belitung	2,556,977	2,694,205	0.054

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pada Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa selama 2 tahun terakhir, Provinsi Sumatera Selatan memiliki Rasio pertumbuhan APBD terendah. Hal ini mengindikasikan selama 2 tahun terakhir Pertumbuhan APBD Provinsi Sumatera Selatan hanya meningkat sebesar 15 persen. Sedangkan Provinsi yang memiliki Rasio pertumbuhan APBD tertinggi adalah Provinsi Bangka Belitung.

3). Tipologi Kinerja APBD

Berdasar analisa rasio APBD per kapita dan rasio pertumbuhan APBD, maka dapat disusun Kinerja APBD di suatu wilayah yang diformulasikan dalam gambar tipologi berikut:

Rasio Pertumbuhan APBD	Rasio APBD/Kapita	
	> rata-rata APBD/Kapita	< rata-rata APBD/Kapita
> rata-rata rasio pertumbuhan	APBD Besar Tumbuh	APBD Kecil Tumbuh
< rata-rata rasio pertumbuhan	APBD Besar Stagnan	APBD Kecil Stagnan

Sumber: Muta'ali (2015)

Gambar 2.2. Tipologi Kinerja APBD

Menurut model tipologi tersebut, APBD dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi:

1. APBD besar tumbuh, merupakan APBD yang memiliki rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata.
2. APBD besar stagnan, merupakan APBD yang memiliki rasio APBD/kapita di atas rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di bawah wilayah rata-rata wilayah kajian.

3. APBD kecil tumbuh, merupakan APBD yang memiliki rasio APBD/kapita di bawah rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di atas wilayah rata-rata wilayah kajian.
4. APBD kecil stagnan, merupakan APBD yang memiliki rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata.

Tabel 2.4. Perbandingan Rata-rata Rasio Pertumbuhan APBD dan Rata-rata Rasio APBD Per Kapita di Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019.

Provinsi	Rasio Pertumbuhan APBD	Analisa	Rasio APBD Per Kapita	Analisa
Jambi	0.037	<rata-rata rasio pertumbuhan	1.26	>rata-rata APBD/kapita
Sumatera Selatan	0.015	>rata-rata rasio pertumbuhan	1.10	>rata-rata APBD/kapita
Bengkulu	0.029	>rata-rata rasio pertumbuhan	1.47	<rata-rata APBD/kapita
Lampung	0.024	>rata-rata rasio pertumbuhan	0.86	>rata-rata APBD/kapita
Bangka belitung	0.054	<rata-rata rasio pertumbuhan	1.81	<rata-rata APBD/kapita
Rata-rata	0.032		1.30	

Sumber: DJPK, data diolah 2020

Rasio Pertumbuhan APBD	Rasio APBD/Kapita	
	> rata-rata APBD/Kapita	< rata-rata APBD/Kapita
> rata-rata rasio pertumbuhan	APBD Besar Tumbuh Sumatera Selatan Lampung	APBD Kecil Tumbuh Bengkulu
< rata-rata rasio pertumbuhan	APBD Besar Stagnan Jambi	APBD Kecil Stagnan Bangka Belitung

Sumber: data diolah, 2020.

Gambar 2.3. Tipologi Kinerja APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019

Berdasarkan kuadran tipologi kinerja APBD di atas, diketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung berada pada kuadran APBD Besar tumbuh. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan wilayah Provinsi Sumatera Selatan berada di atas rata-rata wilayah. Provinsi Jambi berada pada kuadran APBD Besar Stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio APBD/kapita Provinsi Jambi di atas rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata wilayah. Provinsi Bengkulu berada pada kuadran APBD Kecil Tumbuh. Hal ini mengindikasikan rasio APBD/kapita Provinsi Bengkulu di bawah rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata wilayah. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung berada pada kuadran APBD Kecil Stagnan, maksudnya rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan Provinsi Bangka Belitung di bawah rata-rata wilayah.

4). Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) atau Derajat Desentralisasi Fiskal

Kapasitas fiskal daerah menunjukkan tingkat otonomi fiskal yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas fiskal diukur dengan formulasi berikut:

$$KFD = \frac{PAD}{TPD}$$

Keterangan:

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

Nilai KFD antara 0-1, semakin mendekati nilai 1 (besar) maka semakin besar kemampuan fiskal daerah dan tingkat kemandirian semakin tinggi dan sekaligus ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah.

Tabel 2.5. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

Provinsi	PAD	TPD	Nilai KFD
Jambi	1,651,089,944,335	4,575,192,849,736	0.361
Sumatera Selatan	3,494,510,853,252	9,280,742,072,449	0.377
Bengkulu	826,674,936,050	2,934,057,941,394	0.282
Lampung	3,018,067,291,160	7,266,993,438,828	0.415
Bangka belitung	826,701,095,332	2,694,205,659,655	0.307

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran.

Pada Tabel 2.5 dapat dilihat total PAD dan TPD tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan total PAD terendah adalah Provinsi Bengkulu dan total TPD terendah adalah Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan penghitungan nilai KFD, ke-5 Provinsi di Sumbagsel memiliki nilai KFD yang belum mendekati 1. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah dan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.

5). Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah dan Pusat

Ketergantungan fiskal Daerah-Pusat dinyatakan dengan perbandingan antara kemampuan keuangan daerah atau PAD dengan penerimaan

daerah yang berasal dari pusat atau Dana Perimbangan. Berikut formulasinya:

$$KFDP_1 = \frac{PAD}{DP}$$

Atau

$$KFDP_2 = \frac{DP}{TPD}$$

KFDP = ketergantungan fiskal Daerah-Pusat

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan dari pusat yang terdiri dari Bagi hasil pajak, DAK dan DAU

TPD = Total Penerimaan Daerah

Nilai KFDP antara 0-1, semakin mendekati nilai 1 (besar) maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat dan tingkat kemandirian semakin tinggi. berdasarkan rentang nilai berikut dapat dibuat klasifikasi berikut:

< 0,25 = Sangat tidak mandiri, ketergantungan terhadap pemerintah pusat

0,26-0,50 = Tidak Mandiri, Ketergantungan terhadap pusat tinggi

0,51-0,75 = Mandiri

>0,75 = Sangat Mandiri

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Nataluddin (2001), pola hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari 4 pola yaitu:

a. Pola Hubungan Instruktif

Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

b. Pola Hubungan Konsultatif

Daerah sudah sedikit mampu menyelenggarakan otonomi daerah, hal ini dikarenakan campur tangan dari pemerintah pusat sudah sedikit berkurang.

c. Pola Hubungan Partisipatif

Campur tangan pemerintah pusat tidak lagi dominan, karena tingkat kemandirian daerah otonom sudah layak dan mampu melaksanakan otonomi.

d. Pola Hubungan Delegatif

Daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah, hal ini dikarenakan campur tangan pemerintah sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, daerah otonom lah yang mendominasi pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 2.6. Klasifikasi Indeks Kemandirian Wilayah

Klasifikasi	Nilai KFDP	Pola Hubungan Pusat-Daerah
Sangat Tidak Mandiri	< 25.00	Instruktif
Tidak Mandiri	0,25-0,50	Konsultatif
Mandiri	0,51-0,75	Partisipatif
Sangat Tinggi	>0,75	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Tabel 2.7. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

Provinsi	PAD	DANA PERIMBANGAN	KFDP ₁
Jambi	1,651,089,944,335	2,896,753,806,401	0.57
Sumatera Selatan	3,494,510,853,252	5,698,701,179,582	0.61
Bengkulu	826,674,936,050	2,076,151,739,620	0.40
Lampung	3,018,067,291,160	2,627,195,349,110	1.15
Bangka belitung	826,701,095,332	1,742,433,563,849	0.47

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 2.7 memperlihatkan bahwa total PAD dan DP tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan total PAD terendah adalah Provinsi Bengkulu dan Total DP terendah adalah Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan penghitungan nilai KFDP₁, Provinsi Lampung memiliki nilai KFDP₁ yang melebihi 1, hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung memiliki tingkat ketergantungan daerah yang rendah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan klasifikasi indeks kemandirian wilayah, pola hubungan yang terjadi di Provinsi Lampung adalah pola hubungan delegatif yang berarti daerah otonom telah mendominasi pelaksanaan otonomi daerah karena campur tangan pemerintah sudah sangat rendah. Nilai KFDP₁ untuk ke-4 (empat) Provinsi lainnya masih mendekati nilai 1, hal ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

6). Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Indikator PAD sangatlah strategis dalam pembangunan wilayah khususnya membangun kemandirian dan otonomi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Selain formulasi dan rasio yang telah disebutkan dapat dikembangkan lagi ukuran dalam menilai kinerja PAD, diantaranya:

- Perbandingan PAD dengan pengeluaran total
- Perbandingan PAD dengan pengeluaran rutin
- Perbandingan PAD + Bagi hasil pengeluaran total
- Perbandingan PAD + Bagi hasil pengeluaran rutin
- Perbandingan PAD Per Kapita dengan Pengeluaran Rutin Per Kapita
- Perbandingan PAD Per Kapita dengan Pengeluaran Total Per Kapita

7). Elastisitas PAD

Selain itu untuk melihat aspek perubahan PAD terdapat struktur APBD juga dapat dinilai dengan elastisitas PAD, yaitu:

$$e = \frac{\Delta PAD}{\Delta APBD} \text{ Atau } e = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

keterangan:

e = elastisitas PAD dalam keuangan daerah atau terhadap PDRB

ΔPAD = perubahan nilai PAD pada dua skala yang berbeda

$\Delta APBD$ = perubahan nilai APBD pada dua skala yang berbeda

$\Delta PDRB$ = perubahan nilai PDRB pada dua skala yang berbeda

Tabel 2.8. Penghitungan Elastitas PAD Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019

Tahun	PAD (Juta Rupiah)	PDRB (Milyar Rupiah)	Elastisitas PAD
2018	2,864,235	232,207.68	12.58%
2019	3,018,067	244,436.79	

Sumber: DJPK dan BPS

Elastisitas PAD Provinsi Lampung sebesar 12,58 persen. Semakin tinggi nilai elastisitas PAD suatu daerah maka semakin baik pula peran dan perubahan nilai PAD terhadap APBD ataupun PDRB.

Dengan menggunakan kriteria *share* and *growth*, kemampuan PAD suatu daerah juga dapat dikelompokkan kedalam tipologi berikut:

<i>Share PAD</i>	<i>Growth PAD</i>	
	> rata-rata (tinggi)	< rata-rata (rendah)
> rata-rata (tinggi)	PAD Besar Tumbuh	PAD Besar Stagnan
< rata-rata (rendah)	PAD Kecil Tumbuh	APBD Kecil Stagnan

Sumber: Muta'ali (2015)

Gambar 2.4. Kriteria *Share* And *Growth*

Keterangan:

$$Share = \frac{PAD}{APBD} \times 100\% \quad Growth = \frac{(PAD_t - PAD_{(t-1)})}{PAD_{(t-1)}} \times 100\%$$

Tabel 2.9. Perhitungan *Share* PAD Provinsi Lampung Tahun 2019

Provinsi	PAD (Rupiah)	APBD (Rupiah)	Share PAD
Jambi	1,651,089,944,335	4,575,192,849,736	36.09
Sumatera Selatan	3,494,510,853,252	9,280,742,072,449	37.65
Bengkulu	826,674,936,050	2,934,057,941,394	28.18
Lampung	3,018,067,291,160	7,266,993,438,828	41.53
Bangka Belitung	826,701,095,332	2,694,205,659,655	30.68

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, data diolah.

Berdasarkan perhitungan *share* PAD di atas, diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki persentase *share* PAD yang tinggi sebesar 41.53 persen. sedangkan Provinsi dengan nilai *share* PAD yang rendah adalah Provinsi Bengkulu memiliki persentase *share* PAD sebesar 28.18 persen.

Tabel 2.10. Perhitungan *Growth* PAD Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019 (Rupiah)

Provinsi	2019	2018	Growth PAD
Jambi	1,651,089,944,335	1,656,569,597,282	(0.33)
Sumatera Selatan	3,494,510,853,252	3,528,010,712,184	(0.95)
Bengkulu	826,674,936,050	872,257,738,966	(5.23)
Lampung	3,018,067,291,160	2,864,235,753,079	5.37
Bangka Belitung	826,701,095,332	850,441,774,831	(2.79)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, data diolah.

Berdasarkan perhitungan *growth* PAD di atas, diketahui bahwa hanya Provinsi Lampung memiliki pertumbuhan atau *growth* PAD. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir PAD Provinsi Lampung tumbuh sebesar 5.37 persen. Sedangkan 4 Provinsi lainnya memiliki penurunan atau tidak ada pertumbuhan dalam PAD.

Tabel 2.11. Perbandingan rata-rata *share* PAD dan *Growth* PAD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019.

Provinsi	Share PAD	Analisa	Growth PAD	Analisa
Jambi	36.09	< rata-rata rendah	(0.33)	< rata-rata rendah
Sumatera Selatan	37.65	< rata-rata rendah	(0.95)	> rata-rata tinggi
Bengkulu	28.18	> rata-rata tinggi	(5.23)	> rata-rata tinggi
Lampung	41.53	< rata-rata rendah	5.37	< rata-rata rendah
Bangka belitung	30.68	> rata-rata tinggi	(2.79)	> rata-rata tinggi
rata-rata	34.83		(0.79)	

Sumber: DJPK, data diolah

<i>Share PAD</i>	Growth PAD	
	> rata-rata (tinggi)	< rata-rata (rendah)
> rata-rata (tinggi)	PAD Besar Tumbuh Bengkulu Bangka Belitung	PAD Besar Stagnan
< rata-rata (rendah)	PAD Kecil Tumbuh Sumatera Selatan	APBD Kecil Stagnan Jambi Lampung

Sumber: data diolah, 2020

Gambar 2.5. Analisa kriteria *share* and *growth* Provinsi Lampung Tahun 2018-2019.

Berdasarkan kuadran kriteria *share* and *growth* di atas, diketahui bahwa Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung berada pada kuadran PAD Besar tumbuh.. Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung berada pada kuadran PAD Kecil Stagnan. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan berada pada kuadran PAD Kecil Tumbuh

8). Kinerja Pembangunan

Belanja atau pengeluaran daerah digunakan untuk mengukur seberapa jauh efektifitas pencapaian hasil pembangunan. Secara umum belanja daerah mencakup dua komponen yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Sedangkan belanja pembangunan

berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan public menurut kepentingan sektor pembangunan.

Dengan demikian, semakin tinggi dana APBD yang digunakan untuk pembangunan maka semakin tinggi kinerja pembangunan daerah. sebaliknya semakin banyak dana yang digunakan untuk belanja pegawai maka semakin rendah keinerja pembangunan. Berikut formulasi dalam 2 ukuran:

$$KPD_1 = \frac{BP}{TP}$$

$$KPD_2 = \frac{BP}{BR}$$

Keterangan:

KPD_1 = Kinerja Pembangunan Daerah (model pertama)

KPD_2 = Kinerja Pembangunan Daerah (model kedua)

BP = Belanja Pembangunan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat yaitu belanja pelayanan publik.

BR = Belanja Rutin (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Biaya Pemeliharaan, Biaya Perjalanan Dinas, Belanja Lain-Lain)

TP = Total Pengeluaran atau Total Belanja Daerah

Nilai kinerja Pembangunan Daerah (KPD) berkisar antara 0-1. Jika mendekati nilai 1 maka semakin tinggi kinerja pembangunan karena semakin banyak alokasi belanja daerah untuk pembangunan. Berikut klasifikasinya

Tabel 2.12. Klasifikasi Kinerja Pembiayaan Pembangunan Wilayah

Klasifikasi	KPD ₁	KPD ₂
Sangat Tinggi	> 0,5	> 0,75
Tinggi	0,5-0,36	0,51-0,75
Rendah	0,35-0,20	0,25-0,50
Sangat Rendah	< 0,20	< 0,25

Sumber: data diolah, 2020

Tabel 2.13. Perkembangan Belanja Pembangunan dan Total Belanja Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

Provinsi	Belanja Pembangunan (Modal)	Total Belanja Daerah	KPD ₁
Jambi	866,500,805,931	4,824,366,351,413	0.18
Sumatera Selatan	1,606,219,507,432	9,618,074,513,841	0.17
Bengkulu	741,823,063,584	3,118,303,518,797	0.24
Lampung	1,014,037,524,021	7,058,713,889,024	0.14
Bangka belitung	441,201,203,551	2,776,076,365,845	0.16

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pada Tabel 2.13, belanja pembangunan dicerminkan dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pos akun belanja langsung di dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (LRA). Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Provinsi sumatera selatan adalah provinsi dengan alokasi belanja modal tertinggi dan Provinsi dengan alokasi belanja modal

terendah adalah Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan penghitungan KPD₁ atau nilai kinerja pembangunan daerah, ke-5 (lima) Provinsi Se-Sumbagsel memiliki klasifikasi kinerja pembangunan yang masih sangat rendah. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperbesar porsi alokasi belanja yang bersifat pengadaan dan pembangunan karena akan berdampak pada kemajuan suatu daerah.

Data belanja pembangunan untuk sektoral, misalnya untuk sektor permukiman, pendidikan, kesehatan, pertanian, dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kinerja pembangunan sektor tersebut. Intensitas belanja pembangunan juga dapat dibandingkan posisi variabel kunci lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya. Contoh formulasinya sebagai berikut:

Rasio Belanja Pembangunan Per Kapita =

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan (RP)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Distribusi Belanja Pembangunan Per Wilayah =

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan (Rp)}}{\text{Luas Wilayah}}$$

9). Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. dalam melakukan fungsi pelayanan publik, maka pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran atau terjadi kesuaian diantara keduanya. Pengeluaran sama atau mendekati penerimaan. Formulasinya sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formulasinya:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}}$$

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Berikut formulasinya:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}}$$

Menurut Kemendagri, Nilai Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.14. Klasifikasi Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	
Klasifikasi	Kriteria
> 1	Sangat Efektif
0,9 – 1,0	Efektif
0,8 – 0,9	Cukup Efektif
0,6 – 0,8	Kurang Efektif
< 0,6	Tidak Efektif

Sumber: Muta'ali (2015)

Tabel 2.15. Klasifikasi Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	
Klasifikasi	Kriteria
> 1	Tidak Efisiensi
0,9 – 1,0	Kurang Efisien
0,8 – 0,9	Cukup Efisien
0,6 – 0,8	Efisien
< 0,6	Sangat Efisien

Sumber: Muta'ali (2015)

Kinerja keuangan daerah tidak efisien karena pengeluaran melebihi penerimaan daerah. jika tidak efisien maka keuangan daerah menjadi defisit sehingga mengharuskan daerah untuk meminjam dana atau mengambil APBD tahun berikutnya. Sebaliknya kinerja keuangan daerah yang kurang efisien karena pengeluaran lebih kecil dari penerimaan daerah. pada kondisi kurang efisien, maka keuangan daerah menjadi surplus. Keadaan ini dimungkinkan rendahnya daya serap dan realisasi kegiatan pembangunan yang akan berakibat pada kegiatan pembangunan yang tidak berjalan maksimal.

Tabel 2.16 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas
2017	9,280,742,072,449	9,660,923,645,962	0.96
2018	9,141,371,395,100	6,865,580,106,642	1.33
2019	8,195,968,131,800	8,195,110,542,121	1.00

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan hasil penghitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai yang berkisar 0.9 sampai > 1. Pada tahun 2017 memiliki kriteria Efektif. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 memiliki kriteria sangat efektif. Hal ini mengindikasikan Provinsi Sumatera Selatan secara agregat berhasil dalam pencapaian tujuan anggaran.

Tabel 2.17 Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 (Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2017	6,409,382,404,458	9,280,742,072,449	0.69
2018	7,941,143,670,102	9,141,371,395,100	0.87
2019	9,618,074,513,841	8,195,968,131,800	1.17

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data diolah.

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, rasio efisiensi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai yang berkisar 0.6 sampai > 1. Pada tahun 2017 memiliki kriteria Efisien. Sedangkan tahun 2018 memiliki kriteria Cukup Efisien. Tahun 2019 rasio efisiensi memiliki nilai 1.17, hal ini mengindikasikan berada pada kriteria tidak efisien karena pengeluaran belanja lebih besar daripada pendapatan.

10). Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang

dialokasikan untuk belanja rutin, maka persentase belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio aktivitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBN}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBN}}$$

Dalam menghitung rasio ini belum ada ketentuan tolok ukur yang dijadikan dalam perhitungannya. Hal ini dikarenakan adanya dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun, sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relative besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan di daerah.

Tabel 2.18. Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah).

Provinsi	Belanja Modal	APBD	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD
Jambi	866,500,805,931	4,575,192,849,736	0.2
Sumatera Selatan	1,606,219,507,432	9,280,742,072,449	0.2
Bengkulu	741,823,063,584	2,934,057,941,394	0.3
Lampung	1,014,037,524,021	7,266,993,438,828	0.1
Bangka belitung	441,201,203,551	2,694,205,659,655	0.2

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data diolah.

Dari perhitungan Tabel 2.18 diketahui bahwa Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Provinsi Se-Sumbagsel berkisar antara 0.0 sampai 0.3. Provinsi yang memiliki rasio tertinggi adalah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Provinsi yang memiliki rasio terendah adalah Provinsi Lampung. Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung memiliki Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD dengan nilai yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Halim, Abdul. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah. *UPP STIM YKPN*.
- Mardiasmo. (2005). Pengelolaan Keuangan Daerah/PKD, Workshop Implikasi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. *MEP UGM: Yogyakarta*.
- Muta'ali, L. (2015). Teknik Analisis Regional. *BPFG Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta*.
- Nataluddin. (2001). Potensi dana perimbangan daerah pada pemerintah daerah di Propinsi Jambi. *Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN*.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Vo. 1 No.*, Hal 109-124.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

BAB III

LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

Oleh:

Abdul Bashir, Mukhlis, Bambang Bemby Soebyakto, Ichsan Hamidi

1. Pendahuluan

Memahami hubungan antara Lingkungan dan Pembangunan tidak cukup hanya melihat data, informasi dan pengetahuan, tetapi juga harus dapat menjelaskan hubungan dan konsekuensi secara mendalam untuk menemukan solusi kebijakan dan kemungkinan program kegiatan untuk mendorong pembangunan. Secara umum, dalam literatur ekonomi pembangunan pembangunan terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Indikator dasar yang digunakan untuk pembangunan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang didefinisikan sebagai ukuran agregat produksi yang sama dengan jumlah nilai bruto yang ditambahkan dari semua sektor dan unit kelembagaan yang terlibat dalam produksi tersebut. Sementara itu, lingkungan juga dapat dipahami melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA). Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, hutan, minyak bumi, batubara dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan. Persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan lingkungan adalah bagaimana mengelola dan mengalokasikan SDA tersebut agar dapat

menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan tersebut.

Dalam literatur ilmu ekonomi SDA, untuk memahami konsep sumber daya alam ada dua hal penting yang perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan pengertian antara sumber daya alam dan barang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang masih terdapat dalam ataupun diluar bumi yang masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya kebutuhan manusia. Sementara barang sumber daya alam adalah sumber daya alam yang sudah diambil dari tempat tersedianya dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor produksi lain untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pandangan Rees (1990) dalam bukunya menjelaskan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai barang sumber daya alam harus memiliki dua kriteria, yaitu: (1) harus ada pengetahuan, teknologi atau ketrampilan untuk memanfaatkannya; dan (2) harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya alam tersebut. Apabila kedua kriteria tersebut tidak dimiliki, maka sesuatu tersebut disebut dengan barang netral. Sebagai contoh, tambang emas yang terkandung dalam bumi, apabila belum memiliki pengetahuan dan teknologi untuk memanfaatkannya dan tidak ada permintaan, maka tambang emas tersebut masih dalam kriteria barang netral. Namun pada saat ada permintaan dan teknologi tersedia, maka menjadi barang sumber daya alam.

Pengelolaan SDA merupakan suatu intervensi publik yang sistematis dalam jangka Panjang, sehingga dalam pengalokasian dan pemanfaatan SDA juga harus dapat dikontrol oleh pemerintah dan

mekanisme pasar, hal ini dimaksudkan supaya kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial (kegagalan pasar) yang akan terjadi dapat diminimalisir. Sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas dan mengalami kerusakan merupakan suatu kendala bagi berlangsungnya pembangunan. Untuk menangani persoalan tersebut tentu harus mendapatkan perhatian yang serius bagi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia internasional, karena apabila tidak dilakukan dengan serius justru akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itu sangatlah penting melakukan inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam agar dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati lebih hati-hati dan sangat diperlukan bagi pembangunan.

Kebijakan pembangunan dan aspek lingkungan seringkali tidak sejalan, hal ini bertolak belakang dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Konferensi mengenai Lingkungan dan Mahluk hidup di Stockholm pada 1972. Pada pertemuan itulah untuk pertama kalinya secara luas seluruh perwakilan dari berbagai negara di dunia menekankan perlunya memperhitungkan aspek lingkungan pada program-program pembangunan yang selama ini dijalankan. Pada pertemuan menghasilkan pemikiran yang pro-kontra antara negara maju dan berkembang, terutama bagi negara-negara berkembang yang beranggapan bahwa isu lingkungan ini merupakan akal-akalan negara maju untuk menghindari dari tuntutan agar negara maju membantu negara berkembang dengan menyumbang sebesar 0,7 persen dari

Produk Domestik Bruto (PDB) negara maju untuk negara berkembang (Salim, 2010).

Masalah lingkungan di dalam ranah ekonomi dapat ditinjau melalui model aliran melingkar atau model keseimbangan material yang merupakan konsep dasar interaksi antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Selain itu, teori transisi lingkungan perkotaan juga dapat menjadi dasar untuk mengungkapkan hubungan antara lingkungan dan pembangunan di tingkat perkotaan, teori ini menekankan pada interaksi rumah tangga melalui sektor konsumsi dan produksi terhadap lingkungan, pada pada gilirannya menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan yang lebih tinggi. Selanjutnya masalah lingkungan juga dapat ditinjau dari teori eksternalitas yang secara khusus memperhitungkan dengan tepat konsekuensi lingkungan dari sebuah kegiatan ekonomi. Titik awal untuk mengembangkan landasan kesejahteraan secara teoritis dalam ekonomi lingkungan adalah dengan memahami definisi kriteria normatif yang dapat digunakan untuk menilai keinginan dari hasil ekonomi yang berbeda. Kriteria yang dapat digunakan adalah optimalitas Pareto, yang memiliki keutamaan dan kelemahan sebagai dasar normatif untuk rekomendasi kebijakan.

Tantangan kedepan bagaimana kebijakan pembangunan dalam memanfaatkan lingkungan dan mengelola sumber daya alam tersebut. Dalam memahami hal tersebut titik awalnya adalah apakah aktivitas pembangunan memiliki pengaruh langsung terhadap lingkungan. Fungsi pertanyaan tersebut adalah untuk menganalogikan jenis masalah yang dipertimbangkan dalam ekonomi lingkungan dan

petunjuk pada aspek studi positif dan normatif. Dari sudut pandang positif yakni memahami bagaimana struktur kelembagaan yang ada dapat menyebabkan para pelaku ekonomi yang berkepentingan secara mandiri untuk melakukan tindakan yang memiliki konsekuensi negatif bagi pihak lain. Sementara, pendapat dari perspektif normatif menyarankan adanya intervensi kebijakan dari pemerintah yang dapat membantu mengurangi konsekuensi tersebut.

2. Hubungan antara Lingkungan dan Pembangunan

Interaksi ini dapat dicirikan sebagai salah satu saling ketergantungan. Sebagaimana pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa kondisi lingkungan yang baik, demikian pula kualitas lingkungan tidak dapat dipertahankan di wilayah yang dihuni atau dieksploitasi secara intensif tanpa pembangunan berkelanjutan. Apabila memandang pembangunan secara sempit hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, maka kualitas lingkungan secara umum tidak terlalu menjadi masalah karena kelimpahan, kualitas dan aksesibilitas sumber daya alam untuk bahan baku dan energi sebagai pusat perekonomian. Jika kita memahami pembangunan secara lebih luas, misalnya dalam arti pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan dan kondisi berkelanjutan akan menjadi salah satu prioritas utama. Dalam hal ini, pelestarian kelestarian lingkungan jangka panjang atau pada akhirnya perbaikan kondisinya (dalam kasus kerusakan masa lalu) akan menjadi pusat perhatian.

Kondisi atau kualitas lingkungan setelah atau selama pelaksanaan program pembangunan dapat memberikan dampak

terhadap lingkungan. Pelaksanaan program atau proyek pembangunan dapat berdampak negatif dan positif terhadap lingkungan. Adapun contoh dari dampak tersebut dan pengaruhnya adalah:

- (1). Dampak negatif dari program pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan air besar, kota; penambangan sumber daya alam dari bahan mentah dan energi dan lain-lain. Program pembangunan tersebut dapat memberikan pengaruh seperti fragmentasi habitat alami; hilangnya tanah subur; deforestasi dan degradasi tanah; pencemaran lingkungan; perubahan iklim lokal dan lain-lain.
- (2). Dampak positif dari program pembangunan bendungan air yang lebih kecil; penerapan teknologi ramah lingkungan dan lain-lain. Pengaruh dari implementasi program tersebut dapat meningkatkan keanekaragaman hayati; pengayaan lanskap dengan fitur budaya; eksploitasi lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan.

Lingkungan merupakan salah satu determinan penting yang mempengaruhi kemungkinan pembangunan. Diketahui secara empiris bahwa berbagai strategi pembangunan harus diterapkan di perkotaan, industri, dan pedesaan. Pendekatan pembangunan yang berbeda harus ditentukan sesuai dengan kondisi geografi wilayah seperti di daerah daratan, pesisir, pegunungan, dan dataran rendah. Jenis ekosistem dan iklim wilayah juga menjadi faktor penting dalam menentukan program pembangunan. Selain itu, faktor yang juga paling menentukan kebijakan dan program pembangunan adalah:

- (1). Zona iklim (tropis, subtropis, zona sedang);
- (2). Faktor fisik-geografi dasar (misalnya ketinggian di atas permukaan laut, curah hujan, suhu);
- (3). Kualitas lingkungan (misalnya tingkat polusi, kepadatan penduduk, perluasan area yang gundul, tingkat degradasi tanah dan penggurunan);
- (4). Kualitas dan kesuburan tanah, kualitas dan kuantitas sumber daya bahan baku dan energi, aksesibilitas sumber daya air minum berkelanjutan, dan sejenisnya.

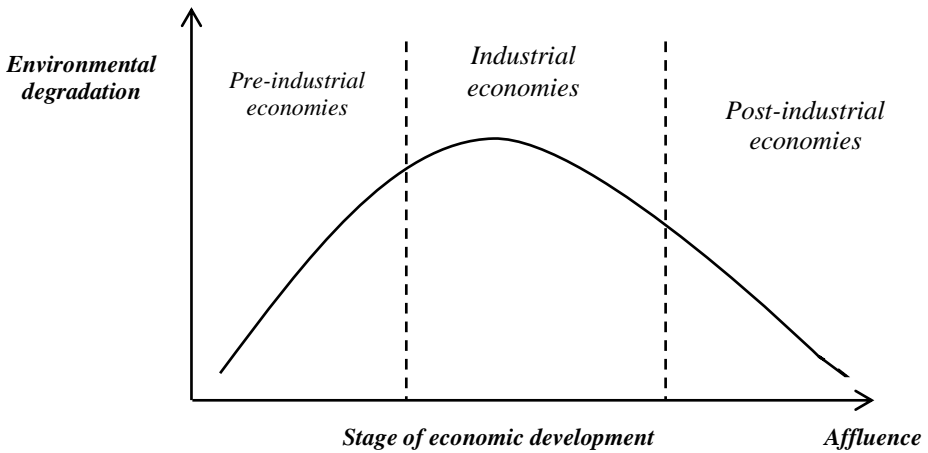
Pembangunan ekonomi dapat diikuti juga oleh perkembangan industrialisasi, infrastruktur, dan aktivitas manusia sangat erat kaitannya dengan penurunan kualitas lingkungan yang sekaligus dapat merubah bentuk fisik atau kawasan suatu wilayah (Misra, 2014 dan Patz *et al.*, 2003). Aktivitas tersebut secara langsung dapat meningkatkan kebutuhan energi. Sementara aktivitas manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (kesejahteraan) seringkali mengabaikan dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Bahkan lebih jauh dapat mengakibatkan terjadinya deforestasi atau kehilangan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta terjadinya erosi tanah. Pada saat fungsi komponen-komponen lingkungan tersebut hilang, maka mengakibatkan terjadinya bencana alam dan tingginya tingkat polusi pada suatu kawasan. Beberapa studi terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Alam (2010); Sorrell (2010); Guo & Ma (2008); dan Basiago (1999) menjelaskan bahwa antara aktivitas pembangunan dan lingkungan terdapat fenomena

trade-off karena pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa kondisi lingkungan yang baik, demikian pula kualitas lingkungan tidak dapat dipertahankan di wilayah yang dihuni atau dieksploitasi secara intensif tanpa pembangunan.

Fenomena tersebut dapat dianalogikan ketika pembangunan ekonomi suatu negara masih belum berkembang, maka perhatian negara tersebut tertuju pada bagaimana meningkatkan pembangunan negara tersebut, baik melalui produksi, investasi, perdagangan internasional yang akan merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan lingkungan. Akibat dari pembangunan ekonomi tersebut juga diikuti oleh peningkatan indikator polusi sampai pada titik tertentu dan kemudian menurun kembali selama pembangunan yang terus berjalan. Konsep ini juga dikembangkan atas dasar permintaan akan kualitas lingkungan pada negara-negara maju melalui peningkatan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang diikuti juga pengawasan sosial dan regulasi pemerintah sehingga masyarakat akan lebih sejahtera (Mason & Swanson, 2002).

Pada Gambar 1 mengilustrasikan bahwa pada tahap pertama, pembangunan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan degradasi lingkungan yang disebut sebagai *pre-industrial economies*, tahap kedua dikenal sebagai *industrial economies*, dan tahap ketiga, dikenal sebagai *post-industrial economics (service economy)*. Industrialisasi berawal dari industri kecil dan kemudian bergerak ke industri berat. Pergerakan ini diasumsikan dapat meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, yang pada akhirnya menyebabkan

penurunan kualitas lingkungan (degradasi lingkungan). Setelah itu industrialisasi dapat memperluas perannya pada pembentukan produk nasional domestik yang semakin stabil. Adanya investasi asing juga telah mendorong terjadinya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam meningkatkan perekonomian suatu negara secara langsung akan menyebabkan terjadinya peningkatan polusi di negara tersebut (Panayotou, 2003).



Gambar 3.1 Hubungan antara Degradasi Lingkungan dan Pembangunan

Sumber: Panayotou (2003)

Pada tahap berikutnya transformasi ekonomi terjadi berupa pergerakan dari sektor industri ke sektor jasa. Pergerakan ini diikuti oleh penurunan polusi yang sejalan dengan peningkatan pendapatan. Selain itu peningkatan permintaan kualitas lingkungan berjalan seiring

dengan peningkatan pendapatan. Pada gilirannya peningkatan pendapatan dapat diikuti oleh peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar kerugian lingkungan (*external cost*) yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi. Pendapat lain dari Andreoni & Levinson (2001) yang menyatakan bahwa pada tahap ini juga ditandai oleh timbulnya kemauan masyarakat untuk mengorbankan konsumsi barang lainnya demi terlindunginya lingkungan.

Selain itu, Panayotou (2003) juga menggambarkan adanya dampak skala pada polusi, yang mengendalikan dua efek lainnya, diharapkan dapat meningkatkan fungsi pendapatan secara monoton karena semakin besar skala aktivitas ekonomi per unit di daerah akan menyebabkan semakin tinggi tingkat pencemaran, dan diasumsikan semua kegiatan lainnya sama. Sementara itu, terjadinya perubahan struktural dengan mengubah komposisi aktivitas ekonomi terhadap sektor-sektor yang memiliki intensitas polusi lebih tinggi juga dapat mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan. Lebih jauh, Pindyck (2013) menjelaskan bahwa penurunan kualitas lingkungan dan lainnya dapat mengakibatkan pasar yang tidak efisien karena menghambat produksi, menambah biaya marjinal dan membuat ketidakefisienan sosial dalam pasar, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (Eidelwein *et al.*, 2018)

3. Pembangunan Berkelanjutan

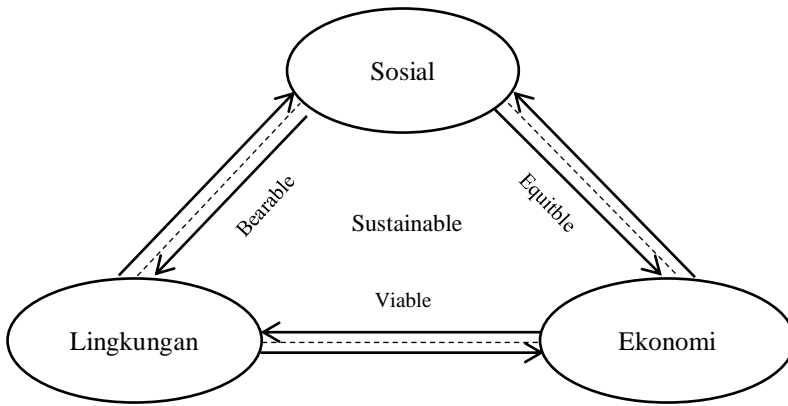
Pembangunan berkelanjutan diperkenalkan sebagai prioritas global dalam apa yang disebut "KTT Bumi", di Rio de Janeiro, pada tahun 1992. Kemudian, pada tahun 2002 dan 2012 sebagian besar negara di

dunia memperbarui komitmen mereka untuk mencapai keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar yaitu: (1) pembangunan ekonomi; (2) pembangunan sosial; dan (3) perlindungan lingkungan (United Nations, 2015). Konsep pembangunan berkelanjutan juga menjelaskan bahwa penduduk di suatu wilayah dapat bertindak sebagai subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. Untuk memahami hubungan antara penduduk dengan lingkungan dapat diawali dari pertumbuhan penduduk, karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk resiko kerusakan lingkungan semakin besar, hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk, karena pada dasarnya manusia selalu memanfaatkan SDA. Dampak terhadap lingkungan bisa positif, dan negatif, namun faktanya dampak negatif lebih dominan karena pemanfaatan SDA cenderung tidak bijaksana sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui partisipasi semua pihak. Secara umum pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya), yang mempunyai prinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa yang akan datang (Brundtland, 1987). Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara-negara di dunia. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut setiap negara perlu melakukan perbaikan terhadap kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Secara umum, masalah lingkungan sering dikaitkan dengan proses pembangunan dan oleh karena itu dapat berdampak pada tingkat lokal, regional, maupun global. Beberapa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia ini telah menghancurkan konsekuensi terhadap lingkungan dan sangat berbahaya bagi manusia, hewan dan tumbuhan dan dapat diteruskan ke generasi mendatang (Chi, 1998; Kjellstrom & Mercado, 2008). Dalam menghadapi resesi ekonomi global, degradasi lingkungan merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan (Anbumozhi & Bauer, 2010).

Banyak laporan United Nations tentang pembangunan berkelanjutan, yang terakhir adalah laporan United Nations (2010), yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian individu lain, menganggap konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.



Gambar 3.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Stevens (2005)

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (Gambar 2). Sejalan dengan itu, dalam laporan United Nations (2010) menyebutkan ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual (Hedlund-de Witt, 2014; Ruttenberg, 2013). Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Secara konsep, pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan adalah konsep yang berbeda. Terdapat dua kriteria utama pembangunan berkelanjutan, (i) keberlanjutan yang lemah (*Weak*

Sustainability); (ii) keberlanjutan yang kuat (*Strong Sustainability*), kriteria tersebut merupakan ide dalam ekonomi yang dipelopori oleh Solow (1986) dan Hartwick (1977). Keberlanjutan yang lemah (*Weak Sustainability*) merupakan ide dalam ekonomi lingkungan, yang mengasumsikan bahwa modal manusia (*human capital*) dapat menggantikan modal alam (*natural capital*). Sedangkan istilah keberlanjutan yang kuat (*Strong Sustainability*) mengasumsikan bahwa modal manusia (*human capital*) dan modal alam (*natural capital*) saling melengkapi, namun tidak dapat dipertukarkan. Dalam literatur ekonomi, kriteria pendekatan keberlanjutan yang lemah juga digunakan dalam studinya Amsalu *et al.* (2014) mengamati sumber daya yang langka dengan menggunakan alternatif.

Pemahaman terhadap elemen pembangunan berkelanjutan dapat dimasukkan sebagai input produktif. Input produktif inilah yang dapat digunakan dalam proses produksi, yang nantinya mendorong ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan dan secara luas input tersebut dapat dikategorikan sebagai; (i) tanah (semua sumber daya alam atau modal); (ii) tenaga kerja (energi, jam kerja, aspek modal manusia), dan (iii) modal (modal kerja dan nyata, modal keuangan, modal produksi, dan lain-lain.)

Menurut Seidler & Bawa (2010) sebagian besar ekonom neoklasik melihat hal tersebut, terutama yang mengadopsi fungsi produksi Cobb-Douglas yang terkenal pada tahun 1928, di mana dalam pemahamannya menganggap ada faktor substitusi dalam fungsi produksi (Felipe & Adams, 2005). Keterkaitan elemen pembangunan berkelanjutan ini dijelaskan kembali oleh Stevens (2005) seperti yang

disajikan pada Gambar 2, uraian elemen tersebut disajikan seperti berikut ini:

- (1) Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap lingkungan (misalnya penggunaan sumber daya dan emisi CO₂).
- (2) Jasa lingkungan untuk ekonomi (misalnya, sumber daya alam, kontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan lapangan kerja).
- (3) Layanan lingkungan kepada masyarakat (misalnya, akses terhadap sumber daya dan fasilitas, kontribusi terhadap kondisi kesehatan, kehidupan dan kondisi kerja).
- (4) Pengaruh variabel sosial terhadap lingkungan (misalnya, perubahan demografis, pola konsumsi, pendidikan lingkungan dan informasi, kerangka kelembagaan dan hukum).
- (5) Pengaruh variabel sosial terhadap ekonomi (misalnya, angkatan kerja, populasi dan struktur rumah tangga, pendidikan dan pelatihan, tingkat konsumsi, kerangka kelembagaan dan hukum).
- (6) Dampak aktivitas ekonomi terhadap masyarakat (misalnya, tingkat pendapatan, ekuitas, pekerjaan).

Berdasarkan pemahaman tersebut, terlihat bahwa peran modal manusia bersifat sakral bahkan bagi ekosistem untuk bertahan hidup, menghasilkan output ekonomi, dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dari pilar dan interaksi mereka seperti yang diamati sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi apapun.

Di sisi lain, terdapat juga istilah pembangunan hijau (*green development*), ini berbeda dengan pembangunan berkelanjutan, di

mana pembangunan hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya (Hu, 2017; Kasztelan, 2017). Pendukung pembangunan berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh di mana pemikiran mutakhir dari pembangunan hijau sulit diwujudkan.

Studi yang dilakukan oleh Basiago (1999) melihat adanya tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan, hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi pihak swasta (*private firms*) untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Di lain pihak, menurut Elliott (2006) dan Sexton *et al.* (2008) pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, di mana pandangan yang luas berada di bawah naungannya, konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekologi secara mendalam. Konsep yang berbeda juga menunjukkan adanya tarik ulur yang kuat antara ekonomi lingkungan dan antropologi. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya (Elliott, 2006; Sexton *et al.*, 2008). Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang dipahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan matrik dan indikator keberlanjutan.

Selain itu, populasi merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran populasi sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan.

Jumlah populasi yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah dapat memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen-komponen penduduk yang berkualitas, karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan (Seidler & Bawa, 2010). Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

4. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Strategi dan kebijakan dalam mengejar pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan lingkungan ini sebenarnya masih relatif banyak. Berjalannya kebijakan secara baik tergantung dari inisiatif dan inovasi dari pembuat kebijakan yang mengarahkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, hal tersebut dapat berjalan baik melalui koordinasi antar pihak terkait dan meninjau secara rutin saat kebijakan pembangunan di implementasikan. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat menyeimbangkan keberadaan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Menurut Olson (1983) menjelaskan bahwa yang menjadi alasan dasar dari pembangunan berkelanjutan antara lain:

- (1) Persoalan lingkungan merupakan hal yang saling terkait satu sama lain;
- (2) Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan merupakan dua hal pokok yang saling berkaitan. Proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan mengawali integrasi yang terjadi antara lingkungan dan ekonomi;
- (3) Pentingnya kerjasama dan komunikasi internasional diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi, polusi, dan ekosistem yang tidak mempedulikan batas-batas negara;
- (4) Masalah ekonomi dan lingkungan juga berhubungan dengan faktor sosial dan politik.

Kebijakan pembangunan harus mengidentifikasi prioritas, hambatan, dan hambatan untuk melawan degradasi dan jika mungkin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tersebut. Menurut Salim (2010) konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penjelasan Salim (2010) yang menegaskan bahwa terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yakni:

- (1) Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa.

- (2) Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.
- (3) Mengedepankan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
- (4) Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.

Kebijakan perencanaan pembangunan yang baik perlu mengedepankan aspek lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, karena untuk mewujudkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperlukan beberapa hal yang harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan antara lain:

- (1) Kebijakan perencanaan pembangunan dengan prinsip mencapai keseimbangan dinamis antara pemenuhan kebutuhan dan kelestarian lingkungan;
- (2) Memperhatikan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan, dengan menekan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya;
- (3) Eksploitasi sumber daya alam didasarkan pada prinsip keberlanjutan atau kelestarian lingkungan;
- (4) Mendorong kebijakan politik lingkungan yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang;
- (5) Memperhatikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2010). Globalization, Poverty and Environmental Degradation: Sustainable Development in Pakistan. *Journal of Sustainable Development*, 3(3), 103–114. <https://doi.org/10.5539/jsd.v3n3p103>
- Amsalu, D. W., Jacobsen, J. B., & Lundhede, T. H. (2014). Economic assessment of use values of near-natural forestry compared with rotational forestry in Denmark. *European Journal of Forest Research*, 133(4), 611–622. <https://doi.org/10.1007/s10342-014-0789-3>
- Anbumozhi, V., & Bauer, A. (2010). Impact of Global Recession on Sustainable Development and Poverty Linkages. In *Working Paper* (Issue 227, pp. 1–21). ADB Institute.
- Andreoni, J., & Levinson, A. (2001). The simple analytics of the environmental Kuznets curve. *Journal of Public Economics*, 80(2), 269–286. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(00\)00110-9](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00110-9)
- Basiago, A. D. (1999). Economic, Social, and Environmental Sustainability in Development Theory and Urban Planning Practice. *The Environmentalist*, 19, 145–161. <https://doi.org/10.1023/A:1006697118620>
- Brundtland, G. H. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. In *Report of United Nations*. United Nations. <https://doi.org/10.2307/2621529>
- Chi, A. (1998). Human interference and environmental instability :

- addressing the environmental consequences of rapid urban growth in. *Environment and Urbanization*, 10(2), 161–174. <https://doi.org/10.1630/095624798101284527>
- Eidelwein, F., Cisco, D., Henrique, L., Pacheco, D., & Sartori, F. (2018). Internalization of environmental externalities: Development of a method for elaborating the statement of economic and environmental results. *Journal of Cleaner Production*, 170, 1316–1327. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.208>
- Elliott, J. A. (2006). An introduction to sustainable development: The developing world. In J. A. Elliott (Ed.), *Routledge Taylor & Francis Group* (3rd Editio). Routledge Taylor & Francis Group. [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(96\)90049-2](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(96)90049-2)
- Felipe, J., & Adams, G. F. (2005). A Theory of Production. The estimation of the Cobb-Douglas function: a retrospective view. *Eastern Economic Journal*, 31(3), 427–445. <https://doi.org/->
- Guo, L., & Ma, H. (2008). Conflict between Developing Economic and Protecting Environment. *Journal of Sustainable Development*, 1(3), 91–97.
- Hartwick, J. M. (1977). Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources. *American Economic Review*, 67(5), 972–974. <https://doi.org/10.2307/1828079>
- Hedlund-de Witt, A. (2014). Rethinking sustainable development: Considering how different worldviews envision “development” and “quality of life.” *Sustainability (Switzerland)*, 6(11), 8310–8328. <https://doi.org/10.3390/su6118310>

- Hu, A. (2017). China: Innovative green development. *China: Innovative Green Development*, VIII(239), 15–56. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-54962-5>
- Kasztelan, A. (2017). Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse. *Prague Economic Papers*, 26(4), 487–499. <https://doi.org/https://doi.org/10.18267/j.pep.626>
- Kjellstrom, T., & Mercado, S. (2008). Towards action on social determinants for health equity in urban settings. *Environment and Urbanization*, 20(2), 551–574. <https://doi.org/10.1177/0956247808096128>
- Mason, R., & Swanson, T. (2002). The costs of uncoordinated regulation. *European Economic Review*, 46(1), 143–167. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00087-3](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00087-3)
- Misra, A. K. (2014). Climate change and challenges of water and food security. *International Journal of Sustainable Built Environment*, 3(1), 153–165. <https://doi.org/10.1016/j.ijlsbe.2014.04.006>
- Olson, R. K. (1983). Resources, environment and population. The Global Tomorrow Coalition Conference. *Mazingira*, 7(3), 46–53.
- Panayotou, T. (2003). Economic Growth and the Environment. In *Economic Survey of Europe* (pp. 45–72). [https://doi.org/10.1016/S1574-0099\(05\)03023-8](https://doi.org/10.1016/S1574-0099(05)03023-8)
- Patz, J. A., Githeko, A. K., McCarty, J. P., Hussein, S., Confalonieri, U., & De Wet, N. (2003). Climate change and infectious diseases. In A. J. McMichael, D. H. Campbell-Lendrum, C. F. Corvalán, K. L. Ebi, A. K. Githeko, J. D. Scheraga, & A.

- Woodward (Eds.), *Climate Change and Human Health: Risks and Responses* (pp. 103–127). World Health Organization. <https://doi.org/10.2307/2137486>
- Pindyck, R. S. (2013). Climate Change Policy: What Do the Models Tell Us? *NBER Working Paper Series*, 51(3), 1–23. <https://doi.org/10.1257/jel.51.3.860>
- Rees, J. (1990). *Natural Resources: Allocation, Economics and Policy* (2nd ed.). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Ruttenberg, T. (2013). Wellbeing Economics and Buen Vivir: Development Alternatives for Inclusive Human Security. *PRAXIS The Fletcher Journal of Human Security*, 28(2013), 68–93.
- Salim, E. (2010). Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. In I. J. Azis, L. M. Napitupulu, A. A. Patunru, & B. P. Resosudarmo (Eds.), *Pembangunan Berkelanjutan* (1st ed., pp. 978–979). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Seidler, R., & Bawa, K. S. (2010). Dimensions of sustainable development. In K. S. Bawa & R. Seidler (Eds.), *Encyclopedia of Life Support Systems* (1st ed.). EOLSS Publications.
- Sexton, M., Barrett, P., & Lu, S.-L. (2008). The evolution of sustainable development. In *The Routledge Handbook of Tourism and the Environment* (pp. 185–207). University of Salford.
- Solow, R. M. (1986). On the intergenerational allocation of exhaustible resources. *The Scandinavian Journal of Economics*, 88(1), 141–149.
- Sorrell, S. (2010). Energy, economic growth and environmental

sustainability: Five propositions. *Sustainability*, 2(6), 1784–1809.
<https://doi.org/10.3390/su2061784>

Stevens, C. (2005). Statistics Brief: Measuring Sustainable Development. In C. Aspden, B. Arnaud, E. Capponi, & J. Dupont (Eds.), *Organisation for Economic Cooperation and Development* (Issue 10). OECD Publishing.

Implementation of Agenda 21: Resolution adopted by the General Assembly, Pub. L. No. A/RES/64/236, United Nations Report 1 (2010).

United Nations. (2015). *General Assembly of the United Nations. Sustainable Development*. New York: United Nations.

BAB IV

UPAH PEKERJA: DETERMINAN DAN STRUKTUR

Oleh:

Yunisvita

1. Pendahuluan

Salah satu kegunaan dari ekonomi sumber daya manusia adalah untuk menilai bagaimana relevansi, signifikansi dan berbagai alasan ketika pekerja memperoleh upah yang berbeda. Misalkan Hamid memperoleh upah lebih rendah dari Aminah. Bisa jadi terdapat beberapa hal yang dianggap menjadi sebab yang memungkinkan hal itu terjadi. Aminah menempuh pendidikan lebih lama atau mempunyai ijazah dari sekolah yang prestisius. Aminah bekerja dimana permintaan atas jenis pekerjaannya sangat tinggi dan memiliki tanggung jawab yang berat. Aminah umurnya lebih tua atau sudah bekerja di perusahaannya tersebut lebih lama. Dia juga lebih tinggi motivasinya dan lebih efisien dalam bekerja. Hamid bekerja di wilayah yang mana upah rata-ratanya lebih rendah dan lain sebagainya.

Pada level teoritis, kita harus membuat spesifikasi dimana hipotesisnya digunakan untuk memutuskan setiap penjelasan yang diberikan atas perbedaan upah tersebut. Kerangka referensi yang diadopsi dalam analisis ekonomi adalah model persaingan sempurna. Ketika diaplikasikan dalam ekonomi sumber daya manusia, ia menjelaskan formasi upah melalui asumsi bahwa mereka mencocokkan seluruh penawaran pekerja dengan permintaan pekerja. Hipotesis yang

ada menyatakan bahwa tidak ada kekuatan pasar karena bebas masuk ke dalam pasar dan informasi adalah sempurna. Kerangka ini membawa pada kesimpulan positif tentang penentuan kompensasi untuk pekerja bahwa studi empiris menawarkan pada kita untuk setuju atau menolaknya. Jika kesimpulannya secara masif menolak, maka kita membutuhkan kerangka teoritis dimana persaingan adalah tidak sempurna.

Hipotesis persaingan sempurna menghasilkan teori yang sangat kaya tentang penentuan upah, dengan sejumlah implikasinya. Selama upah mencocokkan permintaan dan penawaran pekerja, mereka tergantung pada karakteristik pekerja dan karakteristik pekerjaan. Model persaingan sempurna membawa pada kesimpulan bahwa masing-masing pekerja mendapat upah yang sama dengan produktivitas marjinal pekerjaan. Produktivitas pekerjaan tergantung pada kemampuan pekerja dan atribut pekerjaan. Pendekatan ini menekankan bahwa pekerja dapat selalu mendapatkan pekerjaan jika mereka siap untuk menerima upah dan kondisi pekerjaan yang setara dengan kemampuannya, pada gilirannya hal ini mengimplikasikan bahwa pengangguran memilih untuk tidak bekerja karena mereka menilai pekerjaan yang ditawarkan tidak cukup menarik. Dengan kata lain, persaingan sempurna di pasar kerja membawa pada alokasi sumber daya yang efisien jika keputusan dari pihak- pihak ini tidak memerlukan eksternalitas. Dalam hubungan ini, kita akan melihat eksistensi norma sosial yang memerlukan eksternalitas, konsekuensinya adalah bahwa kesamaan upah dan produktivitas marjinal tidak memastikan alokasi sumber daya adalah optimal.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Determinasi Upah

Mekanisme determinasi upah terkait dengan tingkat upah dan distribusi pendapatan tenaga kerja dalam PDB, jadi itu adalah masalah penting bagi pemerintah dan perusahaan. Meskipun teori ekonomi neoklasik menekankan bahwa upah di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja dan oleh prinsip-prinsip maksimalisasi utilitas untuk individu dan maksimalisasi laba untuk perusahaan, jika tidak sesuai dengan tenaga kerja internal teori pasar dalam ekonomi kelembagaan, determinasi upah juga terkait dengan praktik internal perusahaan misalnya, sistem pembayaran dan pekerjaan di perusahaan (Ma, 2016).

Konsep upah telah dikembangkan dengan berbagai jenis teori. Pada konteks agregat, Keynes memperkenalkan upah sebagai salah satu ukuran kesejahteraan. Adam Smith mengemukakan bahwa kemakmuran bangsa-bangsa diperoleh ketika *full employment* tanpa campur tangan pemerintah. Ketika konsep upah ini dilihat secara mikro, menurut *life cycle income theory*, sejalan usia individu yang terus meningkat maka upah juga akan bertambah namun dengan pertambahan yang semakin menurun bahkan negatif.

Konsep lainnya menyebutkan bahwa upah adalah anggaran rumah tangga yang berasal dari waktu kerja dikalikan tarif upah ditambah dengan upah yang diterima di luar pekerjaan. Dengan demikian individu dapat memperoleh upah tidak selalu dari bekerja, namun upah yang pasti mudah diketahui adalah ketika pekerja menerima upah dari bekerja (Becker dalam Elfindri, 2014).

Secara sederhana upah adalah sejumlah pembayaran dari seseorang kepada orang lain atas jasa tertentu. Ekonom mendefinisikan upah sebagai harga beli dari tenaga kerja. Setelah beberapa tahun kemudian terdapat beberapa teori tentang apakah upah harus dibayarkan kepada pekerja. Pemikiran ini dimulai dari revolusi industri hingga masa yang lebih modern. Alasan dari beberapa teori ini didasarkan pada keadaan, masalah dan faktor yang berlaku pada saat itu.

Ada dua teori kunci yang menjelaskan mengapa upah adalah cara pekerja berada di suatu bidang pekerjaan tertentu. Pertama, Teori Penentuan Upah Tradisional; dan kedua adalah Teori Upah Negosiasi. Pada teori yang pertama, hukum penawaran dan permintaan menentukan upah. Hari kerja seorang programmer sangat pendek tetapi permintaannya sangat besar oleh karenanya mereka memperoleh upah yang lebih tinggi. Demikian juga dokter dan pengacara yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat sehingga memperoleh upah yang tinggi. Sedangkan pada teori kedua, Upah ditetapkan terutama sebagai hasil dari perundingan individu, perundingan bersama atau dengan peraturan publik atau Negara. Bagaimana upah ditentukan telah menjadi subjek dari beberapa teori upah. Elemen-elemen utama dalam teori-teori ini dapat dijelaskan berikut ini.

2.1.1 Teori Upah Subsisten

Teori upah subsisten dikenal juga dengan “Hukum Upah Besi”. Ini dinamakan oleh Ferdinand Lassale, seorang ekonom Jerman, pada

pertengahan abad sembilan belas. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh aliran Fisiokrat; Quesnay, dan kemudian dikembangkan oleh David Ricardo.

Menurut teori ini upah cenderung menjadi sama dengan tingkat subsisten. Hal ini akan memberikan pekerja hanya dengan kondisi yang paling sederhana. Jika upah meningkat di atas tingkat subsisten, ini membawa suatu kenaikan dalam populasi. Karena, naiknya kemakmuran akan menganjurkan orang untuk menikah dan meningkatkan populasi. Sehingga hal ini akan meningkatkan penawaran tenaga kerja. Naiknya persaingan di antara pekerja untuk bekerja menyebabkan upah turun lagi ke tingkat subsisten. Demikian juga jika upah turun di bawah tingkat subsisten, malnutrisi meningkatkan angka kematian. Orang-orang tidak tertarik untuk menikah, sehingga lebih sedikit anak-anak dilahirkan. Hal ini akan mengurangi penawaran tenaga kerja. Persaingan untuk bekerja menjadi berkurang dan upah cenderung naik ke tingkat subsisten. Akhirnya upah kembali ke tingkat subsisten. Itulah mengapa aliran ekonomi Fisiokrat menganggap teori upah ini sebagai hukum alami. Quesnay mengatakan: “Upah adalah tetap dan berkurang ke tingkat terendah melalui persaingan ekstrim diantara pekerja”.

Teori ini bagaimanapun mengabaikan kerja keras orang-orang. Selain itu, apa yang dipertimbangkan sebagai variasi tingkat subsisten dari waktu ke waktu dan satu tempat ke tempat lain, bersifat relatif dan aplikasinya tidak dapat diseragamkan. Tidak selalu benar bahwa kenaikan upah membawa pada kenaikan populasi dan penawaran tenaga kerja sebagai contoh di Negara maju pekerja dengan

pendapatan lebih tinggi diikuti dengan standar hidup yang lebih tinggi dan cenderung mempunyai anak lebih sedikit. Ini juga dirasakan di Negara-negara Afrika dimana orang dengan pendapatan lebih rendah cenderung punya anak lebih banyak. Teori ini hanya melihat dari satu sisi saja yaitu penawaran tenaga kerja dan mengabaikan permintaan tenaga kerja. Kenaikan dalam tingkat minimum yang paling sederhana dapat membawa kenaikan dalam tabungan dan investasi sehingga meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, kontras dengan teori ini. Kritik lainnya adalah bahwa teori ini tidak memperhitungkan pengaruh serikat perdagangan dalam penentuan upah.

2.1.2 Teori Dana Upah

Teori dana upah pertama kali dikenalkan dalam ilmu ekonomi oleh Adam Smith dan kemudian dikembangkan oleh J.S. Mill dalam bukunya "*Principles of Political Economy*" (1848). Mill memberikan definisi dari doktrin dana upah. Teori ini mencoba untuk menunjukkan bahwa upah yang berlaku pasti akan meningkat di atas tingkat subsisten. Menurut teori ini suatu dana modal harus diakumulasikan sebelum upah dapat dibagikan. Dana modal ini disebut dana upah di luar dari upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Dana ini selalu konstan dan upah ditentukan melalui pembagian dana ini dengan jumlah tenaga kerja. Dengan demikian, besarnya dana pada batas waktu tertentu membatasi jumlah total yang tersedia untuk upah. Besarnya dana ditentukan oleh akumulasi modal pada waktu yang lalu. Jadi, para majikan harus menaruh jumlah dana yang pasti untuk menjaga upah pekerja.

Berdasarkan teori ini upah tidaklah tetap, tetapi tergantung pada hubungan antara dana upah dan ukuran populasi. Suatu kenaikan dalam populasi menurunkan upah kecuali ini diiringi dengan kenaikan dalam akumulasi modal. Upah akan meningkat jika: (a) pertumbuhan populasi dibatasi; (b) Akumulasi modal diperluas.

Selama tabungan memerlukan waktu yang lama untuk meningkat, maka kenaikan dana upah lambat. Jadi, tenaga kerja harus mempunyai anak lebih sedikit untuk meningkatkan upah. Kemungkinan lain, upah dapat ditingkatkan melalui pengurangan profit. Tapi ini akan membawa pada penarikan kembali modal dari industri. Hal ini akan menyebabkan turunnya permintaan terhadap tenaga kerja. Konsekuensinya, upah akan turun ke tingkat semula. Sehingga, kenaikan upah adalah mungkin hanya melalui pengurangan jumlah pekerja.

Dana upah adalah kesanggupan perluasan atau pengetatan sepanjang waktu. Tapi, hanya pada saat tertentu jumlahnya tetap. Dengan demikian, jumlah total yang tersedia untuk pembayaran upah juga tetap. Formula tingkat upah menurut teori dana upah adalah:
Tingkat upah = Dana Upah / Jumlah Total Pekerja.

2.1.3 Teori Produktivitas Marjinal / Teori Upah Modern

Sebagai subjek dari analisisnya, teori ini mengasumsikan adanya persaingan sempurna, tidak ada kemajuan teknologi, tanpa ketidakpastian dan resiko. Dengan demikian sejumlah upah ditentukan oleh proses optimisasi produksi. Pada level mikroekonomi, perusahaan meminimumkan biaya produksi, juga menyetarakan

produktivitas marjinal fisik dari seluruh input. Oleh karena itu pula teori ini memunculkan proposisi bahwa tenaga kerja yang lebih produktif menerima upah yang lebih tinggi.

Menurut teori ini seorang pengusaha akan membayar upah pekerja dimana upah tersebut sama dengan penerimaan marjinal produk. Ketika pengusaha mempekerjakan seorang tenaga kerja, berapa banyak ia membayarnya tergantung pada tambahan yang pekerja sumbangkan pada penerimaan total perusahaan. Jika tambahan dari seorang tenaga kerja adalah Rp 1.000.000, tingkat upah sama dengan Rp 1.000.000, pengusaha tidak akan membayarnya lebih dari penghasilan yang disumbangkan tenaga kerja pada produksi total.

Tujuan perusahaan sudah diketahui bersama adalah memaksimalkan keuntungan. Jika produksi dari tenaga kerja lebih tinggi daripada jumlah yang dibayarkannya, maka employer akan mempekerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja. Sejalan dengan menggunakan lebih banyak tenaga kerja maka produksi neto akan mulai menurun. Ini bukan karena tenaga kerja yang ditambah bermutu lebih rendah dari sebelumnya tapi karena berlakunya hukum hasil yang semakin berkurang. Ketika produk neto dari tenaga kerja menjadi sama dengan yang dibayarkan untuknya, employer tidak melanjutkan menambah tenaga kerja. Tenaga kerja terakhir yang dianggapnya bermanfaat selama digunakan disebut unit marjinal. Tambahan neto atas penerimaan total perusahaan oleh tenaga kerja marjinal disebut produk neto marjinal. Tingkat upah yang dibayar kepada tenaga kerja sama dengan produk neto marjinal.

Para ekonom modern berpendapat bahwa sebagaimana harga komoditi ditentukan melalui interaksi yang dihadapi permintaan dan penawaran, maka tingkat upah juga dapat ditentukan dengan cara yang sama melalui analisis permintaan dan penawaran. Oleh karenanya teori ini disebut juga "*demand and supply of theory*".

a. Permintaan Tenaga kerja

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja (Kaufman and Hotchkiss, 2005). Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan berikut ini: Pertama, Permintaan tenaga kerja adalah *Derived Demand*. Permintaan tenaga kerja bukan permintaan langsung. Ia diturunkan dari permintaan terhadap barang dan jasa. Jika permintaan barang di pasar adalah tinggi, maka permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang tersebut juga akan tinggi. Dalam kasus permintaan terhadap komoditi adalah sedikit maka permintaan terhadap tenaga kerja juga akan rendah. Kedua, Elastisitas permintaan terhadap barang. Jika permintaan terhadap barang adalah inelastis, maka permintaan terhadap tenaga kerja yang menghasilkan barang tersebut juga akan inelastis. Permintaan tenaga kerja akan elastis jika substitusi dari barang itu tersedia dengan harga lebih murah di pasar, atau permintaan terhadap barang yang diproduksinya elastis. Ketiga, Proporsi biaya tenaga kerja terhadap biaya total. Jika upah pekerja hanya proporsi kecil dalam biaya total dari barang tersebut, maka kemudian permintaan tenaga kerja cenderung menjadi inelastis. Pada industri yang padat modal, diremehkan saja kenaikan dalam upah pekerja yang hanya berdampak kecil terhadap biaya

produksi. Sehingga kenaikan upah tidak akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Keempat, Ketersediaan pengganti tenaga kerja. Jika pengganti tenaga kerja yang menghasilkan produk tertentu adalah mudah didapat di pasar, maka permintaan tenaga kerja akan menjadi elastis.

b. Penawaran Tenaga kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan angkatan kerja di pasar faktor. Untuk seluruh perekonomian hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah tingkat upah, jumlah populasi, komposisi umur, ketersediaan pendidikan dan pelatihan, periode lamanya pelatihan, ketentuan dari kesempatan wanita untuk bekerja, program jaminan sosial dan lain-lain.

Pada suatu industri penawaran tenaga kerja kurang elastis dalam jangka pendek. Penawaran tenaga kerja disini tergantung pada ketersediaan pekerja di lokasi dan area terdekat serta kemauan pekerja untuk bekerja lembur. Dalam jangka panjang, penawaran tenaga kerja industri lebih elastis. Tenaga kerja dapat ditarik melalui tawaran upah yang lebih tinggi, penyediaan fasilitas pelatihan, membuat kondisi bekerja yang nyaman, dan lain-lain. Jadi, penawaran tenaga kerja bagi industri adalah berbentuk menaik ke atas dari kiri ke kanan.

2.1.4 Teori Keunggulan Komparatif

Meskipun teori keunggulan komparatif adalah umum dalam teori perdagangan internasional, teori ini telah digunakan dalam ekonomi tenaga kerja sejak Roy (1951), dan Champemowne, D. G. (1953).

Berbeda dengan teori produktivitas marjinal, teori ini mengasumsikan tenaga kerja yang heterogen dalam hal kemampuan dan keberadaan berbagai pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Koeksistensi dua situasi ini, seperti yang dipelajari oleh Champemowne, dapat menghasilkan distribusi pembayaran upah yang miring. Dengan kata lain, sejumlah kecil pekerja dapat menerima tingkat upah yang relatif tinggi, sementara jumlah yang lebih besar menerima tingkat upah yang relatif rendah. Masalah ini telah diselidiki oleh banyak peneliti. Dalam makalah mereka, Heckman dan Sedlacek (1985), dengan model Roy yang dimodifikasi, memperkirakan pentingnya bias agregasi dalam tingkat upah riil agregat yang terukur dan mengevaluasi kontribusi seleksi mandiri terhadap ketidaksetaraan dalam tingkat upah kayu gelondongan. Mereka menemukan bahwa *self selection* mengurangi ketimpangan upah agregat hingga lebih dari 10 persen di pasar tenaga kerja AS. Teulings (1995) menemukan hasil yang konsisten dengan teori ini untuk ekonomi Belanda. Dia menyatakan bahwa perbedaan upah terutama disebabkan oleh perbedaan keterampilan di ekor kiri distribusi dan perbedaan antara pekerjaan di ekor kanan.

2.1.5 Teori Perbedaan Kompensasi (*Compensation Wage Differentials*)

Teori ini didasarkan pada karakteristik pekerjaan yang tidak menguntungkan, tidak diinginkan, dan tidak menyenangkan. Meskipun teorinya berabad-abad yang lalu, pengujian statistik harus menunggu sampai teknologi untuk pengumpulan dan perhitungan data

meningkat, pertama kali dimodelkan oleh Friedman dan Kuznets (1954). Rosen (1986) banyak membahas teori ini. Beberapa pekerjaan sulit dilakukan secara fisik, berbahaya, kotor, berisik, atau di lingkungan yang sangat dingin atau panas. Karena "teori ini menganggap kasus di mana selera dan kepuasan pekerja berbeda" (Tachibanaki, 1996), sedikit pekerja yang menganggap kondisi kerja yang tidak menyenangkan ini menarik. Mereka yang bekerja di pekerjaan yang dievaluasi negatif ini kemungkinan akan dikompensasi dengan upah yang lebih tinggi; jika tidak, mungkin sulit bagi pemberi kerja untuk menarik pekerja. Karena rasanya berbeda, perbedaan upah yang kecil biasanya cukup untuk menarik pekerja ke pekerjaan. Harga yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk membujuk pekerja agar tahan dengan kondisi mengambil bentuk upah premi. Premium ini melakukan fungsi yang berguna dalam mengalokasikan sumber daya tenaga kerja untuk tugas-tugas yang produktif, namun tidak diinginkan. Seperti yang dinyatakan Rosen (1986) bahwa upah aktual yang dibayarkan adalah jumlah dari dua transaksi yang berbeda secara konseptual, satu untuk layanan tenaga kerja dan karakteristik pekerja, dan satu lagi untuk atribut pekerjaan.

2.1.5.1 Kondisi Kerja yang Berat: Risiko Kecelakaan Kerja atau Kematian

Tidak mengherankan, risiko terluka atau sekarat di tempat kerja memiliki efek negatif pada supply tenaga kerja. Laju kerja, kemungkinan cedera dan kematian, dan ketidaknyamanan tugas merupakan elemen yang relevan dari fungsi supply tenaga kerja.

Tingkat upah mewujudkan harga tersirat yang ditentukan oleh karakteristik pekerjaan ini - harga yang disebut sebagai perbedaan upah kompensasi. Dalam teori neoklasik, telah diperdebatkan bahwa pasar akan memberikan kompensasi kepada pekerja di pekerjaan berbahaya dengan upah lebih tinggi daripada yang mereka terima di pekerjaan yang aman. Beberapa asumsi digarisbawahi (Leigh, 1989): (1) pekerja dengan keterampilan yang sama akan mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja yang sama; (2) pekerja lebih suka upah yang lebih tinggi daripada upah yang lebih rendah; (3) pekerja menghindari risiko; (4) perusahaan menawarkan berbagai kombinasi upah dan risiko; (5) pekerja memiliki mobilitas atau opsi keluar; (6) pekerja memiliki informasi yang cukup tentang pekerjaan mana yang berbahaya atau aman; (7) pekerja itu rasional. Berdasarkan asumsi-asumsi ini, tingkat upah baru akan ditentukan dengan memasukkan bagian implisit yang relevan dengan kondisi kerja yang memberatkan. Hubungan antara upah dan kondisi ini telah menjadi subjek banyak makalah ekonomi dan psikologis. Risiko yang umumnya dipertimbangkan dalam analisis ekonomi adalah merokok, kanker, kecelakaan kendaraan bermotor (Jones-Lee, 1976; Viscusi, Magat, dan Huber, 1987), kecelakaan rumah, keracunan (Viscusi, Magat, dan Huber, 1987), kebakaran, kecelakaan penerbangan (Jones-Lee, 1976). Meskipun studi empiris telah membuktikan hubungan positif antara risiko kematian dan tingkat upah, Leigh (1989) berpendapat bahwa pasar tenaga kerja tidak menghasilkan kompensasi upah untuk pekerjaan berbahaya.

2.1.5.2 Komposisi Paket Gaji: Liburan, Pensiun, dan Manfaat Lainnya
Kompensasi terdiri dari upah atau gaji dan tunjangan. Manfaat berupa pensiun, asuransi kesehatan, liburan dan liburan dibayar, dan manfaat serupa lainnya. Tunjangan sangat bervariasi bahkan di antara pengusaha yang mempekerjakan pekerja yang sama dan membayar tingkat upah yang sama. Meskipun upah uang yang dibayarkan kepada pekerja mungkin sama untuk majikan, beberapa majikan membayar tunjangan selain upah. Sebenarnya pekerja lebih suka pekerjaan yang membayar manfaat. Untuk menarik jumlah atau kualitas tenaga kerja tertentu, pengusaha yang tidak membayar tunjangan atau melakukan pembayaran tunjangan kurang dari upah pengusaha lain harus memberi kompensasi kepada pekerja atas selisihnya. Karena pengusaha menganggap "satu juta rupiah sebagai satu juta rupiah," maka mereka peduli tentang kompensasi total karena memengaruhi total biaya produksi dan keuntungan. Ada beberapa alasan mengapa majikan harus membelanjakan satu satuan mata uang untuk tunjangan daripada upah. Salah satu alasan paling penting adalah bahwa uang yang dimasukkan ke dalam pensiun dan layanan kesehatan tidak dikenakan pajak (Woodbury dan Huang, 1991). Kemungkinan lain adalah bahwa tunjangan dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan dapat menautkan pekerja ke perusahaan, yang mengurangi biaya pemulihan. Argumen semacam itu menyatakan hubungan terbalik antara tingkat upah dan biaya manfaat bagi pemberi kerja.

2.1.5.3 Lokasi Pekerjaan: Perbedaan Upah Regional yang Terkait dengan Iklim, Kejahatan, Polusi, dan Keramaian

Lokasi adalah sumber perbedaan upah yang lain. Daerah yang sangat panas atau dingin, memiliki tingkat kejahatan yang tinggi atau masalah polusi, berada di daerah pedesaan, atau ramai mungkin menarik pasokan pekerja yang lebih kecil dalam pekerjaan tertentu daripada daerah yang tidak memiliki masalah ini. Preferensi pekerja untuk fasilitas lokal dibandingkan dengan ketidaksetujuan lokasi menciptakan perbedaan upah. Karakteristik seperti tingkat kejahatan, polusi, angin, atau kurangnya sinar matahari dapat dipandang sebagai kekecewaan oleh sebagian besar pekerja. Jika pekerjaan itu terletak di daerah-daerah di mana kekecewaan sangat besar, majikan terpaksa membayar premi untuk menarik tenaga kerja yang dibutuhkan. Kompensasi karena ketidaksetujuan lokasi hanya mungkin terjadi jika relokasi pekerjaan tidak dimungkinkan. Universitas atau tambang, misalnya, tidak dapat dipindahkan. Migrasi antar daerah tidak dapat menghilangkan kebutuhan akan perbedaan upah, karena perpindahan tenaga kerja tidak dapat mempengaruhi karakteristik daerah. Gleen, Berger, dan Hoehn (1988) menunjukkan bahwa rata-rata, pekerja bersedia membayar untuk hidup dan bekerja di lingkungan yang kurang tercemar. Dia juga menyatakan bahwa lokasi-lokasi dengan sinar matahari lebih banyak dan visibilitas yang lebih baik menurunkan tingkat upah rata-rata masing-masing sebesar 7 persen dan 1 persen. Kelembaban, kecepatan angin, kejahatan, dan situs Superflind yang terletak di county meningkatkan upah rata-rata masing-masing sebesar 7 persen, 14 persen, 6 persen, dan 16 persen.

Selain yang telah dijelaskan, teori-teori ini juga berhubungan dengan keamanan kerja, prospek kenaikan upah; pelatihan di tempat kerja dan persyaratan sekolah; dan tingkat kontrol atas langkah kerja.

2.1.6 Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori modal manusia adalah teori penentuan upah atau penilaian yang paling populer dan berpengaruh. Meskipun berakar pada karya-karya Adam Smith, Gary Becker di bagian akhir abad ini membentuknya dengan cara yang lebih canggih. Tidak hanya upah, tetapi juga aspek ekonomi tenaga kerja lainnya seperti pekerjaan dan mobilitas tenaga kerja tunduk pada teori ini. Ini menunjukkan bahwa modal manusia, baik pendidikan formal maupun pelatihan kerja, berperan besar dalam perbedaan upah. Pekerja yang menerima lebih banyak pendidikan formal dapat menerima upah yang lebih tinggi. Ada dua aspek dasar dari teori modal manusia: investasi dalam modal manusia (*Investment in Human Capital*) dan pelatihan di tempat kerja (*On-The-Job Training*).

2.1.6.1 *Investment in Human Capital*

Keputusan investasi pada dasarnya didasarkan pada perbandingan pengeluaran saat ini untuk investasi dan nilai sekarang dari kemungkinan masa depan dari itu. Subjek untuk investasi dapat menjadi objek fisik, serta manusia melalui pendidikan formal. Dengan berinvestasi di sumber daya manusia, diharapkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dan karenanya penilaian di masa depan akan ditingkatkan. Semakin banyak sekolah meningkatkan penilaian karena

pengusaha percaya seseorang dengan lebih banyak sekolah lebih produktif dan bahwa karyawan dengan lebih banyak pendidikan dapat dilatih dengan lebih mudah (Thurow, 1975). Setelah investasi dalam sumber daya manusia dianggap sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, alat ini berfungsi sebagai alat penyortir, yang membantu perusahaan menentukan pekerja mana yang akan lebih produktif dalam pekerjaan. Arah ini dalam teori modal manusia yang disebut model pensinyalan dikembangkan oleh Spence (1973) dan terutama menekankan informasi yang tidak pasti yang dimiliki pengusaha tentang karyawan potensial.

2.1.6.2 *On-The-Job Training*

Beberapa keterampilan yang dapat dipasarkan dapat diperoleh melalui pelatihan di tempat kerja. Pelatihan semacam itu dapat bersifat formal dan informal. Pelatihan formal terdiri dari program pelatihan dan program magang. Namun, pelatihan sambil bekerja seringkali sangat informal. Pelatihan informal berasal terutama dari kegiatan sehari-hari seperti mengamati pekerja terampil atau berpengalaman, percakapan antara pekerja, atau penggantian sementara untuk istirahat. Karena itu, sulit untuk mendeteksi dan mengukurnya. Tapi tetap saja, seperti pendidikan formal, itu tergantung pada biaya dan manfaat. Keputusan diperlukan untuk dibuat melalui nilai sekarang dan kerangka tingkat pengembalian internal.

2.1.7 Teori Kesesuaian Pekerjaan (*Job-Matching Theory*)

Teori kesesuaian pekerjaan (*Job-Matching Theory*) secara resmi dikembangkan oleh Jovanovic (1979). Teori ini berpendapat bahwa ada korelasi positif antara upah dan masa kerja dan hubungan negatif antara upah dan turnover. Karena pekerja berbeda dalam kesesuaiannya dengan perusahaan yang berbeda, hanya pekerja yang cocok dengan pekerjaan yang terus dipekerjakan atau menerima upah yang lebih tinggi. Jika pekerja dan pekerjaan tidak cocok dengan baik, pekerja itu akan menganggur (baik secara sukarela atau tidak sukarela) atau menerima upah yang lebih rendah. Liu (1986) menyatakan bahwa pencocokan pekerjaan muncul sebagai akibat dari informasi yang tidak lengkap dan heterogenitas di pasar tenaga kerja. Telah diperdebatkan bahwa suatu perusahaan menawarkan upah yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya masa kerja, di atas atau di atas upah pasar. Seperti yang dapat diperhatikan dari argumen ini, ada kesamaan antara teori kesesuaian pekerjaan dan teori *human capital*. Namun, Tachibanaki (1996) mengklaim bahwa teori kesesuaian pekerjaan tidak bertentangan dengan teori *human capital*. Dia menyatakan bahwa jalur pertumbuhan upah cenderung positif bagi karyawan yang tinggal dengan majikan saat ini, berdasarkan teori *human capital*, seperti suatu akumulasi modal manusia perusahaan spesifik. Di sisi lain, Garen (1988) berpendapat bahwa teori kesesuaian pekerjaan muncul sebagai alternatif untuk teori *human capital* berdasarkan hubungan upah-tenure dan upah-*turnover*.

2.1.8 *Wage Deferral / Deferred Compensation*

Teori ini muncul karena fitur mahal dari pemantauan kinerja pekerja. Seperti yang dikemukakan Alchian dan Demsetz (1972), jika produktivitas pekerja tidak tergantung satu sama lain dan output dari masing-masing pekerja mudah dipantau, sistem upah per satuan (pembayaran per potong) menginduksi tingkat usaha yang efisien oleh pekerja. Namun, output tidak dapat dimonitor dengan mudah jika proses produksi melibatkan "produksi tim." Maka output pekerja tidak dapat digunakan sebagai dasar hadiah atau pembayaran. Untuk menghindari kelalaian, satu kebijakan yang dapat diterapkan perusahaan adalah membayar upah yang lebih rendah untuk pekerja yang masa kerjanya relatif pendek dan upah yang lebih tinggi untuk pekerja yang masa kerjanya relatif lama. Dalam kasus pekerja yang lebih muda, sebagian dari pembayarannya ditangguhkan. Untuk bagian yang ditangguhkan, obligasi diterbitkan (Lazear, 1979). Pekerja kehilangan nilai ikatan jika dia diberhentikan karena melanggar ketentuan kontrak. Jika nilai kerugian ini cukup tinggi di setiap titik waktu, pekerja akan dihalangi untuk melalaikannya. Oleh karena itu, seorang pekerja akan dibayar kurang dari produk marjinalnya selama fase awal pekerjaannya, dan lebih banyak lagi nanti.

Seperti pembayaran dalam bentuk barang, skema kompensasi yang ditangguhkan bersifat membatasi tetapi menikmati keuntungan pajak melebihi pembayaran tunai saat ini. Di kasus pensiun, misalnya, pemberi kerja saat ini berkontribusi pada dana pensiun, tetapi karyawan tidak mendapatkan akses ke dana ini sampai mereka

pensiun. Namun, baik kontribusi dana pensiun dilakukan atas nama karyawan oleh pengusaha atau bunga yang bertambah ketika dana ini diinvestasikan adalah subjek pada pajak pendapatan pribadi. Hanya ketika manfaat pensiun diterima maka ex pekerja membayar pajak (Ehrenberg, Ronald G., & Smith, Robert S, 2012).

Kami mencirikan kontrak yang optimal dalam pengaturan di mana kepala sekolah mengamati sinyal informatif dari waktu ke waktu tentang tindakan satu kali agen. Jika keduanya merupakan kontrak netral-risiko, fitur-fitur yang relevan dari setiap proses sinyal dapat diwakili oleh proses keinformatifan deterministik yang meningkat dari waktu ke waktu. Durasi pembayaran memperdagangkan keuntungan dalam keinformatifan dengan biaya yang dihasilkan dari kebutuhan likuiditas agen. Durasi lebih pendek jika opsi di luar agen lebih tinggi, tetapi mungkin non-monotonik dalam tingkat upaya yang diterapkan. Kami mengevaluasi efek dari proposal regulasi yang mengamankan penangguhan pembayaran bonus dan penggunaan klausul clawback

2.1.9 Teori Upah Efisiensi

Perusahaan mungkin merasa tidak menguntungkan untuk memotong upah di hadapan pengangguran tidak sukarela. Ini dijelaskan oleh hubungan antara upah dan produktivitas, yang merupakan subjek untuk teori upah efisiensi. Menurut teori ini, produktivitas tenaga kerja adalah fungsi dari upah riil yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Teori ini mengusulkan bahwa semakin tinggi tingkat upah pemberi kerja, semakin tinggi tingkat upaya karyawannya. Ini

menyiratkan bahwa menaikkan tingkat upah pekerja memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas, karena pekerja melakukan upaya besar untuk menanggapi insentif tinggi yang diberikan oleh perusahaan. Karena laba terlibat, perusahaan dapat membahayakan produktivitas dengan memotong upah. Seperti Yellen (1984) menyatakan, teori upah efisiensi menjelaskan lima fenomena pasar tenaga kerja. Ini adalah: 1) Pengangguran tidak sukarela, 2) Kekakuan upah riil, 3) pasar ganda, 4) Adanya distribusi upah untuk pekerja yang homogen, 5) Diskriminasi di antara kelompok yang berbeda secara pengamatan. Yellen membahas empat dasar ekonomi mikro untuk teori upah efisiensi. Ini adalah model melalaikan, model turnover tenaga kerja, model seleksi yang merugikan, dan model sosiologis.

Teori neoklasik memperlakukan tenaga kerja sebagai input yang dipekerjakan dengan cara yang sama tetapi pekerja, tidak seperti modal, dapat memilih tingkat usaha dan pilihan tersebut memiliki efek penting ketika informasi tidak sempurna. Fitur utama dalam upah efisiensi: perusahaan secara sepihak menetapkan upah, dan memilih untuk tidak memotong upah ke tingkat kliring pasar, karena efek merugikan yang akan ditimbulkan pada upaya pekerja, motivasi, perekrutan, retensi, dan akhirnya pada keuntungan perusahaan.

Beberapa mekanisme pengupahan efisiensi telah dikemukakan dalam literatur:

- Upah yang lebih tinggi membantu mengurangi kelalaian ketika upaya tidak dilakukan dengan sempurna (Shapiro dan Stiglitz, 1984);

- Upah yang lebih tinggi meningkatkan semangat dan upaya pekerja (Akerlof, 1982);
- Upah yang lebih tinggi mengurangi pekerja berhenti dan biaya perputaran tenaga kerja (Salop, 1979);
- Upah yang lebih tinggi menarik lebih banyak pelamar dan meningkatkan perekrutan (Weiss, 1980).

2.2 Upah Pekerja

Struktur pengupahan adalah serangkaian harga yang ditentukan untuk keterampilan pasar kerja dan imbalan untuk pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Struktur pengupahan umumnya adalah tingkat atau hierarki pekerjaan dan kisaran upah. Ini dapat berarti cara upah total pekerja atau kelompok pekerja dikomposisikan; misalnya termasuk elemen seperti tarif dasar, bonus piecework dan bentuk bonus lainnya, lembur, dan lain-lain.

Studi tentang struktur upah sama tuanya dengan profesi ekonomi. Adam Smith memberikan analisis yang komprehensif dan elegan tentang faktor-faktor penentu perbedaan upah di antara individu dan pekerjaan. Smith menekankan bahwa perbedaan upah ditentukan oleh faktor kompetitif (kompensasi perbedaan untuk perbedaan dalam biaya pelatihan, probabilitas keberhasilan, kemantapan kerja, dan fasilitas tempat kerja lainnya), perbedaan kemampuan bawaan individu (yang ia rasa relatif tidak penting), dan kelembagaan (non-kompetitif), faktor-faktor yang timbul dari "hukum Eropa" yang mengatur upah, mobilitas tenaga kerja terbatas, dan memfasilitasi penciptaan hambatan untuk masuk. Smith mencatat

bahwa pergeseran permintaan lintas pekerjaan dan ruang dapat menghasilkan perbedaan upah sementara, tetapi respons supply yang sangat elastis akan cenderung menyamakan keuntungan dan kerugian dari lapangan kerja yang berbeda dalam jangka panjang tanpa adanya hambatan regulasi untuk masuk. Ketegangan yang ditemukan dalam analisis Smith antara peran faktor-faktor penawaran dan permintaan dan orang-orang dari kekuatan kelembagaan dalam mempengaruhi upah tetap sampai hari ini menjadi tema utama penelitian tentang struktur upah.

Revolusi modal manusia tahun 1960-an dan 1970-an dan meningkatnya ketersediaan dataset mikro besar dengan informasi pendapatan dan karakteristik individu menggeser penekanan pada perbedaan upah berdasarkan pendidikan dan usia (atau pengalaman potensial). Model modal manusia dari pendapatan siklus hidup yang timbul dari investasi pendidikan dan pelatihan di tempat kerja (Becker, 1993; Mincer, 1958) memberikan penjelasan yang koheren tentang fitur kualitatif yang relatif abadi dari struktur upah yang telah ditemukan di hampir setiap negara, penghasilan yang lebih tinggi untuk pekerja yang lebih berpendidikan dan profil pendapatan usia yang miring dan cekung. Tetapi dimensi kuantitatif struktur upah memang berbeda secara substansial dari waktu ke waktu (juga lintas negara dan bahkan wilayah). Tinbergen (1974) berspekulasi bahwa evolusi teknologi cenderung meningkatkan permintaan akan tenaga kerja yang lebih terdidik dan mencirikan evolusi struktur upah sebagai "ras antara pengembangan teknologi dan akses ke pendidikan.

Distribusi upah dapat didekomposisi menjadi perbedaan upah antar kelompok (biasanya ditentukan oleh kategori keterampilan atau demografi) dan dalam penyebaran upah kelompok (ketidaksetaraan upah residual). Pendekatan dasar menghubungkan perubahan upah dan pekerjaan relatif di antara kelompok-kelompok demografi dan keterampilan yang berbeda dengan perubahan kekuatan pasar penawaran dan permintaan dan ke lembaga pasar tenaga kerja (misal, Serikat pekerja dan upah minimum yang diamanatkan pemerintah). Pergerakan ketimpangan dalam kelompok juga dapat mencerminkan kekuatan pasar yang mengubah pengembalian atas keterampilan (yang tidak terukur) atau secara langsung dihasilkan dari perubahan lembaga penetapan upah yang dapat berfungsi untuk "membakukan" upah dalam pekerjaan dan lintas perusahaan dan / atau industri.

Penjelasan supply-demand-institusi (SDI) untuk perubahan struktur upah memiliki tiga bagian (Freeman dan Katz, 1994). Pertama adalah bahwa kelompok-kelompok demografi dan keterampilan yang berbeda dianggap sebagai pengganti yang tidak sempurna dalam produksi. Dengan demikian, pergeseran dalam penawaran dan permintaan akan keterampilan tenaga kerja dapat mengubah hasil upah dan pekerjaan. Sumber potensial penting dari pergeseran dalam permintaan relatif di antara kelompok-kelompok keterampilan termasuk perubahan teknologi yang bias keterampilan, perubahan tidak netral dalam harga input atau pasokan lainnya (misalnya, saling melengkapi keterampilan-modal), pergeseran pasar produk, dan kekuatan globalisasi (perdagangan dan outsourcing). Sumber dari pergeseran penawaran relatif termasuk variasi dalam

ukuran kohort, perubahan akses ke pendidikan dan insentif untuk investasi pendidikan, dan imigrasi.

Bagian kedua adalah bahwa permintaan yang mendasari dan guncangan penawaran mungkin memiliki efek yang berbeda pada upah relatif dan pekerjaan tergantung pada perbedaan dalam penetapan upah dan lembaga pasar tenaga kerja lainnya. Semakin kuat peran lembaga penetapan upah dan semakin lemah responsifnya institusi terhadap perubahan kekuatan pasar, semakin besar dampaknya pada pekerjaan dan bukan pada upah. Peraturan yang mengatur perekrutan dan pemberhentian serta perbedaan dalam lembaga pendidikan dan pelatihan juga dapat mempengaruhi bagaimana struktur upah menanggapi perubahan pasar.

Ketiga, perubahan kelembagaan itu sendiri, seperti deregulasi pasar produk dan perubahan dalam tingkat serikat pekerja atau tingkat sentralisasi perundingan bersama, juga dapat mengubah struktur upah. Masalah utama dalam menilai dampak kekuatan kelembagaan terhadap perubahan dalam struktur upah adalah menentukan sejauh mana perubahan institusional merupakan perkembangan "eksogen" (seperti perubahan dalam iklim politik) atau sebagian besar mencerminkan respons terhadap perubahan penawaran dan permintaan (Katz dan Autor, 1999).

2.2.1 Struktur Upah

Karena perempuan cenderung terkonsentrasi di bagian bawah distribusi upah, struktur upah laki-laki yang lebih padat mengurangi kesenjangan upah gender, seperti yang ditunjukkan oleh Blau dan

Kahn (2017). Salah satu contoh mencolok dari mekanisme ini diberikan oleh Blau dan Kahn (2011), yang membandingkan Swedia dan Amerika Serikat. Rasio pendapatan gender (d disesuaikan untuk jam) masing-masing adalah 77,3 persen dan 65,4 persen, dan peringkat rata-rata perempuan dalam distribusi upah laki-laki adalah 28,2 di Swedia dan 32,3 di Amerika Serikat; posisi perempuan yang kurang menguntungkan dalam hierarki upah di Swedia menghasilkan kesenjangan upah yang lebih rendah daripada di Amerika Serikat karena distribusi upah lebih terkompresi di Swedia. Kompresi struktur upah itu sendiri pada dasarnya tergantung pada perbedaan lembaga penetapan upah: pengaturan upah yang sangat tersentralisasi dan berserikat mengurangi penyebaran upah dan memiliki efek positif pada pekerja bergaji rendah, yang sebagian besar adalah perempuan; sama halnya, keberadaan upah minimum meningkatkan upah relatif perempuan dengan membatasi tingkat serendah mungkin (pada lembaga pasar tenaga kerja dan penyebaran upah (Salverda dan Checchi, 2014).

2.2.2 Peran Struktur Upah

Studi oleh Juhn et al. (1991) tentang tren kesenjangan upah ras dari waktu ke waktu di AS telah menyoro ti faktor tambahan, struktur upah keseluruhan, yang juga relevan untuk menganalisis kesenjangan upah gender. Struktur pengupahan adalah serangkaian harga yang ditentukan untuk keterampilan pasar kerja dan imbalan untuk pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Karena laki-laki dan perempuan cenderung memiliki tingkat kualifikasi pasar tenaga kerja yang

berbeda (terutama pengalaman kerja) dan dipekerjakan di berbagai pekerjaan dan industri, pengembalian keterampilan dan besarnya premi untuk pekerjaan di sektor-sektor yang didominasi laki-laki dapat berdampak pada kesenjangan upah gender. Semuanya sama, semakin besar pengembalian ke keterampilan seperti pengalaman dan semakin besar imbalan untuk pekerjaan di sebagian besar pekerjaan laki-laki dan industri, semakin besar akan kesenjangan gender (Blau, 2015).

Pada titik waktu dalam ekonomi tertentu akan ada distribusi tingkat upah (kompensasi total rata-rata per jam) di semua anggota populasi yang aktif secara ekonomi. Distribusi upah ini disebut sebagai struktur upah ekonomi. Nilai dari tingkat upah setiap anggota angkatan kerja akan bergantung secara sistematis pada serangkaian karakteristik yang dapat diamati dari orang tersebut serta pada karakteristik lain yang tidak diamati. Hubungan antara upah dan karakteristik pekerja serta distribusi karakteristik pekerja menentukan struktur upah suatu perekonomian. Upah rata-rata seseorang dengan karakteristik tertentu relatif terhadap upah seseorang dengan karakteristik berbeda (misalnya, upah pekerja di Jakarta relatif terhadap pekerja lain di Palembang), semua karakteristik yang diamati dan tidak teramati tetap konstan (*ceteris paribus*), disebut diferensial upah.

Keputusan struktur upah berkaitan dengan menentukan tingkat upah untuk pekerjaan, dan dalam beberapa kasus, pekerja. Ini menggabungkan pasar eksternal dengan nilai relatif yang dimiliki berbagai pekerjaan terhadap organisasi. Nilai organisasi dari suatu

pekerjaan ditentukan melalui evaluasi pekerjaan, yang pada gilirannya bergantung pada analisis pekerjaan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi. Nilai-nilai organisasi dan pasar pekerjaan diintegrasikan melalui pengembangan struktur upah, yang mendefinisikan tingkat atau tingkatan pekerjaan, dan menetapkan tingkat upah untuk nilai-nilai tersebut dengan mengacu pada harga pasar.

Struktur upah mewakili hubungan upah dari semua jenis. Analisis perbedaan upah dalam bentuk apa pun (geografis, industri, komunitas, atau pekerjaan) berkaitan dengan masalah struktur upah. Tetapi karena fokus utama kami adalah keputusan gaji dalam organisasi, perhatian kami adalah perbedaan gaji di antara pekerjaan. Bahkan, menentukan struktur gaji suatu organisasi dapat secara bermanfaat digambarkan sebagai meletakkan tanda dolar pada pekerjaan. Keputusan tentang hubungan upah di antara pekerjaan dalam suatu organisasi sebagian besar berada dalam kendali pengambil keputusan organisasi. Keputusan tingkat upah biasanya lebih dipengaruhi oleh kekuatan dari luar organisasi daripada keputusan struktur upah.

2.2.3 Penentuan Struktur Upah

Adam Smith menjelaskan perbedaan upah pekerjaan dalam hal: (1) kesulitan, (2) kesulitan mempelajari pekerjaan, (3) stabilitas pekerjaan, (4) tanggung jawab pekerjaan, dan (5) peluang untuk sukses atau gagal dalam pekerjaan. Ini adalah teori struktur upah. Tapi

standar nilainya sama-sama berguna dalam menjelaskan kompleksitas keputusan struktur upah.

Smith kemudian menjelaskan dua konsep nilai yang berbeda. (1) *Market Value*. Nilai pasar suatu barang adalah harga yang dibawanya ke pasar di mana permintaan dan penawaran sama. (2) *Use Value*. Nilai penggunaan adalah nilai yang diantisipasi oleh pembeli atau penjual perorangan melalui penggunaan barang. Nilai penggunaan jelas bervariasi di antara individu dan dari waktu ke waktu.

Dua konsep nilai ini dan konsep pasar tenaga kerja internal bergabung untuk menjelaskan perbedaan penting di antara pengusaha dalam keputusan struktur upah. Organisasi dengan pasar tenaga kerja internal yang relatif terbuka (organisasi di mana sebagian besar pekerjaan diisi dari luar) memanfaatkan banyak nilai pasar. Mereka juga menggunakan banyak survei upah dan gaji dalam keputusan struktur upah. Sebaliknya, organisasi dengan pasar tenaga kerja internal yang relatif tertutup (sebagian besar pekerjaan diisi dari dalam) menekankan nilai guna. Analisis mereka tentang nilai pekerjaan lebih bergantung pada persepsi anggota organisasi tentang nilai relatif pekerjaan yang diterima melalui evaluasi pekerjaan.

Beberapa faktor penentu struktur upah lain yang berasal dari analisis ekonomi dapat dicatat. Persyaratan pelatihan pekerjaan dalam hal panjang, kesulitan, dan apakah pelatihan diberikan oleh masyarakat, pengusaha, atau individu merupakan faktor utama dalam analisis modal manusia dan dengan demikian nilai pekerjaan. Interaksi persyaratan kemampuan dengan persyaratan pelatihan dapat

menghasilkan nilai pekerjaan yang berbeda tergantung pada kelangkaan kemampuan yang dibutuhkan dan jumlah orang yang mencoba membuatnya dalam pekerjaan dan gagal.

Selera dan preferensi karyawan adalah faktor ekonomi lainnya. Orang berbeda dalam pekerjaan yang mereka sukai dan tidak sukai. Dengan cara yang sama, pekerjaan memiliki banyak keuntungan dan kerugian non-moneter. Ekspektasi pekerja akan pendapatan masa depan sangat memengaruhi pilihan pekerjaan dan oleh karena itu pasokan tenaga kerja. Sayangnya, informasi pasar kerja jauh dari sempurna, dan respons terhadap kekurangan pasar tenaga kerja cenderung lebih cepat daripada respons terhadap kelebihan pasokan.

Industri yang bertentangan dengan kerajinan serikat pekerja juga telah ditunjukkan oleh analisis ekonomi untuk memengaruhi struktur upah. Serikat pekerja industri, dengan proporsi anggota semi-padat yang besar, cenderung mendukung peningkatan absolut. Meskipun organisasi besar di mana karyawan diwakili oleh serikat industri mungkin memiliki struktur upah yang sangat berbeda, mereka kurang memperhatikan perbedaan persentase daripada mereka di hadapan serikat pekerja.

Penentu ekonomi lain adalah diskriminasi. Meskipun perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin atau ras adalah melanggar hukum, mereka tetap ada. Sejauh mana perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan produktivitas atau mewakili diskriminasi adalah masalah struktur upah. pengembangan struktur upah adalah hasil dari sejumlah pengaruh. Faktor-faktor ini bervariasi dari faktor-faktor di mana manajemen memiliki kontrol yang besar terhadap faktor-faktor

di mana manajemen harus responsif. Mengingat beragamnya pengaruh, juga tidak mungkin organisasi akan selalu dapat mengembangkan struktur yang optimal dan bahwa struktur saat ini akan perlu beradaptasi di masa depan.

Sementara ekonomi pasar tenaga kerja adalah pertimbangan utama, itu bukan satu-satunya penentu untuk mempengaruhi desain struktur upah. Sebagian besar organisasi juga harus mempertimbangkan rasio biaya tenaga kerja, persaingan pasar produk, dan tuntutan serikat pekerja, ketika menentukan struktur upah mereka. Selain itu, banyak pasar tenaga kerja adalah abstraksi yang tidak cocok dengan pekerjaan organisasi atau kemampuan membayar upah.

2.3 Situasi Pengupahan Di Indonesia

Upah masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Keadaan pasar kerja yang dualistik dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah di satu sisi menyebabkan upah menjadi isu sentral dalam bidang ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan yang ada masih bertumpu pada upah minimum yang berlandaskan pada kebutuhan hidup layak buruh/pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun. Belum mencangkup mereka yang sudah bekerja di atas 1 (satu) tahun dan berkeluarga. Perundingan kolektif sebagai alat perjuangan SB/SP untuk meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh, perannya masih sangat terbatas; bahkan cenderung menurun kuantitas dan kualitasnya. Di sisi lain penerapan struktur skala upah masih sangat minim dan belum bersifat wajib (tidak ada sanksi formal bagi yang

belum menerapkannya). Sehingga praktis upah minimum menjadi upah efektif yang berlaku pada pasar kerja formal terutama sekali di sector industri padat karya.

2.3.1 Regulasi Pengupahan

Untuk memastikan upah yang layak bagi buruh di satu sisi dan terjaminnya kelangsungan usaha di sisi lain; DPR dan pemerintah membuat serangkaian regulasi yang mengatur sistem dan mekanisme pengupahan di pasar kerja. Regulasi pengupahan ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian besar, yaitu: (1) Regulasi terkait mekanisme penetapan upah; (2) Regulasi terkait perlindungan upah.

1. Mekanisme Penetapan Upah

Untuk memenuhi penghasilan yang layak bagi buruh/pekerja dan terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan, pemerintah menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme penetapan upah di pasar kerja. Regulasi terkait mekanisme penetapan upah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan sistematika sebagai berikut; a) Penetapan upah minimum di tingkat propinsi dan kabupaten/kota (Pasal 88); b) Penetapan upah melalui kesepakatan/perundingan kolektif (Pasal 91); c) Penerapan struktur dan skala upah (pasal 92 ayat 1); d) Peninjauan Upah Secara Berkala (Pasal 92 ayat 2).

(a) Upah Minimum

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1(satu) tahun. Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat propinsi atau di tingkat kabupaten/kotamadya, dimana Gubernur menetapkan besaran upah minimum propinsi (UMP) atau upah minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK), berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/Kota dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dsbnya.

Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahan merupakan hasil survey kebutuhan hidup seorang pekerja lajang yang diatur tersendiri dalam peraturan menteri tenaga kerja tentang Komponen kebutuhan hidup pekerja lajang, yaitu ketentuan yang terbaru kebutuhan hidup seorang pekerja lajang diatur dalam permenakertrans No, 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan 7 Kelompok dan 60 komponen kebutuhan bagi buruh/pekerja lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survey harga dan menentukan besaran nilai upah minimum. Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1(satu) tahun sekali atau dengan kata lain upah minimum berlaku selama 1 tahun.

Komponen KHL terdiri dari 7 kelompok kebutuhan dan 60 komponen dengan rincian sebagai berikut;: (1) Makanan dan

minimum, terdiri dari 11 (sebelas) komponen; (2) Sandang terdiri dari 13 (tigabelas) komponen; (3) Perumahan terdiri dari 26 (duapuluh enam) komponen; (4) Pendidikan terdiri dari 2 (dua) komponen; (5) Kesehatan terdiri dari 5 (lima) komponen; (6) Transportasi 1 (satu) komponen; (7) Rekreasi dan Tabungan 2 (dua) komponen.

(b) Kesepakatan Upah (Perundingan Upah)

Penetapan melalui kesepakatan ini biasanya dilakukan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan. Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. Kesepakatan tertulis yang dimaksud merupakan hasil perundingan antara seorang pekerja atau serikat buruh/serikat pekerja dengan pengusaha terkait syarat dan kondisi kerja termasuk di dalamnya besarnya upah. Bentuk kesepakatan tertulis antara seorang buruh/pekerja dengan pengusaha tertuang dalam perjanjian kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (buruh dan pengusaha), yang dalam berbentuk tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh;

Perundingan secara kolektif di mungkinkan bila perusahaan sudah berdiri serikat buruh/serikat pekerja dan keanggotaannya sudah mencapai lebih dari 50% (50% + 1) atau SB/SP mendapat dukungan lebih dari 50% dari jumlah buruh yang terdapat di perusahaan.

(c) Penerapan struktur dan skala upah

Penyusunan struktur dan skala upah menjadi salah satu mekanisme penetapan upah diatas upah minimum. Dalam menyusun struktur skala upah, pengusaha harus memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Penyusunan tersebut dilaksanakan melalui analisis jabatan, uraian jabatan dan evaluasi jabatan.

(d) Peninjauan Upah Secara Berkala

Peninjauan upah secara berkala perlu dilakukan perusahaan di samping mempertahankan daya beli dari upah yang di terima karyawannya, disamping itu juga untuk menjaga mutu SDM-nya agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Peninjauan secara berkala dapat dilakukan baik karena alasan kenaikan upah minimum (berupa upah sundulan bagi mereka yang telah berpengalaman), kenaikan inflasi, kenaikan produktivitas maupun meningkatnya kekayaan perusahaan.

2. Kebijakan Perlindungan Upah

Selain kebijakan pengupahan yang mengatur tentang mekanisme penentuan upah di pasar kerja, pemerintah juga menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh/pekerja. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi : (a). upah minimum; (b). upah kerja lembur; (c). upah tidak masuk kerja karena berhalangan; (d). upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; (e). upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; (f). bentuk dan cara pembayaran upah; (g). denda dan potongan upah; (h). hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; (i). struktur dan skala pengupahan yang proporsional; (j). upah untuk pembayaran pesangon; dan (k). upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

2.3.2 Lima Faktor Pertimbangan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di banyak negara tidak terlepas dari kebijakan ILO berkenaan upah minimum sebagaimana tercermin dalam sejumlah konvensi dan rekomendasi ILO. Satu konvensi yang terpenting berkenaan dengan upah minimum adalah Konvensi ILO No 131 yang secara khusus mengatur upah minimum di negara-negara berkembang.

Pada pasal 3 dari konvensi tersebut mensyaratkan bahwa pihak yang berwenang dalam menentukan upah minimum harus mempertimbangkan beberapa unsur berikut ini: (a) kebutuhan dari

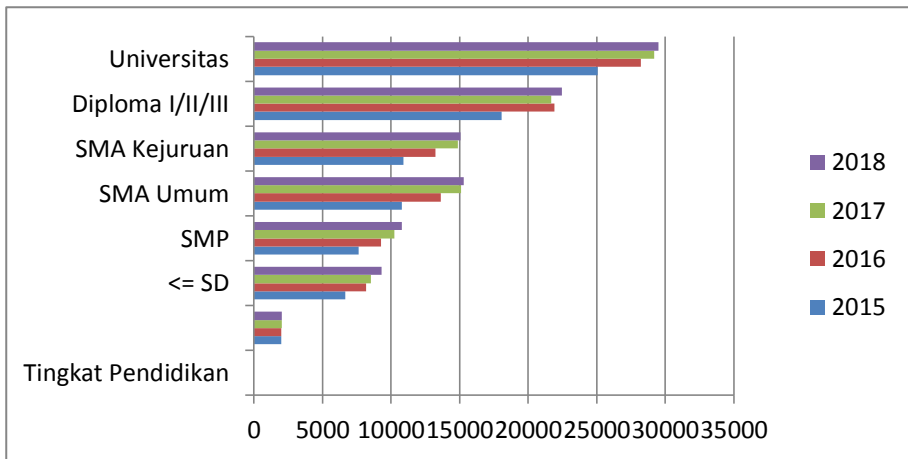
pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkat upah secara umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan perlindungan social dan standar kehidupan relative dari kelompok sosial lainnya. (b) Faktor ekonomi, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas, dan kemampuan untuk mencapai dan menjaga tingkat pekerjaan yang tinggi. (the desirability of attaining and maintaining a high level of employment).

Sayangnya konvensi ini belum di ratifikasi oleh Indonesia hingga saat ini. Sehingga penetapan upah minimum yang dilakukan masih berbasis pada kebutuhan hidup lajang dan bukan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Namun demikian, secara umum kriteria yang digunakan dalam penetapan upah minimum sebagian besar di adopsi dari konvensi ILO 131 tentang upah minimum. Hal ini sebagaimana terlihat pada factor pertimbangan upah minimum di Indonesia yang di atur dalam Permenaker No.17 Tahun 2005 dan perubahan revisi KHL dalam permenaker No 13 Tahun 2012. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum meliputi; a) Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL); b) Produktivitas makro; c) Pertumbuhan ekonomi; d) Kondisi pasar kerja; e) Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Dari kelima faktor di atas, KHL merupakan faktor dasar dalam penentuan upah minimum di mana nilai KHL diperoleh melalui survey harga. Faktor-faktor lainnya seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha marginal lebih merupakan faktor penyetar atas nilai upah minimum yang akan di tetapkan oleh Gubernur

2.4 Perkembangan Upah Pekerja di Indonesia Menurut Tingkat Pendidikan, Gender Dan Okupasi

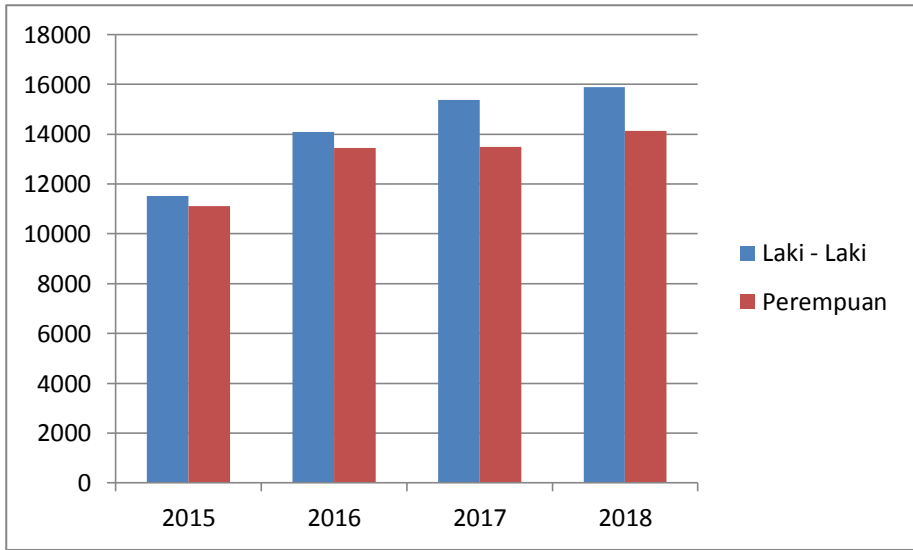
Berdasarkan tingkat pendidikan pekerja di Indonesia dalam periode 2015-2018 menunjukkan bahwa trend positif pada upah berlaku pada semua jenjang pendidikan. Kenaikan terbesar terjadi pada upah di tahun 2016 namun semakin berkurang kenaikannya sejalan waktu. Jika diamati antar jenjang pendidikan, upah pekerja SD berkisar antara 83,19 persen sampai dengan 88,57 persen dari upah pekerja berpendidikan SMP. Antara pekerja berpendidikan SMP dengan pekerja berpendidikan setingkat di atasnya upahnya adalah antara 67,89 persen sampai 70,83 persen. Upah pekerja SMA merupakan 59,61 persen sampai dengan 69,69 persen upah pekerja berpendidikan Diploma. Terakhir, bagian upah pekerja berpendidikan Diploma adalah 72,12 persen sampai dengan 77,61 persen dari upah pekerja berpendidikan tamat universitas. Dengan demikian antar jenjang pendidikan, upah pekerja SMA merupakan bagian paling kecil terhadap upah pekerja satu tingkat di atasnya, atau dengan kata lain deviasi perbedaan upah pekerja tersebut paling kecil. Perbedaan terbesar adalah antara upah pekerja SD dan SMP. Hal ini bermakna juga upah pekerja pada tingkat pendidikan paling rendah sangat minim dibandingkan upah pekerja berpendidikan lebih tinggi.



Gambar 4.1 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan tingkat Pendidikan Pekerja

Sumber: BPS, Sakernas 2018

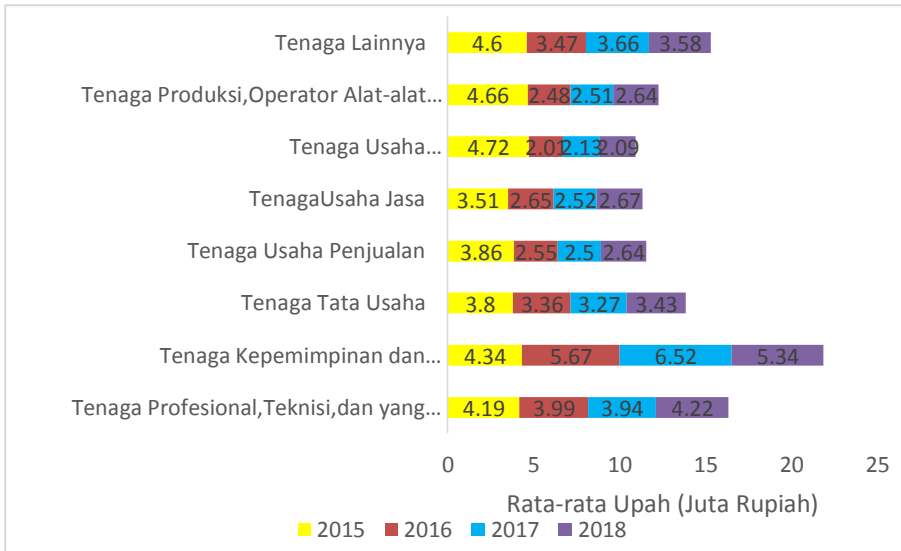
Bagian upah pekerja laki-laki terhadap perempuan pada tahun 2015 adalah 103,45 persen, meningkat menjadi 104,78 persen dan 114,03 persen pada tahun 2016 dan 2017, namun menurun sedikit menjadi 112,37 persen pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa upah pekerja laki-laki di Indonesia masih lebih tinggi dari pada upah pekerja perempuan.



Gambar 4.2 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan Gender Pekerja

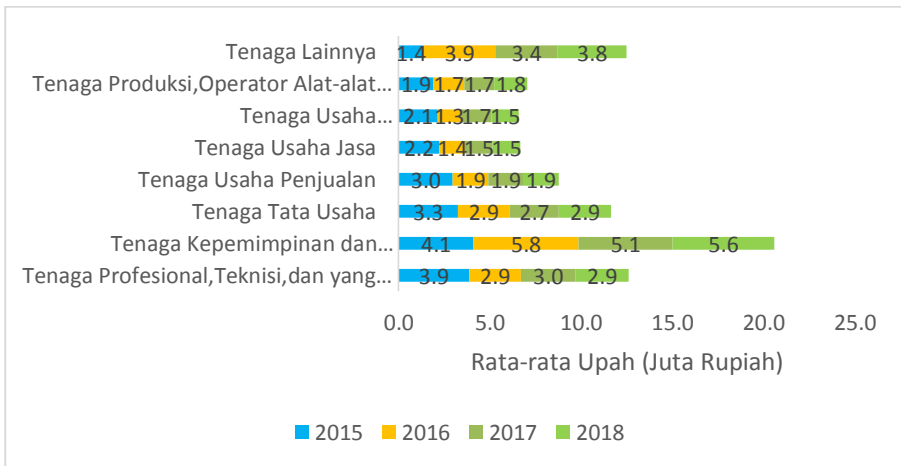
Sumber: BPS, Sakernas 2018

Fakta lain berkenaan dengan upah berdasarkan gender adalah adanya trend positif upah pekerja. Pada kelompok pekerja laki-laki kenaikan upah terjadi selama periode 2015 sampai dengan 2018, namun dengan kenaikan yang semakin mengecil, yaitu 22,48 persen menjadi 9,10 persen dan 3,29 persen. Hal yang sedikit berbeda pada kelompok pekerja perempuan, dimana besaran upah menunjukkan fluktuasi yaitu pada tahun 2017 kenaikan upah yang terjadi sangat kecil yaitu hanya 0,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 4.3 Rata-rata Upah Laki-laki Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama

Sumber: BPS, Sakernas 2018



Gambar 4.4 Rata-rata Upah Perempuan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama

Sumber: BPS, Sakernas 2018

Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa jenis okupasi dengan kode 4 sampai 8 mengalami perubahan rata-rata upah pekerja laki-laki berslope negative. Penurunan terbesar terjadi pada okupasi tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (kode 6). Selama periode 2015 -2018 penurunan yang sama terjadi pada okupasi tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar (kode 7). Pekerja laki-laki pada kedua okupasi ini mengalami penurunan upah sekitar separuh dari upah pada tahun 2015 yang berlangsung hingga 2018. Sementara itu trend menurun yang terjadi pada okupasi tenaga usaha jasa (kode 5); Tenaga usaha penjualan (kode 4) dan tenaga lainnya (kode 8) adalah sebesar 30 persen. Okupasi tenaga tata usaha adalah jenis pekerjaan yang memberikan upah rata-rata cenderung konstan pada periode tersebut. Sementara, okupasi tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan (kode 2) dan tenaga professional, teknisi dan sejenis (kode 1) menunjukkan trend positif secara umum. Pola perubahan upah pekerja laki-laki berdasarkan okupasi selama periode ini juga terjadi pada pekerja perempuan. Namun, pekerja perempuan secara nominal hanya menerima upah antara sepertiga sampai dua pertiga dari upah pekerja laki-laki (Gambar 4).

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, G.A. 1982. Labor Contracts as Partial Gift Exchange. *Quarterly Journal of Economics*. 97. 543-569.
<https://doi.org/10.2307/1885099>
- Alchian, Armen A. and Demsetz, Harold. 1972. Production, Information Costs, and Economic Organization. *American Economic Review*. 62 (5). 777-795.
- Becker, Gary Stanley. 1993. *Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, With Special Reference to Education*. The National Bureau of Economic Research. The University of Chicago Press.
- Blau FD, Kahn LM. 1992. The Gender Earnings Gap: Learning from international comparisons. *American Economic Review*. 82. (2).533–538.
- Blau FD, Kahn LM. 2017. The gender wage gap: Extent, trends, and explanations. *J Econ Lit*. 55. (3). 789–865.
- Champernowne, D. G. 1953. A Model of Income Distribution. *The Economic Journal*. 63. (250). 318-351.
- Ehrenberg, Ronald G., & Smith, Robert S, 2012. *Modern Labor Economics : Theory and Public Policy*. Eleventh ed. Pearson Education Inc.
- Elfindri. 2014. *Keajaiban Ekonomi dan Bisnis*. Penerbit Baduose Media. Jakarta.

(<http://www.preservearticles.com/201106178068/modern-theory-of-wage-determination-explained.html> diakses tanggal 20 Januari 2014).

Freeman RB, Katz LF. 1994. *Rising Wage Inequality: The United States vs. Other Advanced Countries*. In: Freeman RB Working Under Different Rules. New York: Russell Sage Foundation. 29-62.

Friedman, M. and Kuznets, S. 1954. Income from Independent Professional Practice. *NBER*.

Garen, John E. 1988. Empirical Studies of the Job Matching Hypothesis. Ehrenberg,

Glenn, C Blomquist, Mark, C Berger & John P. Hoehn. 1988. New Estimates of Quality of Life in Urban Areas. *American Economic Review*. 78 (1). 89-107.

Heckman, James J., and Sedlacek, Guilherme. 1985. Heterogeneity, Aggregation, and Market Wage Functions: An Empirical Model of Self-Selection in the Labor Market. *Journal of Political Economy*. 93. (6). 1077-1125.

Hoffmann, Florian, Inderst, Roman, & Opp, Marcus. 2016. Only Time Will Tell: A Theory of Deferred Compensation and Its Regulation.

<http://faculty.haas.berkeley.edu/mopp/Research/timing.pdf>
diakses tgl 25 Nopember 2020.

Jones-Lee, Michael W. 1976. *The Value of Life: An Economic Analysis*. Chicago: U. of Chicago Press.

- Jovanovic, Boyan. 1979. Job Matching and The Theory of Turnover. *Journal of Political Economy*. 87. 972-990.
- Juhn C, Murphy KM, Pierce B. 1991. Accounting for the slowdown in black–white wage convergence. In: Costas MH (ed) *Workers and their wages*. AEI Press, Washington, DC. 107–143.
- Kaufman, Bruce E and Julie L. Hotchkiss. 2005. *The Economics of Labor Markets*. South-Western Thomson.
- L. F. Katz and D. H. Autor. 1999. Changes In The Wage Structure and Earnings Inequality. *Handbook of Labor Economics*, Volume 3, Edited by O. Ashenfelter and D. Card.
- Lazear, E.1979. Why is There Mandatory Retirement?. *Journal of Political Economy*. 87.(6). 1261-1284.
- Leigh, Paul J. 1989. Compensating Wages for Job-Related Death: The Opposing Arguments. *Journal of Economic Issues*. 23.(3). 823-842.
- Liu, Pak-Wai. 1986. Human Capital, Job Matching and Earnings Growth between Jobs: An Empirical Analysis. *Applied Economics*. 18.(10). 1135-1147.
- Ma, Xinxin. 2016. Change The Wage Structures in Chinese Public and Private Sectors: 1995 – 2007. *Management Studies*. 4 (6). 243-255.
- Miller, Ted and Guria Jagadish. 1991. *The Value of Statistical Life in New Zealand*. Report to the Ministry of Transport. Land Transport Division.
- Mincer. J. 1958. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. *The Journal of Political Economy*. 66. (4). 77-87.

- Ronald G., ed. Research in *labor economics*. 9, A Research Annual
Greenwich. Conn, and London: JAI Press. 187-224.
- Rosen, Sherwin. The Theory of Equalizing Differences. Ashenfelter,
O., and Layard, R., ed. 1986 *Handbook of Labor Economics*,
Amsterdam: North-Holland. 641- 692.
- Roy A. D. 1951. Some thoughts on the Distribution of Earnings.
Oxford Economic Paper. 3. 135-146.
- Salop, Steven C. 1979. A Model of the Natural Rate of
Unemployment. *American Economic Review*. 69. (1). 117-
125.
- Salverda, W. and D. Checchi. 2014. Labour-Market Institutions and
The Dispersion of Wage Earnings. In:*Handbook of Income
Distribution 2B*. 1535–1727.
- Shapiro, Carl; Stiglitz, Joseph E. 1984. Equilibrium Unemployment as
a Worker Discipline Device. *The American Economic Review*.
74. (3). 433-444.
- Spence, A. M. 1973. Job Market Signaling. *Quarterly Journal of
Economics*. 87. (3). 355-374.
- Tachibanaki, Toshiaki. 1996. *Wage Determination and Distribution in
Japan*, Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Teulings, Coen N. 1955. The Wage Distribution In a Model of The
Assignment of Skills To Jobs. *Journal of Political Economy*.
103. (2). 280-315.
- Thurow, L. C. 1975. *Generating Inequality: Mechanisms of
Distribution in the US Economy*. New York: Basic Books.

- Tinbergen, Jan. 1974. Substitution Of Graduate By Other Labour.
Kyklos. 27. (2) 217-226. <https://doi/epdf/10.1111/j.1467-6435.1974.tb01903.x>
- Viscusi, W. Kip, Magat, Wesley A. and Huber, Joel. 1987. An Investigation of the Rationahty of Consumer Valuations of Multiple Health Risks. *Rand J. Economics.* 18. (4). 465-79.
- Weiss, Andrew. 1980. Job Queues and Layoffs in Labor Markets with Flexible Wages. *Journal of Political Economy.* 88. (3). 526-38.
- Wood, Stuart. 1889. The Theory of Wages. *Publications of the American Economic Association.* 4.(1). 5-35.
- Woodbury, Stephen A. and Huang, Wei-Jang. 1991. *The Tax Treatment of Fringe Benefits.* Kalamazoo. Michigan: W. E. Upjohn Institute for Employment Research.
 (<http://www.economictheories.org>. diakses tgl 20 Januari 2014).
- Woodbury, Stephen A., and Wei-Jang Huang. 1991. The Tax Treatment of Fringe Benefits. Kalamazoo, MI: W.E. *Upjohn Institute for Employment Research.*
<https://doi.org/10.17848/9780880996075>
- Yellen, Janet L. 1984. Efficiency Wage Models of Unemployment. *American Economic Review.* 74. (2). 200-205.

BAB V
AGLOMERASI INDUSTRI: TELAHAH PROSPEK
UNTUK INDUSTRI KECIL DI
SUMATERA SELATAN

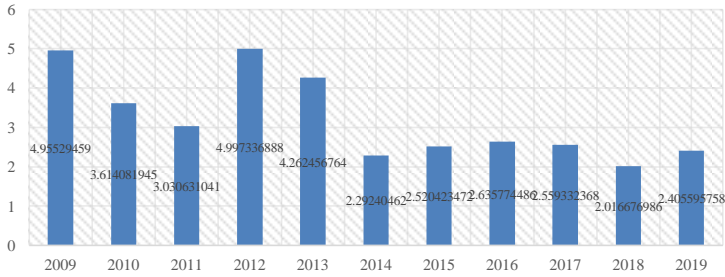
Oleh:

Mukhlis; Bernadette Robiani; Dirta Pratama Atiyatna; Hamira

1. Pendahuluan

Industri kecil memegang peranan sosial dan politis yang strategis di negara Indonesia. Peran sosial terlihat dari kemampuan industri kecil dalam menyerap tenaga kerja. Peran politis tergambar dari kemampuan industri kecil dalam menghadapi menghadapi gejolak eksternal, semisal perubahan nilai tukar dan sebagainya. Hal ini disebabkan industri kecil tidak terlalu membutuhkan barang modal dari luar, sehingga relatif mampu bertahan saat terjadi perubahan eksternal. Selama periode 2009-2019, industri kecil di Indonesia berkembang secara fluktuatif dengan rerata pertumbuhan 3,25 persen pertahun, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,15 persen.

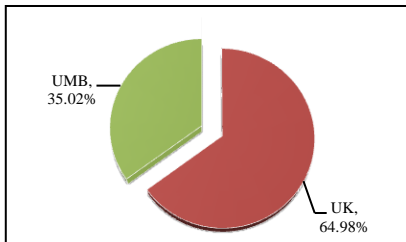
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2019 sebesar 99,68 persen pelaku ekonomi nasional berasal dari sektor industri kecil dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 94,05 persen. Kontribusi sektor industri kecil terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif besar.



Gambar 5.1 Pertumbuhan Industri Kecil di Indonesia

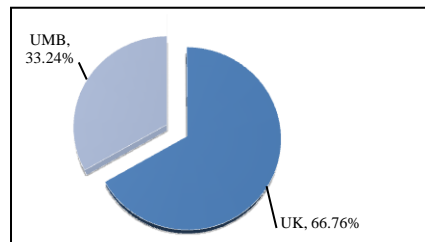
Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019

Kelompok industri kecil turut berperan besar dalam kontribusinya terhadap perekonomian di provinsi Sumatera Selatan. Terlihat dari besaran perkembangan unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi industri kecil di provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 5.2 Pangsa IK terhadap PDB Harga Berlaku Indonesia, 2019

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019

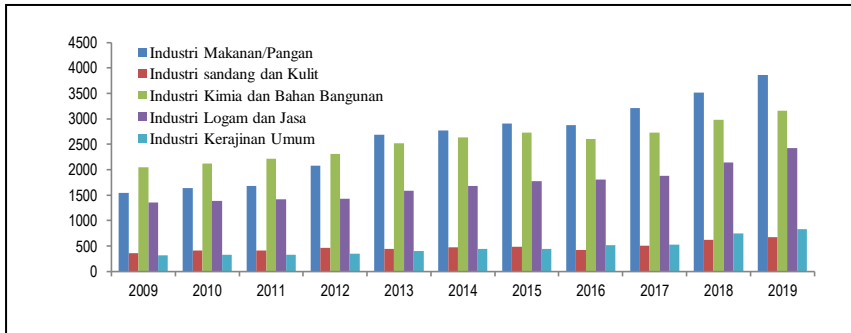


Gambar 5.3 Pangsa IK terhadap PDB Harga Konstan Indonesia, 2019

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019

Industri kecil di provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh sektor pangan, kimia dan bahan bangunan serta dan logam dan jasa. Meski demikian, pertumbuhan seluruh sektor industri kecil di Sumatera Selatan ini relatif rendah (tetap bertumbuh) dengan rerata

pertumbuhan secara keseluruhan sebesar 5,93 persen pertahun selama tahun 2009-2019.



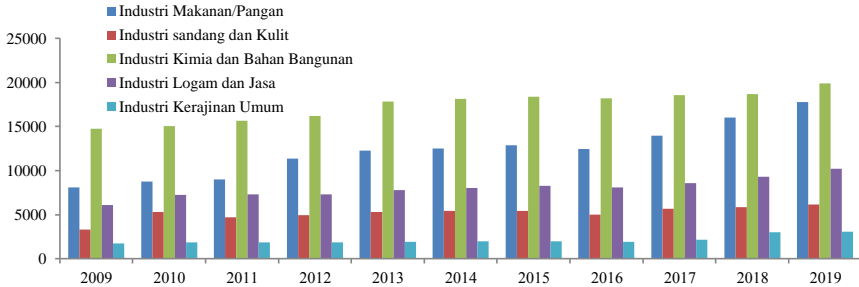
Gambar 5.4 Perkembangan Unit Usaha Industri Kecil di Sumatera Selatan, 2009-2019

Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka, 2019

Berdasarkan serapan tenaga kerja, sektor industri kecil dan menengah seperti pangan, kimia dan bahan bangunan, serta logam dan jasa juga mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan rerata penyerapan sebesar 4,61 persen selama 2009-2019. Meski demikian, penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil ini secara keseluruhan per tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Pengembangan industri kecil akan lebih mudah dan cepat apabila industri kecil tersebut mengelompok dan berkumpul sehingga tercapai suatu penghematan ekonomi/ aglomerasi (Ricci, 1999). Fenomena yang terjadi sekarang, industri kecil di provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya berkumpul di suatu daerah, terutama yang memiliki produk yang sama. Sehingga masih mengalami kesulitan

dalam mengakses bahan baku, mendistribusikan barang, dan memasarkan produknya (Dirlanudin, 2008 dan Tilaar, 2010).



Gambar 5.5 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil di Sumatera Selatan, 2009-2019

Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka, 2019

Menurut Tarigan (2004), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan aglomerasi industri, antara lain: 1) *Skala Ekonomi*, adalah faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi. Skala ekonomi berdampak kepada tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas usaha, misalnya transportasi, perbankan, asuransi, listrik, air bersih dan sebagainya; 2) *Pendapatan perkapita*. Industri yang memiliki skala meningkat (*increasing return industri*) akan berkonsentrasi pada pasar yang besar, dan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa yang dihasilkan; 3) *Ketersediaan bahan baku*; dan 4) *Tenaga kerja*, akan mempengaruhi lokasi industri, apabila penghematan tenaga kerja per unit produksi lebih besar daripada tambahan biaya transportasi per unit produksi karena berpindahnya lokasi ke dekat sumber tenaga kerja.

Daerah yang melakukan aglomerasi cenderung memiliki pembangunan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak melakukan aglomerasi. Melalui pembangunan ekonomi yang tinggi, daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi sebagai akibat banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor yang melakukan aglomerasi (Tilaar, 2010). Daerah-daerah yang memiliki banyak aktivitas industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang hanya sedikit memiliki aktivitas industri. Daerah yang banyak memiliki aktivitas industri akan lebih banyak mempunyai akumulasi modal, sehingga pertumbuhannya akan lebih cepat.

Industri kecil di provinsi Sumatera Selatan seluruhnya berjumlah 15.425 unit usaha. Industri kecil ini tersebar di seluruh kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Selatan dengan sebaran yang terbesar di Kota Palembang (21,72 persen); Kabupaten Musi Banyuasin (13,10 persen); dan Kota Pagaralam (12,41 persen). Sedangkan daerah yang memiliki jumlah industri kecil yang relatif sedikit adalah Kabupaten Empat Lawang (0,45 persen).

Pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai dengan pengembangan industri kecil di Sumatera Selatan, yaitu melalui pendekatan kelompok serta membangun jaringan usaha yang saling terkait. Pendekatan pengembangan aktivitas usaha industri kecil secara berkelompok ini dapat dilakukan melalui pola klaster untuk industri kecil yang sejenis. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha industri kecil ini dapat dikembangkan beberapa

usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk aglomerasi.

Industri kecil di Sumatera Selatan akan mampu bertahan terhadap persaingan dengan industri besar apabila melakukan penggabungan dalam suatu aglomerasi sehingga mampu memanfaatkan efisiensi kolektif, misalnya dalam pembelian bahan baku, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemasaran. Konsekuensinya harus tercipta skala ekonomi yang efisien, sehingga industri kecil dapat bergerak dalam pasar yang tidak terpecah-pecah (*fragmented market*) (Kuncoro, 2012). Melalui aglomerasi industri kecil diharapkan dapat memberikan *spread effect* terhadap daerah sekitar, sehingga memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap wilayah sekitarnya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Aglomerasi

Aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa- jasa, dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik benang merah bahwa suatu aglomerasi tidak lebih dari sekumpulan kluster industri dan merupakan konsentrasi dari aktifitas ekonomi dari penduduk secara spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan.

Aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi, baik karena penghematan lokalisasi maupun penghematan urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan satu sama lain. Aglomerasi ini mencerminkan adanya sistem interaksi antara pelaku ekonomi yang sama: apakah antar perusahaan dalam industri yang sama, antar perusahaan dalam industri yang berbeda, ataupun antar individu, perusahaan dan rumah tangga.

Pendekatan lain adalah mengaitkan aglomerasi sebagai suatu bentuk spasial dengan konsep “penghematan aglomerasi” melalui konsep eksternalitas. Ekonom membedakan antara: 1) Penghematan internal dan eksternal (*internal economies* dan *external economies*); 2) Penghematan akibat skala ekonomis dan cakupan (*economies of scale* dan *economies of scope*) (Kuncoro, 2012).

Penghematan internal adalah suatu pengurangan biaya secara internal di dalam suatu perusahaan atau pabrik. Seberapa jauh pengurangan biaya dapat dicapai pada suatu perusahaan tergantung apakah efisiensi dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Sedang penghematan eksternal merupakan pengurangan biaya yang terjadi akibat aktivitas di luar lingkup perusahaan atau pabrik. Sebagaimana halnya suatu perusahaan dapat mencapai penghematan biaya secara internal dengan memperluas produksi atau meningkatkan efisiensi, satu atau beberapa industri dapat meraih penghematan eksternal dengan melakukan aglomerasi secara spasial.

Penghematan akibat skala ekonomi muncul karena perusahaan menambah produksi dengan cara memperbesar pabrik (skala

ekonomi). Penghematan biaya terjadi dengan meningkatkan skala pabrik sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan. Berbeda dengan penghematan akibat cakupan yang disebabkan oleh sejumlah aktivitas atau sub unit usaha secara internal maupun eksternal dapat dilakukan pada saat yang bersamaan sehingga menghemat biaya.

Myrdal dan Pred dalam Kuncoro (2012), berpendapat bahwa dampak positif dari kausalitas kumulatif berkelompoknya beragam usaha (*agglomeration economies*) seperti terbentuknya industri baru, penciptaan kesempatan kerja lebih lanjut, peningkatan daya tarik kerja dan modal, peningkatan keterampilan penduduk, pengembangan industri terkait, perluasan jasa-jasa lokal dengan biaya per unit yang lebih rendah, dan tersedianya jasa dan hiburan yang baik. Pada saat aglomerasi di suatu wilayah mampu mencapai skala ekonomis maksimum maka ekspansi setelah titik tersebut hanya akan menimbulkan dampak negatif (*agglomeration diseconomies*) bagi wilayah aglomerasi. Adanya persaingan antar perusahaan dan industri, lama kelamaan akan meningkatkan harga bahan baku dan faktor produksi sehingga biaya per unit naik yang akan menyebabkan relokasi aktivitas ekonomi ke daerah lain yang belum mencapai skala produksi maksimum. Munculnya *agglomeration economies* di suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi produksi (Nuryadin dan Sodik, 2007).

Aglomerasi dapat diukur dengan beberapa cara: 1) menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan (*urban area*) dalam suatu provinsi terhadap jumlah penduduk tersebut; 2) menggunakan konsep aglomerasi produksi, yaitu menggunakan

proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi; dan 3) menggunakan konsep proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri di kabupaten/kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri dalam suatu provinsi. Menurut Sbergami (2002), ketiga konsep tersebut adalah proksi dari aglomerasi yang disebut dengan Indeks Ballasa (IB). Dalam penelitian ini, untuk mengukur aglomerasi, selain menggunakan indikator skala usaha, upah tenaga kerja, dan biaya bahan baku serta pemasaran (aksesibilitas). Pengukurannya menggunakan konsep proporsi tenaga kerja sektor industri di suatu wilayah, sehingga tingkat aglomerasi yang dihitung merupakan cerminan dari keadaan aglomerasi industri di suatu wilayah. Adapun untuk menghitung Indeks Ballasa digunakan rumus;

$$LQ = IS_{it} = \frac{\left(\frac{E_{ij}}{\sum E_{ij}} \right)}{\left(\frac{\sum_j E_{ij}}{\sum \sum_j E_{ij}} \right)} \quad (1)$$

dimana: $LQ = IS_{ij}$ = koefisien spesialisasi regional; E_{ij} = tenaga kerja sektor i di daerah j ; $\sum E_{ij}$ = total tenaga kerja sektor i di daerah j ; $\sum_j E_{ij}$ = tenaga kerja di daerah j ; dan $\sum \sum_j E_{ij}$ = total tenaga kerja di daerah j .

Semakin terpusat industri, semakin besar nilai Indeks Ballasa. Tingkat Aglomerasi dibedakan menjadi: 1) *Kuat*, apabila angka Indeks Ballasa di atas 4; 2) *Sedang*, apabila angka Indeks Ballasa di antara 2 sampai 4; 3) *Lemah*, apabila angka Indeks Ballasa di antara 1

sampai 2; dan 4) *Tidak terjadi aglomerasi*, apabila angka Indeks Ballasa antara 0 sampai 1.

Terjadinya aglomerasi industri mempunyai keuntungan tertentu yaitu skala ekonomis (usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya, antara lain: 1) **keuntungan internal perusahaan** yang muncul karena adanya faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya diperoleh dalam jumlah tertentu. Bila dipakai dalam jumlah yang lebih banyak, biaya produksi per unit akan jauh lebih rendah dibandingkan jika pemakaiannya sedikit; 2) **keuntungan lokalisasi**, yang berhubungan dengan sumber bahan baku atau fasilitas sumber, artinya dengan menumpuknya industri, maka setiap industri merupakan sumber atau pasar bagi industri yang lain; dan 3) **keuntungan ekstern** (keuntungan urbanisasi).

Aglomerasi beberapa industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tersedia tanpa membutuhkan latihan khusus untuk suatu pekerjaan tertentu dan semakin mudah memperoleh tenaga-tenaga yang berbakat. Selain itu aglomerasi akan mendorong didirikannya perusahaan jasa pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri, misal listrik, air minum, maka biaya dapat ditekan lebih rendah.

Di samping keuntungan skala ekonomis tersebut, aglomerasi mempunyai keuntungan lain yaitu menurunnya biaya transportasi. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mendorong didirikannya perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitasnya. Ketersediaan fasilitas tersebut membuat industri-industri tidak perlu menyediakan atau mengusahakan jasa angkutan sendiri. Menurut Tarigan (2004),

aglomerasi terjadi karena adanya hubungan saling membutuhkan produk diantara berbagai industri, seperti tersedianya fasilitas (tenaga listrik, air, perbengkelan, jalan raya, pemondokan, juga terdapat tenaga kerja terlatih).

Penelitian yang dilakukan oleh Xiao-Ling, Yu-Xian, dan Jie (2013) mengenai spasial aglomerasi kultur industri di China dengan menggunakan Indeks Ellison dan Glaeser (EG) dan Indeks Herfindhal (H) menemukan bahwa: 1) aglomerasi industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan indeks EG suatu industri memiliki korelasi yang kuat dengan nilai output bruto industri; 2) lokasi geografis memiliki dampak penting pada industri, dan wilayah timur China memiliki keuntungan yang signifikan akibat lokasi geografis yang strategis; 3) adanya perkembangan daerah yang menyediakan modal, pasar dan kondisi lain untuk pengembangan industri, yang merupakan faktor dominan dari aglomerasi industri; dan 4) banyaknya sumber daya merupakan salah satu faktor aglomerasi industri, tetapi ketika pembangunan ekonomi lemah dan rendah, kelimpahan sumber daya tidak dapat menjadi faktor dominan dari aglomerasi industri.

Alkay dan Hewings (2012) dalam kajiannya mengenai determinan aglomerasi 22 industri manufaktur di kawasan metropolitan Istanbul, dengan menggunakan ekonomi lokalisasi dan urban ekonomi sebagai determinan aglomerasi. Menemukan urban ekonomi memiliki efek yang kuat untuk level geografi dan industri spesifik. Hal ini mengimplikasikan bahwa tingkat kepadatan penduduk, potensi pasar dan pasar tenaga kerja yang potensial adalah proxy efektif untuk menggambarkan urban ekonomi pada aglomerasi.

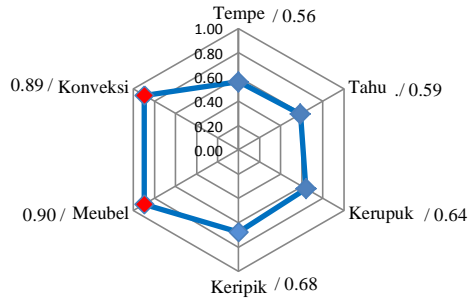
Efek lokalisasi konsisten dengan model Marshall untuk tenaga kerja dan input. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat menunjukkan perubahan pengetahuan (*knowledge spillover*) akan berpengaruh terhadap aglomerasi.

Sementara itu, Lu dan Tao (2006), melakukan penelitian terhadap Determinan Aglomerasi Industri Besar di China selama periode 1998-2003. Variabel yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja (diproxy dengan upah) dan bahan baku (diproxy dengan intensitas pembelian input), menemukan bahwa: 1) upah dan intensitas pembelian input berhubungan positif dengan (pembentukan) aglomerasi industri di China; dan 2) trend aglomerasi industri secara keseluruhan di China terus meningkat di semua lingkup industri selama tahun 1998-2003.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Potensi Aglomerasi Industri Kecil ditinjau dari Skala Ekonomi pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan

Indikator skala ekonomi yang digunakan untuk mengukur potensi aglomerasi industri kecil dalam penelitian ini adalah tingkat efisiensi. Efisiensi sendiri diukur dengan melihat perbandingan antara biaya input primer (nilai tambah) dengan biaya madya. Semakin tinggi tingkat efisien industri kecil, mencerminkan semakin besar nilai tambah yang tercipta dan semakin besar pula pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan.



Gambar 5.6 Dukungan Skala Ekonomi terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Data Lapangan, 2019, diolah

Berdasar hasil perhitungan, nilai efisiensi industri kecil di Sumatera Selatan sebesar 0.7232. Nilai ini masih relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan relatif belum efisien dalam pemanfaatan faktor produksinya. Bila dilihat dari kelompok industri, diperoleh kelompok industri yang memiliki nilai efisiensi yang besar adalah kelompok industri meubel dan konveksi, masing-masing sebesar 0,8958 dan 0,8949. Hal ini mengindikasikan bahwa industri kecil meubel dan konveksi sudah mengarah pada pencapaian efisiensi yang optimal.

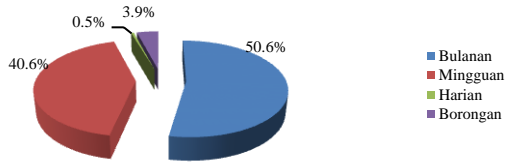
Gambar 6 menyajikan secara gamblang, berdasarkan enam kelompok industri yang dijadikan sampel, nilai efisiensi yang dicapai berada di atas batas ambang 0,5. Ini mengindikasikan bahwa seluruh kelompok industri kecil memiliki potensi besar untuk beraglomerasi. Efisiensi yang relatif tinggi ini juga didukung oleh kemampuan penciptaan nilai tambah dari masing-masing industri tersebut yang relatif tinggi.

3.2 Potensi Aglomerasi Industri Kecil ditinjau dari Upah Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan

Upah tenaga kerja merupakan faktor yang memodifikasi lokasi. Dalam hal ini jarak/ asal tenaga kerja sangat diperhatikan karena berkaitan dengan upah tenaga kerja. Untuk memperoleh penghematan biaya maka pengusaha banyak memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari dalam daerahnya karena hal ini sangat berkaitan dengan pemberian upah yang akan diberikan, jika jarak tenaga kerja jauh dari lokasi industri maka akan menambah biaya transportasi yang akan dibebankan pada upah tenaga kerja.

Pada gambar 7 terlihat bahwa sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha industri kecil yang terbesar adalah dengan metode bulanan (50,6 persen) dan metode mingguan (40,6 persen). Sedangkan pembayaran upah dengan metode harian dan borongan menempati posisi yang paling sedikit, masing-masing 5,0 persen dan 3,9 persen. Sistem pengupahan di Provinsi Sumatera Selatan telah diberikan patokan untuk kelayakan dalam bentuk upah minimum yang harus dibayarkan kepada para pekerja.

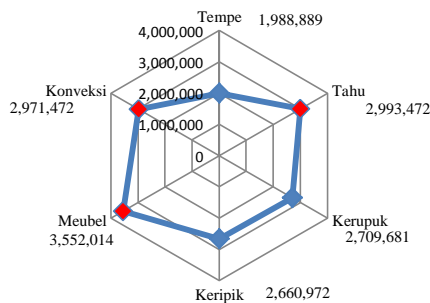
Pada tahun 2019 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mematok besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) sebesar Rp. 2.715.000,-. Nilai ini dianggap besaran yang layak bagi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagi pelaku industri yang membayarkan upah tenaga kerja di atas harga patokan minimum; atau minimal sama, akan dianggap kapabel dalam melaksanakan aktivitas produksinya.



Gambar 5.7 Sistem Pengupahan pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Data Lapangan, 2019, diolah

Berdasarkan hasil survey terhadap industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan yang dijadikan sampel, diperoleh rata-rata upah yang diterima pekerja industri kecil di Sumatera Selatan per bulannya sebesar Rp. 2.812.750,- perbulan. Bila dibandingkan dengan UMS Provinsi Sumatera Selatan, jumlah ini sudah memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja di sektor industri kecil ini. Hal ini memberikan makna sektor industri kecil memiliki potensi beraglomerasi yang kuat karena dapat dijadikan sumber pendapatan yang memadai bagi mereka yang ingin bekerja di sektor ini.



Gambar 5.8 Dukungan Upah terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Data Lapangan, 2019, diolah

Bila ditinjau dari kelompok industri, berdasarkan pada upah yang diterima pekerja, diperoleh kelompok industri yang paling kuat potensi untuk beraglomerasi adalah industri meubel (Rp. 3.522.014,-/bulan), industri tahu (Rp. 2.993.472,-/bulan), dan konveksi (Rp. 2.971.472,-/bulan) dengan besaran upah dan Rp. 4.952.014,- per bulan.

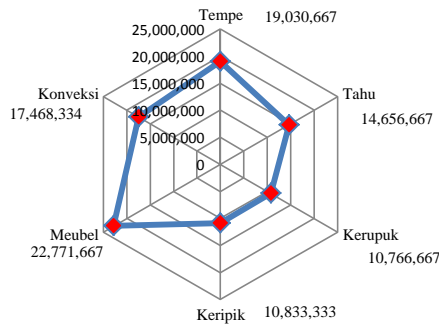
3.3 Potensi Aglomerasi Industri Kecil ditinjau dari Biaya Bahan Baku dan Pemasaran pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap 180 responden industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh rata-rata biaya bahan baku dan pemasaran perbulan untuk industri kecil secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 25.000.000,-/bulan. Sedangkan rata-rata biaya bahan baku dan pemasaran hanya untuk enam kelompok industri kecil yang dijadikan sampel penelitian sebesar Rp. 5.959.734,-/ bulan.

Pada gambar 9 terlihat rerata biaya bahan baku dan pemasaran industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan, semua masih berada di bawah rata-rata biaya bahan baku dan pemasaran industri kecil keseluruhan di Provinsi Sumatera Selatan. Relatif rendahnya biaya bahan baku dan pemasaran ini memberikan makna bahwa industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang kuat untuk beraglomerasi.

Bahan baku merupakan salah satu unsur penting dalam berjalannya proses produksi industri kecil. Berdasarkan Tabel 1, terlihat pengeluaran bahan bahan baku yang terbesar antara Rp.

200.000,- - Rp. 1.668.000,- (83,33 persen). Murahnya harga bahan baku ini didukung karena letak sumber bahan baku yang relatif dekat dengan pusat produksi dan didukung oleh banyaknya jasa pemasok bahan baku, sehingga pengusaha industri kecil dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang relatif murah.



Gambar 5.9 Dukungan Biaya Bahan Baku dan Pemasaran terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Data Lapangan, 2019, diolah

Di beberapa daerah, pelaku industri kecil membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) dan sebagian lagi bergabung dengan Koperasi. Sehingga pengusaha industri kecil bisa saling mendukung dalam mencukupi kebutuhan akan bahan baku. Hal ini berdampak pada penghematan dan kelancaran proses produksi. Terbukti dari hasil penelitian bahwa pengusaha yang memperoleh bahan baku dari jasa pengepul dalam desa/kelurahan adalah sebesar 89,66persen, sedangkan dari luar desa/kelurahan adalah 10,34 persen. Selain itu jarak lokasi industri dengan bahan baku juga relatif dekat yaitu paling

banyak ditempuh adalah 1 – 10 km yaitu sebesar 96,11 persen dan yang paling jauh > 20 km sebesar 1,11 persen.

Aksesibilitas bahan baku yang mudah tersebut akan sangat mendukung timbulnya penghematan aglomerasi pada industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuncoro (2012) yang menyatakan bahwa aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*), baik karena penghematan lokalisasi maupun penghematan urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan satu sama lain.

Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha industri kecil untuk mempromosikan hasil produksi guna menjaga kelangsungan usahanya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Salah satu keuntungan dengan adanya penduduk yang padat adalah dimungkinkannya pengembangan usaha yang memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai *demand* potensial. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa daerah pemasaran yang dituju oleh pengusaha sebagian besar masih dalam lingkup wilayah yang sempit atau masih bersifat lokal, paling dekat 0 – 10 km (88,89 persen), dan paling jauh > 10 km (11,11 persen). Pemasaran yang jauh ini biasanya untuk industri meubel yang diproduksi berdasarkan pesanan dan jumlahnya relatif tidak banyak. Daerah pemasaran dalam lingkup lokal ini akan menghemat biaya dan waktu dalam memasarkannya.

Berdasarkan hasil survey, rerata biaya bahan baku dan biaya pemasaran untuk industri kecil berdasarkan kelompok industri

perbulan sebesar Rp. 5.969.734,-/ bulan. Kelompok industri kecil yang memiliki rerata biaya akses yang terendah adalah kelompok industri kerupuk (Rp. 4.376.574,-/bulan) dan kelompok industri konveksi (Rp. 4,676,154,-/bulan).

Penyebab rendahnya biaya akses pada kelompok industri ini disebabkan karena bahan baku yang relatif mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah, berkisar antara Rp. 30.000,- - Rp. 43.333,- per kg. Bahan baku terdiri dari tepung dan ikan yang relatif mudah diperoleh di daerah sekitarnya (1 – 20 kilometer). Bahan baku ini dengan mudah ditemui di pasar atau di warung-warung sekitar lokasi industri. Umumnya pengusaha kerupuk membeli bahan baku ini dari toko grosir di pasaran dalam partai besar dan diantar langsung ke lokasi produksi oleh pemasok, sehingga dapat meminimalkan biaya transportasi. Kendala bahan baku biasanya terjadi saat musim kemarau, dimana terjadi kenaikan bahan baku ikan mencapai 100 persen, sehingga ongkos produksi menjadi mahal. Pemasaran produk industri kecil kerupuk menggunakan sistem diantar langsung ke pembeli (70,00 persen) dan pembeli datang sendiri (26,67 persen), dengan biaya transportasi pemasaran perbulan yang relatif kecil, berkisar antara Rp. 166.668,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

Untuk kelompok industri kecil konveksi, rendahnya biaya bahan baku lebih disebabkan karena pengusaha industri kecil konveksi ini melakukan pembelian bahan baku melalui toko grosir yang ada di pasar di daerah mereka atau ke kota Palembang. Selain itu *link* mereka sebagai pelanggan menyebabkan mereka dapat membeli bahan baku dengan harga yang murah. Rata-rata harga bahan baku utama berupa

kain berkisar antara Rp. 35.000,- - Rp. 85.000,-/ meter, tergantung jenis kain yang dipesan. *Trust* yang terbangun antara pengusaha industri kecil dengan pemasok bahan baku membuat pengusaha industri kecil dapat melakukan pembayaran di belakang untuk bahan yang mereka beli. Pemasaran produk konveksi tidak membutuhkan biaya yang besar. Umumnya mereka beroperasi berdasarkan pesanan, sehingga pembeli langsung datang ke lokasi industri.

3.4 Ikhtisar Hasil Estimasi Analisis Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil estimasi secara keseluruhan untuk potensi aglomerasi industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada indikator skala ekonomi, upah tenaga kerja, dan biaya bahan baku serta pemasaran, ditemukan kelompok industri kecil yang paling besar potensi aglomerasinya serta sebaran wilayah yang memungkinkan untuk dilakukan pengembangan.

Berdasarkan tabel 1 terdapat enam kelompok industri kecil beserta sebaran wilayah masing-masing di Sumatera Selatan yang memiliki potensi kuat untuk beraglomerasi berdasarkan indikator skala ekonomi, upah tenaga kerja, dan biaya bahan baku serta pemasaran. Meski demikian, tidak seluruh industri kecil memenuhi kriteria pengukuran berdasarkan ketiga indikator tersebut. Tercatat hanya industri kecil meubel dan konveksi yang memenuhi kriteria berdasarkan ketiga indikator yang digunakan.

Menurut Li *et al* (2012) potensi aglomerasi yang kuat bagi industri kecil tersebut karena ada keterkaitan antara skala ekonomi

(efisiensi), upah, dan biaya bahan baku. Efisiensi yang diperoleh industri kecil tidak lepas dari dukungan ketersediaan bahan baku dan pemasaran, serta ketersediaan tenaga kerja. Lokasi berdirinya industri kecil di Sumatera Selatan selain karena dipengaruhi faktor bermukim pengusaha/ keturunan, juga didasarkan atas pertimbangan faktor geografis nonfisik yang seperti bahan mentah, tenaga kerja, pasaran dan sarana transportasi. Mengelompoknya industri kecil ini, meskipun belum dapat dikatakan suatu bentuk aglomerasi industri, menguntungkan pengusaha industri kecil dikarenakan adanya faktor-faktor produksi yang saling berdekatan dengan industri kecil sejenis lainnya.

**Tabel 5.1 Indikator Potensi Aglomerasi Industri Kecil
di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Indikator	Rerata Nilai IK Sumatera Selatan	Potensi Beraglomerasi		Keterangan
			Rerata Nilai Kelompok Industri	Wilayah	
1.	Skala Ekonomi (Efisiensi)	0.71	Meubel (0.90)	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Palembang • Kabupaten Musi Banyuasin • Kota Lubuk Linggau • Kota Pagaram • Kabupaten Lahat • Kabupaten OKI • Kabupaten Muara Enim • Kabupaten OKU • Kota Prabumulih 	Nilai efisiensi mendekati 1 (> dari ambang 0,5), sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok industri dan wilayah tersebut memiliki potensi yang kuat bagi teraglomerasinya industri kecil
			Konveksi (0.89)	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Palembang • Kabupaten Musi 	

				<ul style="list-style-type: none"> Banyuasin Kota Lubuk Linggau Kota Pagaralam Kabupaten Lahat Kabupaten OKI Kabupaten Muara Enim Kabupaten OKU Kota Prabumulih 	
			Tahu (Rp. 2.993.472,-/bulan)	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten OKU Kota Prabumulih 	
2.	Upah Tenaga Kerja	Rp. 2.715.000,-/bulan	Konveksi (Rp. 2.971.472,-/bulan)	<ul style="list-style-type: none"> Kota Palembang Kabupaten Musi Banyuasin Kota Lubuk Linggau Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten OKU 	<p>Nilai rata-rata upah tenaga per bulan pada kelompok industri kecil ini berada diatas patokan upah minimum sektoral (UMS) Rp. 2.715.000,-. Mengindikasikan kelompok industri ini diminati dan berpotensi kuat untuk beraglomerasi</p>
			Meubel (Rp. 3.552.014,-/bulan)	<ul style="list-style-type: none"> Kota Palembang Kabupaten Musi Banyuasin Kota Lubuk Linggau Kabupaten OKI 	
3.	Biaya Bahan Baku dan Pemasaran	Rp. 25.000.000,-/bulan	Tempe (Rp. 6.523.682,-/bulan)	<ul style="list-style-type: none"> Kota Palembang Kota Lubuk Linggau Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten OKU 	<p>Biaya akses kelompok industri berada di bawah rerata biaya akses industri kecil secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga dapat dimaknai bahwa kelompok industri di beberap wilayah sebaran memiliki potensi aglomerasi yang kuat.</p>
			Tahu (Rp. 6.210.539,-/bulan)	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten OKI Kabupaten Muara Enim Kota 	

	Prabumulih
Kerupuk (Rp. 4.376.574,- /bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Lubuk Linggau • Kabupaten Lahat • Kabupaten Muara Enim • Kabupaten OKU • Kota Prabumulih
Keripik (Rp. 7.025.004,- /bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Lubuk Linggau • Kota Pagaralam • Kabupaten Lahat • Kabupaten OKI • Kota Prabumulih
Meubel (Rp. 7.006.449,- /bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Musi Banyuasin • Kota Lubuk Linggau • Kota Pagaralam • Kabupaten OKI • Kabupaten Muara Enim • Kabupaten OKU
Konveksi (Rp. 4.676.154,- /bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Musi Banyuasin • Kota Pagaralam • Kabupaten OKI • Kota Prabumulih

Aglomerasi industri kecil di Sumatera Selatan mendorong munculnya banyak jasa pemasok bahan baku di wilayah operasinya. Hal ini berdampak pada penghematan dan kelancaran proses produksi. Aksesibilitas bahan baku yang mudah tersebut sangat mendukung timbulnya penghematan aglomerasi pada industri kecil di Sumatera Selatan.

Aglomerasi industri kecil dapat menimbulkan penghematan-penghematan yang terjadi pada setiap industri yang berlokasi dalam tempat yang sama di kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan berlokasi pada suatu tempat maka akan meminimalkan berbagai biaya seperti biaya dalam mendapatkan bahan baku, promosi dan fasilitas penunjang yang lain. Melihat kondisi yang ada di Sumatera Selatan, keberagaman sektor industri kecil ini telah didukung dengan kemudahan memperoleh bahan baku, sumber tenaga kerja yang berlimpah di lokasi industri, serta biaya pemasaran yang murah. Hal ini mengindikasikan terdapat penghematan lokalisasi akibat letak industri yang saling berdekatan.

Hubungan positif antara aglomerasi industri dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan, terutama untuk industri skala menengah dan besar. Aglomerasi menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi suatu industri di suatu daerah, maka akan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan Nurwita (2003), menemukan bahwa variabel ekonomi aglomerasi industri mempunyai pengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat. Demikian pula dengan tingkat keberagaman industri, memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin beragam jenis kegiatan industri maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya.

Dengan melakukan aglomerasi, industri kecil dapat mengurangi eksternalitas teknologi yang menyebabkan biaya produksi makin

tinggi. Selain itu, akan mempermudah pekerja untuk mencari pekerjaan di daerah aglomerasi, serta mempercepat mobilitas kerja mereka, sebab tempat kerja relatif jadi lebih dekat. Lalu keuntungan lainnya adalah mempercepat distribusi output, sebab para distributor tak perlu kesulitan lagi mencari bahan/ produk yang akan mereka pasarkan di kawasan aglomerasi industri. Kuznets dan Murphy (1966) sudah meramalkan fenomena ini, serta mengaitkan masalah aglomerasi industri dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Konsentrasi geografis memiliki keuntungan tambahan, yaitu menurunkan biaya inovasi akibat persaingan usaha. Lewat perhitungan dan pengujian kompleks dari Martin dan Ottaviano (2001), atas beberapa negara di Eropa, yaitu Inggris dan Italia, pengurangan biaya-biaya inovasi ini berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi negara di kawasan tersebut. Dengan melihat keterangan empiris tersebut, maka dapat disimpulkan aglomerasi industri menjadi alternatif akselerasi pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi bagi negara berkembang, seperti Indonesia, yang masih dalam tahapan *infant industry* yang biasanya masih memiliki banyak masalah, terutama modal dan keahlian yang masih rendah.

4. Kesimpulan

Industri kecil di provinsi Sumatera Selatan, khususnya industri kecil tempe, tahu, kerupuk, keripik, meubel, dan konveksi, memiliki potensi yang untuk kuat melakukan aglomerasi. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai efisiensi yang relatif tinggi, rata-rata upah per bulan tenaga kerja yang berada di atas Upah Minimum Sektoral (UMS) dan rata-rata

biaya bahan baku dan pemasaran per bulan yang murah/ rendah. Lebih spesifik lagi, berdasarkan besaran indikator pengukuran potensi aglomerasi industri dapat dipilah kelompok industri kecil yang memiliki potensi aglomerasi yang paling kuat dibandingkan dengan kelompok industri kecil lainnya adalah kelompok industri kecil meubel dan konveksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkay, E., & Hewings, G. J. D. (2012). The Determinants of Agglomeration for The Manufacturing Sector in The Istanbul Metropolitan Area. *Annals of Regional Science*, 48(1), 225–245. <https://doi.org/10.1007/s00168-010-0370-z>
- Bai, C. E., Du, Y., Tao, Z., & Tong, S. Y. (2004). Local Protectionism and Regional Specialization: Evidence from China's Industries. *Journal of International Economics*, 63(2), 397–417. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(03\)00070-9](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(03)00070-9)
- Borjas, G. J. (2013). *Labor Economics* (6th Editio). Retrieved from www.mhhe.com
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka*. (2018). Retrieved from <http://sumsel.bps.go.id>
- Dirlanudin. (2008). Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Ilmiah Niagara*, 1(2), 1–6.
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. (2017). *Modern labor economics: Theory and Public Policy*. Routledge.
- Fujita, M., Krugman, P. R., & Venables, A. J. (2001). *The spatial economy: Cities, regions, and international trade*. MIT press.
- Graham, D. J., & Kim, H. Y. (2008). An Empirical Analytical Framework for Agglomeration Economies. *Annals of Regional Science*, 42(2), 267–289. <https://doi.org/10.1007/s00168-007-0156-0>
- Hasibuan, N. (1994). *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli, dan Regulasi*. LP3ES.

- Head, K., Mayer, T., Head, K., Mayer, T., Empirics, T., & V, T. H. (2004). The Empirics of Agglomeration and Trade To cite this version: The Empirics of Agglomeration and Trade. In *Handbook of Regional and Urban Economics* (Vol. 4, pp. 2609–2669). Retrieved from <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01027789>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2018). *Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm) Dan Usaha Besar (Ub) Tahun 2012 - 2017*. Retrieved from <http://www.depkop.go.id>
- Kim, S. (1995). Expansion of Markets and the Geographic Distribution of Economic Activities: The Trends in U. S. Regional Manufacturing Structure, 1860-1987. *The Quarterly Journal of Economics*, *110*(4), 881–908. <https://doi.org/10.2307/2946643>
- Kuncoro, M. (2012). *Ekonomika Aglomerasi: Dinamika dan Dimensi Spasial*. In *UPP AMP YKPN Yogyakarta* (1st ed.).
- Kuznets, S., & Murphy, J. T. (1966). *Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread* (Vol. 2). Yale University Press New Haven.
- Li, D., Lu, Y., & Wu, M. (2012). Industrial Agglomeration and Firm Size: Evidence from China. *Regional Science and Urban Economics*, *42*(1-2), 135–143. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.07.003>
- Lu, J., & Tao, Z. (2006). Determinants of industrial agglomeration: Recent evidence from china. *Working Paper. Center for China in the World Economy, and Department of Business Strategy and*

Policy, Tsinghua University, Beijing, China, 1–30.

- Martin, P., & Ottaviano, G. I. P. (2001). Growth and Agglomeration. *International Economic Review*, 42(4), 947–968. <https://doi.org/10.1111/1468-2354.00141>
- Nurwita, A. (2003). *Pengaruh Ekonomi Aglomerasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Sebelum Pemekaran 1991-1999*. Doctoral Dissertation. Universitas Gadjah Mad.
- Ricci, L. A. (1999). Economic geography and comparative advantage: Agglomeration versus specialization. *European Economic Review*, 43(2), 357–377. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(98\)00065-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(98)00065-8)
- Romer, D. (2012). *Macroeconomic theory* (4th Editio). McGraw-Hill Companies.
- Sbergami, F. (2002). Agglomeration and Economic Growth: Some Puzzles. *HEI Working Paper*, (02), 1–34.
- Shihai, Y., & Fen, S. (2014). Dynamic Relationship of Foreign Direct Investment and Manufacturing Industrial Agglomeration. *Journal of Applied Sciences*, 14(2), 158–164.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu.
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Tilaar, S. (2010). Tinjauan Sebaran Lokasi Aglomerasi Industri di Indonesia. *TEKNO*, 07(52), 90–96.
- Xiao-Ling, Y., Yu-Xian, F., & Jie, Q. (2013). A Positive Research on

Spatial Agglomeration of China's Cultural Industries. *Advances in Management & Applied Economics*, 3(3), 245–257. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1399687141>

Yang, C., & Liao, H. (2010). Industrial gglomeration of Hong Kong and Taiwanese Manufacturing Investment in China: A town-level analysis in Dongguan. *Annals of Regional Science*, 45(3), 487–517. <https://doi.org/10.1007/s00168-009-0305-8>

BAB VI

EFISIENSI PERBANKAN

Oleh:

Suhel

1. Pendahuluan

Para ahli ekonomi pada umumnya menggunakan efisiensi Pareto, sebagai alat pengukuran efisiensi kegiatan ekonomi. Menurut ukuran ini, efisiensi ekonomi terjadi jika kegiatan ekonomi menyebabkan keadaan lebih baik bagi kelompok individu tertentu tanpa mengurangi keadaan individu lain. Kondisi ini dapat tercapai jika memenuhi kriteria sebagai berikut ; (1) Marginal Rate Subtitution (MRS) dalam konsumsi harus sama untuk semua konsumen. (2) Marginal Rate of Technical Subtitution (MRTS) dalam produksi harus sama untuk setiap produk. (3) Marginal Cost (MC) harus sama dengan Marginal Revenue (MR) untuk semua proses produksi. Ada beberapa faktor penyebab kegiatan ekonomi menjadi tidak efisien, antara lain : (1) Ketidakefektifan struktur pasar, seperti monopoli, oligopoli. (2) Konsumen atau produsen mungkin memiliki informasi yang tidak lengkap, sehingga akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan konsumsi dan produksi. (3) Adanya eksternalitas. (4) Adanya barang publik yang dibutuhkan masyarakat mungkin tidak diproduksi (Jehle, 2000, hal : 198)

Untuk menentukan kegiatan ekonomi apakah sedang bergerak menuju efisiensi Pareto, dapat dijelaskan dengan menggunakan dua kriteria kompensasi, yaitu kriteria Kaldor dan kriteria Hick. Pada

kriteria Kaldor, efisiensi Pareto terjadi jika individu yang memperoleh keadaan lebih baik secara ekonomi bersedia memberi kompensasi kepada individu yang kurang beruntung. Sementara itu menurut kriteria Hick, efisiensi Pareto terjadi jika individu yang kurang beruntung secara ekonomi bersedia bernegosiasi kepada individu yang mendapat kondisi lebih baik. Kedua kriteria kompensasi tersebut, memandang efisiensi ekonomi dari sudut yang berbeda, Kaldor dari sudut yang diuntungkan secara ekonomi, sedangkan Hick sebaliknya. Jika kedua kriteria kompensasi tersebut disepakati, maka tercapai efisiensi Pareto optimal (Pindyck, 2005, hal :297).

Berkaitan dengan efisiensi perbankan, efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu. Di samping itu, dengan adanya pemisahan antara unit dan harga ini, dapat diidentifikasi berapa tingkat efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi. Dengan diidentifikasi alokasi input dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab inefisiensi (Hadad , 2003). Tulisan ini akan mengkaji secara teoritis tentang efisiensi perbankan. Sistematika adalah konsep efisiensi dalam industri perbankan dan beberapa studi empiris efisiensi perbankan, kesimpulan dan saran.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Efisiensi Dalam Industri Perbankan

Secara umum efisiensi dapat digolongkan menjadi dua yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif, Kumbhakar dan Lovell, (2003). Suatu industri dikatakan efisien secara teknis jika industri tersebut dapat memaksimalkan output atau meminimasi biaya dalam menghasilkan satu unit output. Menurut Koopmans (1951) efisiensi teknis terjadi jika industri dapat menghasilkan lebih banyak output tanpa mengurangi output lain dalam penggunaan inputnya. Selanjutnya efisiensi alokatif berhubungan dengan kombinasi input untuk menghasilkan output optimal pada harga tertentu. Industri dapat meminimalkan biaya dalam upayanya untuk mengoptimalkan keuntungan yang ingin dicapai.

Hal tersebut juga berarti bahwa dalam efisiensi ekonomi, diperlukan efisiensi biaya dan efisiensi keuntungan, Berger dan Mester (1997). Efisiensi biaya pada dasarnya mengukur tingkat biaya suatu industri perbankan dibandingkan dengan *best practice bank's cost* yang menghasilkan output sama dengan teknologi yang sama, Astiyah dan Husman, (2006). Efisiensi biaya diturunkan dari fungsi biaya. Fungsi biaya dengan bentuk persamaan umum (log) sebagai berikut :

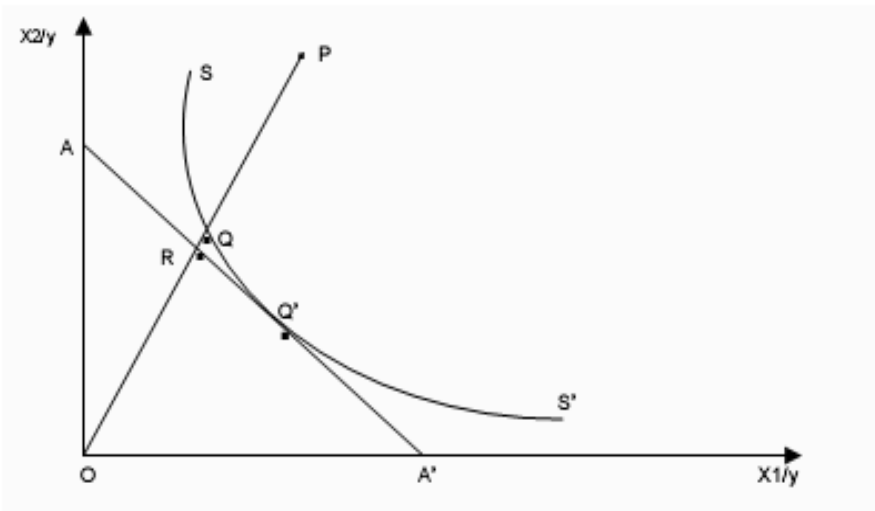
$$\ln C = f(w,y) \dots\dots\dots 1.)$$

Dimana C adalah total biaya suatu bank, w adalah vektor harga input dan y adalah vektor kuantitas output. Sehingga dalam hal efisiensi biaya, misalkan efisiensi biaya bank b, didefinisikan sebagai estimasi biaya dari bank b yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah output jika bank b tersebut beroperasi secara efisien dibandingkan

dengan biaya aktual yang dikeluarkan. Sehingga rasio efisiensi biaya bank b dapat ditulis sebagai berikut :

$$CEFF_b = \frac{\hat{C}_{\min}}{\hat{C}_b} = \frac{\exp[\hat{f}_C(w^b, y^b) + \ln(\hat{u}_{C_{\min}})]}{\exp[\hat{f}_C(w^b, y^b) + \ln(\hat{u}_{C_b})]} = \frac{\hat{u}_{C_{\min}}}{\hat{u}_{C_b}} \dots\dots 2)$$

Biaya minimum tersebut mengindikasikan minimum cost untuk seluruh sampel bank, sehingga hal ini menunjukkan *frontier sample*, C_b = biaya aktual dari bank b. Rasio efisiensi biaya, merupakan proporsi dari biaya yang digunakan secara efisien. Selanjutnya Farrell (1957) juga menggolongkan efisiensi menjadi dua yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Gambar berikut menjelaskan tentang efisiensi teknis dan efisiensi alokatif



Gambar 6.1 Efisiensi Teknik dan Efisiensi Alokatif

Sumber : Hassan, 2003

Berdasarkan pada konsep efisiensi, kombinasi dari dua efisiensi tersebut akan menghasilkan efisiensi ekonomi. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: asumsi yang dipakai adalah satu perusahaan dengan menggunakan dua macam input yaitu X1 dan X2, untuk menghasilkan output Y. Kurva SS' menggambarkan kombinasi input perusahaan yang dapat menghasilkan tingkat efisiensi optimal. Selanjutnya kurva AA' menggambarkan perbandingan antara harga input dengan input pada tingkat pengeluaran yang sama. Dalam gambar tersebut pada titik Q' terjadi efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Pada kondisi ini, biaya yang terjadi adalah minimum yang digambarkan dengan persinggungan *slope* kurva SS¹ dan AA¹.

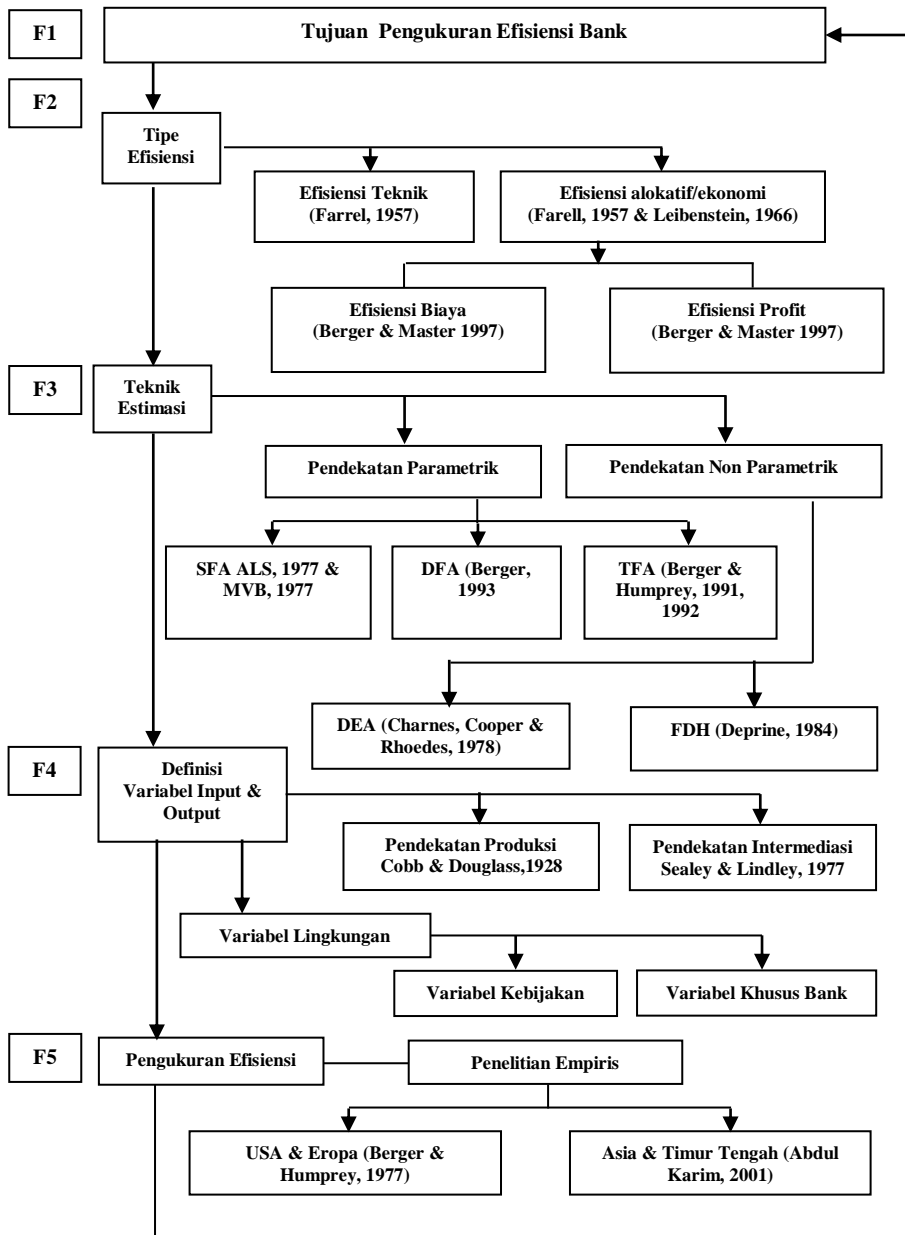
Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa selama pada posisi dimana perusahaan berproduksi dengan menggunakan kombinasi input pada titik P, maka kenaikan efisiensi baik efisiensi teknis maupun efisiensi alokatif. Pada efisiensi teknis terjadi sepanjang pergerakan kurva menuju titik Q. Pada titik tersebut perusahaan dapat memproduksi pada tingkat output sama dengan menggunakan input lebih rendah. Besarnya efisiensi teknis adalah rasio OQ/OP. Pada efisiensi alokatif, titik P memperlihatkan bahwa perusahaan tidak punya pilihan dalam menggunakan kombinasi inputnya pada harga tertentu. Sehingga akan menambah biaya jika memproduksi pada titik Q¹. Efisiensi alokatif dapat dihitung dengan rasio antara OR/OQ. Kemudian pengukuran efisiensi secara keseluruhan / *Overall Efficiency* (OE) menurut Farrell dapat ditulis sebagai berikut :

$$OE = TE \times AE = (OQ/OP) \times (OR/OQ) \dots\dots\dots 3)$$

2.2 Kerangka Analisis Efisiensi Perbankan

Tujuan bagian ini akan menjelaskan kerangka analisis efisiensi perbankan yang memperlihatkan kerangka konseptual dari efisiensi perbankan (gambar 2). Kerangka ini menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan analisis efisiensi perbankan. Sejalan dengan hal tersebut kerangka konseptual dibagi menjadi lima tahap. Tiap-tiap tahap secara substansi menggambarkan tingkat efisiensi produksi. Sebagai contoh tahap satu (F1), menggambarkan objek utama penelitian, yaitu mengkaji tingkat efisiensi perbankan. Dengan pengukuran tingkat efisiensi dapat diketahuui status bank secara individual serta dapat membandingkannya dengan bank lain, seperti yang pernah dilakukan pengukuran efisiensi di perbankan USA dan Eropa, Berger & Humphrey (1997), Goddard, Molyneux & Wilson, (2001), dan juga di beberapa negara berkembang, Saaid (2002) Hussein (2003).

Pada tahap dua (F2) memperlihatkan tipe efisiensi yang digunakan yaitu efisiensi teknik dan efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif kemudian dibagi menjadi dua tipe, yaitu efisiensi biaya dan efisiensi keuntungan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa produsen akan mempertimbangkan efisiensi teknik dalam memproduksi output dengan input yang tersedia. Kombinasi input yang efisien secara teknik akan menjadi pertimbangan Kumbhakar & Lovell, (2003). Selain itu produsen juga mempertimbangkan efisiensi biaya dalam menghasilkan output, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan. Dengan kata lain pertimbangan keuntungan yang optimal menjadi penting dalam mengalokasikan input yang tersedia



Gambar 6.2 Kerangka Konseptual Efisiensi Perbankan

Sumber : Aigner, Lovell, and Schmidt (1977); Meusen & Broeck (1977), Alhabsi (2006).

Tahap tiga (F3) memperlihatkan metodologi yang dipakai dalam mengukur efisiensi. Terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan parametrik dengan menggunakan teknik ekonometrika dan pendekatan non parametrik dengan metode programasi linear. Tiap-tiap pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan. Pendekatan parametrik mempunyai kelebihan dalam pengukuran inefisiensi Pendekatan diperlukan untuk menetapkan bentuk fungsional suatu proses produksi, yang memerlukan fungsi biaya dan fungsi keuntungan. Pendekatan non parametrik lebih sederhana dan mudah dalam perhitungan, karena tidak memerlukan spesifikasi bentuk fungsional Coelli (2004). Disisi lain *frontier* / pembatas merupakan kelemahan sehingga menimbulkan inefisiensi. Metoda parametrik yang umum adalah *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Thick Frontier Approach* (TFA) dan *Distribution Free Approach* (DFA), sementara yang non parametrik adalah *Free Disposal Hull analysis* (FDH) dan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Berger dan Humphrey (1997) menemukan bahwa terdapat 130 aplikasi, lebih dari setengahnya menggunakan teknik nonparametrik dan 60 menggunakan metode parametrik. McAllister & McManus (1993), Mitchell & Onvural (1996) serta Wheelock & Wilson (2001) menguji dan menolak spesifikasi translog fungsi biaya bank, dan menyarankan menggunakan metode *semi nonparametric* atau *nonparametric* untuk mengestimasi fungsi biaya bank. Di lain pihak, Bauer (1998) menemukan teknik nonparametrik tidak ditemukan sebagai persyaratan yang konsistensi, sehingga perlu dipertimbangkan dalam menggunakan model, sebagai contoh DEA dan SFA.

Sebagian besar penelitian, baik yang menggunakan pendekatan nonparametrik atau pendekatan parametrik pada umumnya digunakan untuk penelitian efisiensi industri perbankan. Hal ini karena kedua pendekatan tersebut memiliki perbedaan dalam menganalisis efisiensi, Resti (1997), dan Sturm & Williams (2004). Selanjutnya, Favero & Papi (1995) menyarankan bahwa pendekatan parametrik dan nonparametrik digunakan dalam rangka untuk memperkuat temuan penelitian

Setelah mengetahui konsep efisiensi dan teknik pengukurannya, langkah selanjutnya adalah menentukan variabel input dan variabel output sebelum melakukan pengukuran efisiensi perbankan (lihat tahap empat). Dalam hubungan ini, lebih jauh peneliti akan menemukan dua pendekatan yaitu pendekatan intermediasi dan pendekatan produksi

Pendekatan produksi adalah proses aktivitas perbankan dalam menghasilkan output atau jasa perbankan. Dalam proses produksi tersebut perbankan menggunakan input seperti tenaga kerja dan modal. Sementara itu pendekatan intermediasi adalah persepsi perbankan ketika sebagai intermediasi dalam melayani jasa keuangan dengan asumsi bahwa bank sebagai pengumpul simpanan dengan menggunakan input tenaga kerja dan aktiva milik bank yang lainnya Sealey & Lindley, (1977).

Pendekatan intermediasi ini sesuai untuk diterapkan pada industri perbankan, karena sebagian besar aktifitas perbankan terpusat pada perputaran keuangan, Favero & Papi, (1995). Pendekatan intermediasi ini relatif banyak digunakan dalam penelitian perbankan

Kwan (2002). Sementara itu, dalam memilih pendekatan yang sesuai, Berger & Humphrey (1997) mengusulkan bahwa pendekatan intermediasi adalah paling sesuai untuk mengevaluasi keseluruhan bank karena sudah memasukan variabel biaya bunga. Sementara itu, pendekatan produksi adalah lebih sesuai untuk mengevaluasi efisiensi cabang bank, karena cabang bank memproses dokumen nasabah.

2.3. Beberapa Penelitian Efisiensi Perbankan

Astiyah & Husman (2006), yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisa tingkat efisiensi perbankan di Indonesia dengan menggunakan derivasi fungsi profit. Pengukuran *profit efficiency* dalam penelitian ini telah mencakup model dengan penekanan fungsi intermediasi dan tanpa penekanan fungsi intermediasi. Estimasi pengukuran efisiensi bank menggunakan metode SFA dengan data dari tahun 2001-2004 dan sampel 20 bank berdasarkan aset terbesar. Hasil temuannya adalah sebagai berikut: 1) Secara umum tingkat efisiensi bank dengan pendekatan kedua model cenderung tinggi, yaitu mencapai sekitar 90 %. 2) Rata-rata efisiensi dari model dengan penekanan intermediasi lebih rendah dari model tanpa menggunakan intermediasi, namun keduanya memiliki standar deviasi yang cenderung sama.

Rata-rata efisiensi untuk efisiensi keempat tahun penelitian menggunakan model non-intermediasi ialah 92.4 %, sementara hasil model dengan intermediasi ialah sebesar 91.4 %. Lebih tingginya rata-rata tingkat efisiensi tanpa penekanan intermediasi mengindikasikan bahwa komponen kredit memberikan kontribusi yang lebih rendah

kepada profitabilitas jika dibandingkan dengan output lainnya. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa bank belum menempatkan kredit sebagai komponen utama dalam kegiatan usahanya. 4) Dari sisi bank, bank yang berasal dari kelompok bank asing cenderung memiliki nilai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank lainnya, khususnya dengan model tanpa penekanan intermediasi.

Hadad dkk (2003), melakukan penelitian dengan judul “Pendekatan Parametrik Untuk Efisiensi Perbankan Indonesia”, dengan untuk mengidentifikasi apakah penggabungan usaha (*merger*) bank di Indonesia secara empiris mendorong peningkatan efisiensi dari bank-bank di Indonesia. Untuk menghitung efisiensi penelitian ini menggunakan metode parametrik dengan pendekatan SFA dan DFA. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 167 bank dengan data bulanan dari Januari 1995 sampai dengan Juni 2003 (17034 observasi).

Fungsi biaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi biaya translog dengan dua macam fungsi; pertama, data yang tidak dikelompokkan untuk menghasilkan skor efisiensi hasil perbandingan seluruh bank di Indonesia. Kedua, data yang dikelompokkan berdasarkan kategori bank, yang akan menghasilkan skor efisiensi hasil perbandingan bank-bank dalam satu kelompok dan kategori bank mana yang paling efisien. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut Hasil perhitungan dengan menggunakan 167 observasi cross section dan periode data bulanan dari Januari 1995 sampai dengan Juni 2003 dengan metode parametrik, tidak memungkinkan untuk digunakannya bentuk fungsi

fourier flexible karena keterbatasan memori dari perangkat lunak views. Langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengubah bentuk fungsi *fourier flexible* menjadi bentuk fungsi translog.

Berdasarkan metode parametrik, skor efisiensi DFA lebih beragam dibandingkan dengan skor efisiensi SFA, jika digunakan data bulanan dan data tahunan yang menggabungkan seluruh bank. Namun demikian, bank-bank yang paling efisien yang dihasilkan dengan menggunakan kedua metode adalah sama. Sehingga perhitungan dengan menggunakan DFA dan SFA jika menggunakan observasi seluruh bank menghasilkan nilai-nilai yang konsisten.

Hasil perhitungan efisiensi berdasarkan SFA dan DFA dengan menggunakan data bank yang dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan kategorinya, menghasilkan hasil perhitungan yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini sangat mungkin disebabkan kurangnya cross section observation yang digunakan, sehingga keragaman data berkurang. Hasil perhitungan ini juga menyimpulkan bahwa bank dengan kategori bank asing campuran merupakan kategori yang paling efisien dibandingkan dengan kategori lainnya.

Amirillah, (2010), melakukan penelitian dengan judul Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2005 – 2009. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor penyebab perbedaan nilai efisiensi perbankan syariah di Indonesia yang dibandingkan secara relatif untuk setiap periode. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data keuangan perbankan syariah yang diperoleh dari Bank Indonesia kemudian dibagi menjadi

variabel input dan output. Penentuan variabel input dan output pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Value Added Approach*, dimana *Value Added Approach* adalah penentuan variabel input dan output bank berdasarkan tujuan bank untuk menghasilkan nilai tambah (keuntungan) yang maksimal. Variabel input outputnya terdiri dari : Giro iB, Tabungan iB, Deposito iB, Modal disetor , Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada bank lain, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah dan Qardh.

Kesimpulan penelitian ini menghasilkan nilai efisiensi perbankan syariah di Indonesia (tidak termasuk BPRS) pada periode Januari 2005 sampai Desember 2009. Kelemahan di dalam penelitian ini tidak bisa memberi saran secara khusus untuk masing-masing bank sebab data diperoleh berupa kumpulan data perbankan syariah (tidak meliputi BPRS). Dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis ini, efisiensi perbankan syariah di Indonesia selama tahun 2005-2009 mengalami efisiensi rata-rata sebesar 99,94 persen

Iswadi (2002), Meneliti tentang tingkat efisiensi berbagai bank devisa di Indonesia pada tahun 2001-2002, dengan metode DEA. Input variabel yang digunakan adalah beban bunga, beban operasional, beban operasional lainnya sedangkan variabel output adalah pendapatan bunga, pendapatan operasional lainnya dan pendapatan non operasional. Dengan sampel 45 bank, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahun 2001 dan 2005 kurang dari 50 % bank devisa yang mengelola input outputnya dengan efisien.

Peningkatan efisiensi tahun 2002 rata-rata mencapai 3,11 % . Pada tahun 2001 nilai efisiensi bank devisa terendah adalah 37,5 % dan tertinggi yaitu 100 % sedangkan pada tahun 2002 nilai efisiensi terendah adalah 28,29 % dan tertinggi 100 % . Rata-rata efisiensi perbankan devisa dari hasil penelitian ini adalah 71,26 % pada tahun 2001, sedang tahun 2002 rata-rata efisiensinya adalah 74,37 % Ditinjau dari kelompok bank dan rata-rata efisiensi knerja pada tahun 2001 dan 2002, berturut-turut kelopmok bank devisa asing yang paling baik, kemudian bank devisa campuran, kelompok devisa pesero dan kelompok bank devisa swasta.

Wibowo (2003), melakukan penelitian dengan judul Mengukur efisiensi perbankan syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah di Indonesia. Variabel inputnya adalah bunga, biaya lainnya dan aset. Variabel outputnya yaitu pendapatan bunga, pendapatan lainnya dan kredit. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 10 bank tersebut, BUS merupakan bank paling efisien dalam menjalankan operasionalnya bahkan apabila dibandingkan dengan bank konvensional tidak kalah baik kinerjanya

Yudistira (2003), Meneliti tentang tingkat efisiensi 18 perbankan syariah di berbagai negara selama 4 tahun dari tahun 1997 – 2000. Input yang digunakan terdiri atas upah tenaga kerja, aset tetap, dan total deposito sedangkan outputnya terdiri atas total pinjaman, pendapatan lainnya dan *asset liquid*. Temuan dari penelitian ini adalah pada tahun 2000 merupakan tahun yang paling efisien. Industri perbankan syariah telah berpengalaman menunjukkan inefisiensi pada tahun 1998 dan 1999 rata-rata sebesar 0,870 dan

0,897 dibandingkan dengan tahun 1997 dan 2000 yaitu rata-rata sebesar 0,902 dan 0,909 lebih berpengaruh kepada inefisiensi secara teknis daripada skala efisiensi yang ada. Untuk menganalisis besarnya hubungan antara efisiensi dan skala, bank-bank Islam yang memiliki total aset lebih dari \$600 milyar dikategorikan bank besar dan bank-bank yang memiliki total aset di bawah \$ 600 milyar dikategorikan sebagai bank kecil. Jika dilihat dari skala efisiensi, dapat terlihat jelas bahwa skala inefisiensi (*diseconomies of scale*) terjadi pada bank-bank besar, dengan skala terendah sebesar 0,915 pada tahun 1998.

Hassan (2003), Meneliti tingkat efisiensi industri perbankan Islam di Pakistan, Iran dan Sudan dengan menggunakan data panel tahun 1994-2001. Parameter yang digunakan untuk menghitung efisiensi dari bank-bank ini adalah biaya dan keuntungan dengan menggunakan DEA. Lima faktor efisiensi dalam DEA seperti biaya, alokasi, teknis, murni teknis dan nilai dari besarnya efisiensi telah dihitung dan dihubungkan dengan teknik akuntansi yang ada. Dari hasil temuan, menunjukkan bahwa rata-rata industri perbankan Islam relatif kurang efisien jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelima faktor efisiensi yang ada sangat berhubungan dengan ROA dan ROE. Dengan hipotesis bahwa faktor-faktor efisiensi tersebut bisa digunakan dengan baik melalui perbandingan-perbandingan secara akuntansi yang menggambarkan kinerja yang ada di Pakistan, Iran dan Sudan.

Priyonggo (2008), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efisiensi dan Skala Ekonomi Pada Industri Perbankan

Syariah di Indonesia, dengan menggunakan DEA. Kesimpulannya, secara umum perbankan syariah di Indonesia tahun 1999 – 2004 cukup efisien. Dari 10 bank yang diteliti, tingkat inefisiensi rata-rata hanya sekitar 7 persen. Kedua tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat efisiensi perbankan umum syariah dan unit usaha syariah. Ketiga dalam perkembangan 6 tahun terakhir ini terdapat peningkatan efisiensi perbankan syariah rata-rata 2,3 % per tahun. Di sisi lain tidak ditemukan bahwa tidak terdapat skala ekonomis dalam perbankan syariah di Indonesia. Hal ini berarti tidak ada kecenderungan dengan semakin tingginya skala usaha maka akan semakin meningkat efisiensinya

Shamsher dkk (2003), melakukan penelitian untuk mengukur dan membandingkan efisiensi biaya dan efisiensi profit pada 80 bank yang ada dalam wilayah 21 negara-negara Organisasi Konferensi Islam, yang terdiri atas 37 bank konvensional dan 43 bank Islam dengan menggunakan pendekatan SFA. Selain itu mengkaji tingkat efisiensi berdasarkan ukuran, umur bank dan wilayah. Variabel input terdiri atas Tenaga kerja, Aset dan total pembiayaan (total funds). Variabel output terdiri atas total pinjaman, penerimaan aset lain dan *off balanced sheet items*. Dari hasil temuannya menunjukkan bahwa secara substansi terdapat peningkatan efisiensi dalam biaya dan keuntungan dalam kedua sistem perbankan. Tingkat efisiensi bank secara rata-rata lebih baik dalam menggerakkan profit yang diperoleh daripada penggunaan dalam sumber daya yang ada.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa efisiensi profit lebih stabil daripada efisiensi biaya. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan

secara signifikan tingkat efisiensi antara bank konvensional dan bank Islam. Secara substansi masih ada ruang untuk meningkatkan profit dan meminimalkan biaya dalam kedua sistem perbankan tersebut. Selain itu diperoleh juga, tidak ada perbedaan secara signifikan skor efisiensi antara kedua sistem tersebut berdasarkan ukuran, umur dan wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran dan umur bank tidak berpengaruh terhadap kinerja dalam kedua sistem perbankan tersebut. Dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan lebih berpihak pada sistem perbankan Islam.

Mariani dkk (2008), melakukan penelitian dengan judul *The Efficiency and Productivity of Malaysian Banks: An Output Distance Function Approach*. Pendekatan yang digunakan adalah SFA untuk menganalisis bank-bank komersial di Malaysia selama periode 1996 – 2002 dan terutama fokus terhadap kinerja dari perbankan Islam. Dengan menggunakan efisiensi neto dan efisiensi bruto untuk mengestimasi. Dengan demikian dapat dijelaskan karakteristik output dari perbankan di Malaysia. Selain itu juga mendekomposisi perubahan produktivitas ke dalam efisiensi teknik dan skala ekonomi dengan menggunakan Malmquist indeks produktivitas. Dari hasil temuan yang diperoleh rata-rata terjadi penurunan skala dan produktivitas sekitar 2,37 % per tahun di perbankan Malaysia.

Estimasi efisiensi menyarankan bahwa perbankan Islam berhubungan dengan persyaratan input yang lebih tinggi. Ditambahkan estimasi produktivitas mengindikasikan bahwa baik perbankan Islam dan Konvensional masih relatif rendah sehingga seringkali mengalami kerugian. Ditemukan pula bahwa merger antarbank justru terjadi

penggunaan input lebih tinggi dan produktivitas semakin rendah., sehingga merger antarbank tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja perbankan di Malaysia. Krisis ekonomi dan keuangan di Asia Tenggara selama tahun 1998 berdampak negatif terhadap kinerja perbankan di Malaysia yaitu dengan semakin meningkatnya kredit bermasalah (*nonperforming loans*).

Yaumidin (2007), melakukan penelitian dengan tujuan untuk membandingkan tingkat efisiensi bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Hal ini didasari pada kegagalan perbankan yang mendorong terjadinya krisis keuangan domestik maupun internasional dalam dasawarsa terakhir. Efisiensi perbankan akhirnya menjadi perhatian penting tidak hanya di Asia setelah krisis di tahun 1997, namun juga di belahan dunia lainnya. Di sisi lain perkembangan bank-bank Islam kiranya telah dianggap sebagai alternatif solusi untuk menuju perbankan yang sehat. Dengan demikian, studi tentang efisiensi bank-bank Islam menjadi kajian menarik, terutama perbandingan efisiensi antar kawasan. Dalam paper ini digunakan metode non parametrik

Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi skor data panel yang mencakup empat puluh delapan bank Islam selama kurun waktu 2000 hingga 2004. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan intermediasi yang dianggap paling sesuai dengan prinsip-prinsip sistem keuangan Islam. Secara keseluruhan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa bank-bank Islam di Asia Tenggara sedikit lebih efisien dibandingkan bank-bank Islam di Timur Tengah. Salah satu penyebabnya adalah tragedi 9/11 di tahun

2001 dan perang Iraq yang berlangsung di tahun 2002. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bank-bank Islam masih sangat tergantung pada sistem keuangan dan segala bentuk peraturan perbankan yang berlaku baik di tingkat nasional, regional maupun global, serta karakteristik perbedaan resiko yang berkonsekuensi pada perbedaan regulasi prudential sangat menentukan fluktuasi skor efisiensi.

Ascarya & Yumanita (2008), mengemukakan dalam penelitiannya dengan membandingkan efisiensi bank Islam di Malaysia dan Indonesia dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan metodologi deterministik untuk menentukan efisiensi relatif. Pendekatan intermediasi digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan Islam di Malaysia lebih awal 10 tahun daripada perbankan Islam di Indonesia, oleh karena itu aset perbankan Islam di Malaysia 16 kali lebih besar daripada perbankan Islam di Indonesia.

Di Malaysia, efisiensi telah mencapai 92 %, secara keseluruhan efisiensi sekitar 74 % pada periode 2002 – 2005 dimana perbankan Islam besar lebih efisien daripada perbankan Islam ukuran kecil. Bank menguntungkan cenderung untuk [menjadi] bank efisien. 715 bank Islam Malaysia beroperasi dalam skala diseconomies pada tahun 2005, terutama bank Islam kecil dan bank asing.

Perbankan Islam Indonesia secara keseluruhan efisiensi mencapai 85%, terutama karena adanya peningkatan dalam skala efisiensi. Efisiensi Teknis lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan Islam di Malaysia. Walaupun demikian masih terjadi

penurunan efisiensi sebesar 86 % tahun 2002 menurun menjadi 58 % pada tahun 2005. Perbankan Islam yang paling efisien adalah bank yang usianya sudah relatif lama sejak berdirinya. Tenaga kerja adalah masalah prioritas yang harus selalu mendapat prioritas pada perbankan Islam di Indonesia. Bank Islam juga memerlukan yaitu secara organik dan secara anorganik untuk meningkatkan skala efisiensinya

Batchelor & Wadud (2004), melakukan penelitian dengan judul *Technical And Scale Efficiency Of Islamic Banking Operations In Malaysia : An Empirical Investigation With A Longitudinal Perspective*, menjelaskan bahwa peningkatan kompetisi dari globalisasi dan kecenderungan menuju ke arah konsolidasi, diversifikasi dan rasionalisasi, penelitian yang berkaitan dengan efisiensi paling relevan di konteks perbankan Islam Malaysia, dimana semua bank komersial beroperasi dalam skema perbankan Islam.

Dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA), penelitian ini menganalisis tingkat efisiensi Sistem perbankan Islam Malaysia. Terutama efisiensi teknis dan efisiensi skala. Selanjutnya, skema perbankan Islam dioperasikan pada bank komersial domestik dan asing. Tingkat efisiensi bank asing lebih tinggi daripada bank komersial domestik baik diukur dengan efisiensi teknik maupun skala efisiensi. Sementara itu perbankan Islam mengalami inefisiensi dalam hal skala. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan perlu adanya perencanaan strategis untuk meningkatkan efisiensi perbankan Islam pada masa yang akan datang.

Hussein (2003) melakukan penelitian dengan mengestimasi tingkat efisiensi pada 17 bank di Sudan antara tahun 1990 – 2000.

Dengan menggunakan pendekatan stochastic cost frontier Hasil temuannya adalah menunjukkan bahwa bank Islam itu tidak menciptakan inefisiensi Lagi pula, walaupun efisiensi rata-rata adalah hampir stabil antara 1990-2000, namun terdapat perbedaan tingkat efisiensi pada perbankan di Sudan. Bank asing ukuran kecil lebih efisien daripada bank milik pemerintah. Perbankan di Sudan tidak siap dalam menghadapi globalisasi Selain itu diuji juga sumber terjadinya inefisiensi.

Beberapa temuan dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, peningkatan saham asing dan bank Sudanese harus meningkatkan efisiensi biaya dalam sektor perbankan. Kedua, dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi, perbankan harus meningkatkan capital output rasio tetapi tidak melalui penggabungan dan akuisisi. Ketiga, Bank Sudanese mempunyai satu keuntungan dalam keuangan murabaha dan musharaka yang tidak secara penuh dimanfaatkan Keempat, Bank Sudanese harus menerapkan program secara serius untuk pengembangan sumber daya manusia dalam rangka untuk mengurangi inefisiensi

Heralina (2005) mengadakan penelitian dengan judul Pengukuran efisiensi perbankan syariah mengestimasi fungsi biaya perbankan. Secara teoritis, dengan mengestimasi fungsi biaya, dapat diukur biaya minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu dengan menggunakan tingkat harga input tertentu. Fungsi biaya yang diestimasi secara ekonometris ini merupakan cost frontier. Skor efisiensi suatu bank pada waktu tertentu dihitung dengan dua pendekatan yaitu SFA dan DFA. Error term dari

estimasi fungsi biaya suatu bank dibandingkan dengan error term dari estimasi fungsi biaya bank yang paling efisien dalam sampel. Hasil perhitungan efisiensi biaya menunjukkan bahwa skor efisiensi perbankan syariah di Indonesia antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 berkisar antara 50% sampai 90%.

Berdasarkan analisis alokasi input, terlihat bahwa bagi hasil merupakan komponen biaya yang paling berpengaruh terhadap struktur biaya perbankan syariah. Berdasarkan jenis bank, skor efisiensi rata-rata Bank Umum Syariah lebih tinggi dari pada efisiensi rata-rata Unit Usaha Syariah. Estimasi fungsi biaya dapat diturunkan untuk menganalisis *Economies of Scale* dan *Economies of Scope*. Secara rata-rata bank syariah telah mencapai kondisi *Economies of Scale* dan positif *Economies of Scope*. Perbandingan efisiensi perbankan syariah dengan efisiensi bank konvensional menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah tidak berbeda nyata dengan efisiensi beberapa bank konvensional yang menjadi referensi.

Abidin (2007), melakukan penelitian dengan tujuan mengevaluasi kinerja efisiensi 93 bank umum di Indonesia pada periode tahun 2002 hingga tahun 2005. Metode analisis yang digunakan adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil temuan menunjukkan Kinerja bank merupakan concern bersama baik dari sisi pengelola, masyarakat maupun para pengambil keputusan. Beberapa hasil paper sering mempublikasikan kinerja bank keuangan namun hanya sedikit sekali tinjauan kinerja efisiensi pada bank umum. Tujuan paper ini untuk mengevaluasi kinerja efisiensi pada bank umum.

Dari hasil temuan tampak bahwa kelompok bank BUMN (Pemerintah) dan Bank Asing lebih bagus kinerja efisiensinya dibandingkan kelompok bank lain. Bank BUMN yang mempunyai jaringan bank sangat besar dan luas dan yang notabene dekat dengan para pengambil keputusan membuat bank tersebut berkinerja lebih baik. Di lain pihak Bank Asing yang mempunyai kelebihan jaringan dan management yang berskala internasional membuat bank kelompok ini mempunyai kinerja yang bagus pula. Diharapkan paper ini bermanfaat bagi para pengelola sebagai *benchmarking* yang mengarahkan bank untuk menjadi lebih baik, sedangkan bagi para pengambil keputusan sebagai alat analisa pelengkap didalam menilai kinerja suatu bank.

Bachruddin (2006) melakukan penelitian dengan mencoba menganalisis perbedaan dalam tingkat efisiensi antara perbankan syariah dan konvensional di Indonesia periode 2003-2004. Tingkat efisiensi dicerminkan dengan *Rate of Return* (ROE), dalam hal dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga faktor yaitu *Profit Margin* (PM), *Asset Utilization* (AU) dan *Equity Multiplier* (EM). Penelitian ini didasarkan atas data sekunder yaitu laporan keuangan dari kedua jenis perbankan tersebut.. Kemudian lebih lanjut sampel dirinci menjadi 4 bank syariah dan 4 bank konvensional. Alat analisis yang digunakan terdiri atas dua yaitu Uji Varian yaitu untuk menganalisis ROE dari kedua jenis bank tersebut. Kemudian analisis regresi linear untuk menghitung pengaruh PM, AU dan EM terhadap ROE

Dari hasil analisis dapat dikemukakan temuan penelitian bahwa hipotesis kesatu dapat dibuktikan yaitu terdapat perbedaan

yang berarti antara ROE pada Bank Syariah dengan ROE pada bank konvensional. Hal ini dapat dilihat pada nilai statistik dengan t -hitung (sebesar 5,580) pada tingkat signifikansi (sebesar 0,000).. Makna dari temuan ini mencerminkan bahwa tingkat efisiensi (dengan proksi ROE) dari operasi Bank Syariah, berbeda secara berarti dibandingkan dengan tingkat efisiensi operasi bank konvensional. Dari penelitian ini dapat pula dicatat bahwa ROE rata-rata dari Bank Syariah (sebesar 11,71%) lebih rendah dibanding dengan ROE rata-rata bank konvensional (sebesar 29,36%). Namun ditinjau dari deviasi-standar dari ROE, Bank Syariah (sebesar 10,42%) lebih kecil dibanding dengan bank konvensional (sebesar 14,34%). Hal ini memberi makna bahwa tingkat risiko dari operasi Bank Syariah lebih rendah dibanding dengan bank konvensional.

Pada Bank Syariah dapat dikemukakan temuan penelitian bahwa komponen-komponen *Profit Margin* (PM); *Asset Utilization* (AU) dan *Equity Multiplier* (EM) secara serempak memiliki pengaruh yang berarti terhadap ROE. Hal ini dapat dilihat pada F Statistik (sebesar 15,118) dengan tingkat signifikansi (sebesar 0,000). Temuan ini memberi makna bahwa kebijakan-kebijakan pada bidang manajemen pemasaran (dengan proksi PM), bidang manajemen aktiva (dengan proksi AU) dan bidang manajemen pasiva (dengan proksi EM) memberikan peranan yang berarti dalam pencapaian tingkat efisiensi (dengan proksi ROE) pada Bank Syariah. Adapun kontribusi terbesar dalam pencapaian ROE adalah dari PM ($t = 5,477$), lalu disusul dari AU ($t = 3,766$) dan dari EM ($t = 3,475$).

Pada Bank konvensional dapat diungkapkan temuan penelitian bahwa komponen-komponen PM, AU dan EM secara serempak tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap ROE. Hal ini dapat dilihat pada nilai F Statistik (sebesar 1,560) dengan signifikansi (sebesar 0,221). Temuan ini merefleksikan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh bank konvensional dibidang manajemen pemasaran, manajemen aktiva dan manajemen pasiva tidak memberikan peranan yang berarti terhadap tingkat efisiensi yang dicapai. Sementara itu, komponen yang memberikan kontribusi yang berarti hanya dari PM (signifikansi sebesar 0,044). Sedangkan dari komponen-komponen AU dan EM tidak memberikan kontribusi yang berarti.

Syahrum dkk (2006) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi perbankan Islam dan Konvensional di Malaysia, ditemukan bahwa jumlah aset, deposito dan pembiayaan berkembang pesat selama periode 1997-2003. Untuk menganalisis penelitian ini menggunakan SFA untuk mengukur teknik dan cost efisiensi. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa secara keseluruhan industri perbankan meningkat selama periode penelitian, sementara perbankan konvensional relatif stabil. Kemudian jika dilihat dari tingkat efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi perbankan Islam masih lebih rendah daripada perbankan konvensional. Perbankan Islam penuh lebih efisien daripada usaha unit. Perbankan asing lebih efisien daripada bank komersial domestik

Suhaimi (2008), melakukan penelitian dengan mencoba menganalisis keberartian variabel K-conomy terhadap efisiensi biaya

pada perbankan komersial di Malaysia. Efisiensi profit perbankan komersial di Malaysia dimana variabel dependen diestimasi dengan menggunakan SFA dan menggunakan data panel 23 perbankan komersial antara tahun 1995-2005 *Hausman exogeneity test* spesifikasi adalah dilakukan untuk memeriksa *exogeneity* atau *endogeneity* variabel k-ekonomi yang dipertimbangkan, kemudian ditentukan spesifikasi model. Berdasarkan temuan empiris, Variabel *K – economy* kemudian disebut dengan Infrastruktur efisien, pengetahuan tenaga kerja dan informasi dan pengeluaran untuk teknologi komunikasi adalah ditemukan lemah *exogenous*. Ini menolak teori pertumbuhan endogen dan mendukung teori neo klasik Dalam model Neo klasik, teknologi komunikasi dan informasi ditemukan dengan mudah meningkat efisiensi profit sedangkan pengeluaran non teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap profit efisiensi perbankan. Penegluaran untuk pelatihan ditemukan signifikan mengurangi tingkat profit efisiensi

Christopoulos & Tsionas. (2001) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis inefisiensi teknik dan alokatif dalam periode deregulasi di sektor perbankan di Yunani. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah para menejer dan pengambil kebijakan, hal ini karena berkaitan dengan restrukturisasi istem keuangan yang terintegrasi ke dalam zona euro. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model stokastik *heteroscedastic frontier*, selain itu digunakan juga efisiensi alokatif dalam model tersebut. Model-model ini diterapkan untuk mengestimasi fungsi biaya dalam sektor perbankan. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa inefisiensi

mendekati 20 persen dan inefisiensi alokatif yang merupakan bagian dari biaya rata-rata sebesar 14 persen, Kedua variabel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam deregulasi. Hasil penelitian ini menyarankan perlu peningkatan keuntungan sektor perbankan, serta peningkatan daya saing dalam lingkungan sistem keuangan Eropa.

Altunbas dkk (2001) menganalisis efisiensi perbankan di Eropa.dengan menggunakan *stokastic cost frontier* untuk mengestimasi skala ekonomi, X efisiensi dan perubahan teknik untuk sampel besar pada bank di Eropa antara tahun 1989 dan 1997. Hasilnya diperoleh menjelaskan bahwa skala ekonomi tersebar luas untuk bank kecil dengan ukuran aset antara 1 milyar sampai dengan 5 milyar. Secara tipikal, skala ekonomi ditemukan antara 5% dan 7%, sementara ukuran x-inefisiensi jauh lebih lebih besar yaitu antara 20% dan 25%..

X-inefisiensi juga tampak bervariasi lebih besar perbedaan dalam ukuran bank untuk seluruh waktu. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah mempengaruhi pasar perbankan lintas negara di Eropa antara tahun 1989 dan 1997, pengurangan biaya total sekitar 3 persen. Dampak dari kemajuan teknologi juga mengurangi biaya bank dan juga memperlihatkan kenaikan secara sistematis pada ukuran bank. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk seluruh ukuran bank harus memperbesar saving melalui pengurangan managerial dan inefisiensi.

Ya-Hui & Kehluh (2004) melakukan analisis efisiensi biaya, skala ekonomi dalam lingkup industri perbankan di Taiwan. Pusat kajiannya terutama pada merger bank yang akan menentukan efisiensi

biaya. Dengan menggunakan analisis stochastic frontier dan fungsi biaya translog untuk estimasi efisiensi. Temuannya adalah bahwa skala ekonomi dan lingkup keberadaan bank kecil dan menengah, Sementara itu, bank milik pemerintah atau yang diawasinya, paling efisien biayanya. Non-performing loans meningkatkan inefisiensi di sektor perbankan yaitu dibawah 10 persen. Analisa lebih lanjut mengungkapkan aktivitas merger bank berhubungan positif dengan efisiensi biaya. Merger dapat meningkatkan efisiensi biaya.

Mullineaux (1978) menerapkan dualitas antara fungsi produksi dengan fungsi keuntungan terhadap karakteristik fungsi produksi perbankan. Fungsi produksi seluruh bank pada *increasing returns to scale*. Fungsi produksi pada unit bank menunjukkan skala ekonomi yang lebih potensial daripada di tingkat cabang bank. Bank dalam multi-bank holding company lebih menguntungkan daripada rekanan non-holding-company, dan secara ekonomi lebih efisien. Industri perbankan ditandai dengan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Hipotesis yang mendasari *Cobb-Douglas production function* tidak ditolak dengan data yang ada.

Ferrier (1990) dalam penelitiannya untuk mengestimasi ekonomi produksi dan tingkat efisiensi dengan pendekatan Ekonometrik dan Linear Programming. Pendekatan ekonometrik memerlukan estimasi dari cost frontier. Pendekatan Linear programming menghitung produksi frontier. Data yang digunakan terdiri atas 575 bank yang ikut berpartisipasi dalam *Federal Reserve System's Functional Cost Analysis program in 1984*. Dari hasil temuannya menggunakan dua teknik tersebut, menunjukkan bahwa

cost economies yang sama, dan biaya efisiensi yang berbeda. Temuan ini penting dalam rangka pengambilan kebijakan dan mengevaluasi dari dua tipe pendekatan tersebut. Seperti diimplementasikan bahwa hanya satu dari dua pendekatan yang mampu menjelaskan diversifikasi ekonomi. Dua pendekatan dapat menimbulkan biaya inefisiensi jika dimasukan teknik dan alokatif sebagai komopnen yang berbeda, tidak ada hubungan rangking bank dengan inefisiensi teknik.

Yang Li dkk (2004), melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis efisiensi produksi perbankan di Taiwan. Pada awal 1990-an, Taiwan mulai mengadakan deregulasi dalam rangka untuk meningkatkan kompetisi dan efisiensi ekonomi bagi semua industri. Dengan menggunakan satu kerangka teoritis untuk meramalkan kemungkinan dalam efisineis teknik publik, mixed dan private bank. Dengan menggunakan panel data 43 Taiwanese banks periode 1997-1999 untuk menganalsisnya. Kemudian dengan mengaplikasikan fungsi translog untuk mengestimasi efisiensi teknik. Hubungan antara efisiensi teknik dan pemerintah sebagai shareholding juga dapat dijelaskan. Dari hasil empirik menunjukkan, bank umum di Taiwan dapat meningkatkan efisiensi tekniknya dengan cara kepemilikan mixed pada saat terjadi penurunan. Bank di Taiwan rata-rata memiliki performan yang buruk setelah krisis finansial tahun 1997 yang melanda kawasan Asia.

Evanoff (1995) dalam penelitiannya dengan tujuan untuk menganalisis skala elastisitas dan skala efisiensi pada industri perbankan. Proses produksi bank adalah salah satu dari aspek

perilaku bank yang sebagian besar secara ekstensif diteliti. Penelitian tidak secara tipikal mengevaluasi skala efisiensi. Skala inefisiensi adalah secara tipikal diasumsikan memiliki hubungan linear dengan skala elastisitas. Elastisitas dan efisiensi adalah dua konsep yang berbeda. Hubungan keduanya dapat diselidiki. Tingkat efisiensi baru mengukur empirik dari aplikasi kelompok bank besar di USA dan dibandingkan dengan hasil temuan terdahulu. Sebagai hasil temuan adalah dengan menggunakan pendekatan elastisitas atau skala efisiensi adalah tidak sesuai dan dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan tentang inefisiensi. Hal ini adalah terutama pada satu industri, seperti perbankan, dimana memiliki jangkauan dan ukuran perusahaan yang luas.

3. Kesimpulan

Pada awalnya evaluasi kinerja efisiensi perbankan diukur dengan menggunakan ratio keuangan. Tetapi penilaian efisiensi tidak dapat hanya dilakukan secara parsial tetapi secara penuh dengan memperhitungkan seluruh output dan seluruh input. Oleh karena itu pengukuran efisiensi dapat digunakan dengan analisis parametrik seperti SFA yang paling populer diantara analisa parametrik lainnya, dan non parametrik, yaitu DEA. Sedangkan DEA adalah analisis non parametrik yang merupakan pengembangan dari matematika linear programming. Meskipun menggunakan variabel input dan output yang sama, terdapat perbedaan antara DEA dan SFA, hal ini karena pendekatan SFA memasukkan random error pada frontier, sementara pendekatan DEA tidak memasukkan random error.

Sebagai konsekuensinya, pendekatan DEA tidak dapat memperhitungkan faktor-faktor variabel makro seperti perbedaan besar kecilnya suatu aset perbankan bank ataupun peraturan-peraturan yang memengaruhi tingkat efisiensi suatu bank.

Pendekatan parametrik SFA. Menurut pendekatan ini, yang dimaksud *stochastic frontier* adalah suatu frontier yang menggambarkan maksimum output yang bisa dihasilkan oleh sejumlah input. Aktual output akan tepat berada pada frontier bila faktor input digunakan secara efisien. Bila tidak, maka aktual output akan berada dalam frontier. Semakin besar gap/ selisih antara frontier dengan aktualnya berarti semakin tidak efisien dalam penggunaan input. Dalam perjalanannya, gap ini bisa menyempit atau melebar. Perubahan ini bisa disebabkan oleh peningkatan efisiensi dalam penggunaan faktor input atau bisa juga disebabkan oleh pergeseran frontier yang disebabkan oleh kemajuan penggunaan teknologi.

Pendekatan SFA ini telah digunakan secara luas oleh para peneliti dalam mengevaluasi atau mengukur tingkat efisiensi perbankan, khususnya tingkat efisiensi yang berkaitan dengan efisiensi biaya dan efisiensi profit. Kelebihan dari pendekatan SFA adalah mencakup *random noise* yang berkaitan dengan permasalahan pengukuran dan sistematis dalam perbedaan antarbank sebagai contoh heterogenitas yang dimiliki masing-masing bank. Hal ini memungkinkan adanya perbandingan antarbank seperti perbandingan antara bank konvensional dengan bank Islam, bank besar dan bank kecil.

Daftar Pustaka

- Aida Heralina, 2005. *Perbandingan Efisiensi Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia*, Tesis (tidak dipublikasikan) Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta <http://www.digilib.ui.ac.id>.
- Aigner, D.J., Lovell, C.A.K. & Schmidt, P. (1977). *Formulation And Estimation Of Stochastic Frontier Production Function Models*. *Journals of Econometrics*, 6 (1), 21-37.
- Altunbas. Yener, Lynne Evans, Phillip Molyneux, 2001, *Bank Ownership & Efficiency*, *Journal o Money, Credite & Banking*, USA
- Alfarisi, Ade Salman, 2010, *Analisis Terhadap Efisiensi Laba dan agency Cost Hypothesis Pada Bank Syariah dan Bank Konvensinal di Indonesia* (Disertasi). Program Doktor Ilmu Ekonomi Kekhususan Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran Bandung 2010
- Ascarya dan Diana Yumanita 2008, *Comparing The Efficiency Of Islamic Banks In Malaysia And Indonesia*, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Oktober 2008
- Berger, A.N. & Humphrey, D.B. (1997). *Efficiency Of Financial Institutions: International Survey And Directions For Future Research*. *European Journal of Operational Research*, 98, 175-212.

- Berger, A.N. & Mester, L. J. (1997). *Inside The Black Box: What Explains Differences In The Efficiency of Financial Institutions*. Journal of Banking and Finance, 21, 895-947.
- Dimitris K Christopoulos, Efthymios G Tsionas. (2001) *Banking Economic Efficiency In The Deregulation Period: Results From Heteroscedastic Stochastic Frontier Models*. The Manchesterors, 2 School. Manchester: Dec 2001. Vol. 69, Edisi 6; pg. 656, 21 pgs
- Donanyah Yudistira, (2003). *Efficiency in Islamic Banking :An Empirical Analysis of 18 Banks*. Bank Indonesia Jakarta
- Farrell, M.J. (1957). *The Measurement Of Productive Efficiency*. Journal of Royal Statistical Society, 120(3), 253-281.
- Ferrier, Gary D., Lovell, C. A. Knox, (1990). *Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence*, Journal of Econometrics. Amsterdam: Oct/Nov 1990. Vol. 46, Edisi 1,2; pg. 229
- Hamim Syahrums . Ahmad Mokhtar, Naziruddin Abdullah dan Syed M. Al-Habshi, (2006). *Efficiency of Islamic Banking In Malaysia : A Stochastic Frontier Approach*. Journal of Economic Cooperation 27, 2 (2006) hal. 32 – 70
- Hassan, M.Khabir, (2003). *Cost, Profit and X Efficiency of Islamic Bank in Pakistan, Iran and Sudan*. Jakarta: Bank Indonesia
- Koopmans, T.C. (1951). *An Analysis Of Production As An Efficient Combination Of Activities*. In T.C. Koopmans (eds) *Activity Analysis of Production and Allocation*, Cowles Commission

- for Research in Economics, Monograph No.13, New York : Wiley.
- Kumbhakar, S.C. & Lovell, C.A.K. (2003). *Stochastic Frontier Analysis*. New York, USA: Cambridge University Press.
- Kwan, S. H. (2002). *The X-efficiency Of Commercial Banks In Hong Kong*. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Papers Series, 2002-14, 1-30.
- Mariani Abdul-Majid , David S. Saal and Giuliana Battisti, (2008). The Efficiency and Productivity of Malaysian Banks: An Output Distance Function Approach
- Muliaman D. Hadad; Wimboh Santoso; Eugenia Mardanugraha; Dhaniel Ilyas, 2003. *Pendekatan Parametrik Untuk Efisiensi Perbankan Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 2003
- Muhammad Afif Amirillah, (2010). *Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2005–2009*. Tesis, tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Muhammad G. Wibowo (2003). *Mengukur Efisiensi Perbankan Syariah di Indoensia : Aplikasi DEA*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga
- Mullineaux, Donald J., (1978). *Economies Of Scale And Organizational Efficiency in Banking: A profit-function approach*, The Journal of Finance. Cambridge: March 1978. Vol. 33, Edisi 1; pg. 259.
- Pindyck, Robert S, (2005) *Microeconomic, Sixth Edition*, Pearson Prentice Hall, New Jersey

- Priyonggo Suseno .(2008). *Analisis Efisiensi Dan Skala Ekonomi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia*. Journal Of Islamic And Economics, Vol. 2 No 1 Juni 2008
- Resti, A. (1997). *Evaluating The Cost efficiency Of The Italian Banking System: What Can Be Learned From The Joint Application Of Parametric And Non-Parametric Techniques*. Journal of banking and Finance, 21, 221-250.
- Rosita Suhaimi, (2008). *Profit Efficiency And K-Economy Of Commercial Banks In Malaysia*, The Business Review, Cambridge, Vol 11 No. 2 December 2008
- Sealey, C.W. & Lindley, J.T. (1977). *Inputs, Outputs and Theory of Production Cost at Depository Financial Institutions*. Journal of Finance, 32, 1251-1266.
- Shamsher Mohamad , Taufiq Hassan dan Mohamed Khaled I. Bader *Efficiency of Conventional Versus Islamic Banks: International Evidence using the Stochastic Frontier Approach (SFA)* Journal of Islamic Economics, Banking and Finance
- Umi Karomah Yaumidin, (2007). *Efficiency In Islamic Banking A Non Parametric Approach*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia Jakarta
- Valli Boobal Batchelor and I.K.M. Mokhtarul Wadud, (2004). *Technical And Scale Efficiency Of Islamic Banking Operations In Malaysia : An Empirical Investigation With A Longitudinal Perspective*. Labuan Bulletin of International Business & Finance 2(1), 2004, 51-69 ISSN 1675-7262

- Ya-Hui Peng, Kehluh Wang, (2004). *Cost Efficiency And The Effect Of Mergers On The Taiwanese Banking Industry*. The Service Industries Journal. London: July 2004. Vol. 24, Edisi 4; pg. 21
- Yang Li, Jin-Li Hu, Yung-Ho Chiu, (2004). *Ownership And Production Efficiency: Evidence From Taiwanese Banks*. The Service Industries Journal. London: July 2004. Vol. 24, Edisi 4; pg. 129
- Zaenal Abidin, (2007). *Kinerja Efisiensi Pada Bank Umum*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil) Vol. 2 Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007 ISSN : 1858 - 2559

BAB VII
PERKEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN
SUMATERA SELATAN

Oleh:

Sri Andaiyani dan Ariodillah Hidayat

1. Pendahuluan

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Konsep inklusi keuangan muncul setelah adanya konsep financial exclusion. Financial exclusion merupakan sebuah proses dimana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses dan/atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada.

Menurut Sarma (*Index of Financial Inclusion—A measure of financial sector inclusiveness: 2008*) financial inclusion adalah sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Keuangan Inklusif pada dasarnya bagi perekonomian dibentuk agar segala sumber daya masyarakat yang produktif terfasilitasi dengan akses layanan keuangan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Keuangan inklusif juga dapat membantu sistem pembiayaan yang bersumber dari pihak yang formal.

Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality) dari layanan perbankan (Bank Indonesia).

2. Tinjauan Pustaka

Dimensi pengukuran yang digunakan Bank Indonesia untuk mengukur pengembangan keuangan inklusif adalah:

1. Dimensi Akses, untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank. Indikator pengukuran dimensi akses adalah: Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk dewasa Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa, Jumlah Kantor Bank per 1.000 km², Jumlah ATM per 1.000 km².
2. Dimensi Penggunaan, untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Indikator pengukuran dimensi

penggunaan adalah: Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga (Deposito, Tabungan, Giro) per 10.000 penduduk dewasa, Jumlah Rekening Kredit per 10.000 penduduk dewasa.

3. Dimensi Kualitas, untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara umum kategori yang dipergunakan dalam penyusunan indikator kualitas dapat dikelompokkan menjadi keterjangkauan (affordability), transparansi (transparency), kenyamanan (convenience), perlakuan yang sama (fair treatment), perlindungan konsumen (consumer protection), edukasi keuangan (financial education), indebtiness dan pilihan lainnya (choice).

Dari tinjauan literatur dapat dinyatakan bahwa tidak ada pendekatan standar untuk mendefinisikan atau mengukur keuangan inklusi. Sebagian besar data yang dibangun dari referensi pada akses layanan keuangan. Dalam penelitian ini, tingkat inklusi keuangan mengadopsi dua bentuk, yaitu akses layanan dan akses ke sistem keuangan. Kedua konsep ini telah di rangkum oleh ke dalam satu konsep yaitu Indeks Inklusi Keuangan atau *Index of Financial Inclusion*. Pertama adalah indeks aditif yang menjumlahkan kantor cabang bank dan ATM koresponden per 1000 penduduk di suatu wilayah. Kedua adalah indeks aditif yang menjumlahkan penggunaan jasa keuangan seperti jumlah tabungan dan kredit yang disalurkan per 1.000 penduduk. Data jumlah Automatic Teller Machines (ATMs) dan bank komersial pada setiap daerah yang diambil dari Badan Pusat Statistik daerah masing-masing.

Indikator yang paling baik untuk mengukur akses jasa keuangan adalah jumlah orang yang menggunakan jasa simpanan dan jumlah orang yang menggunakan jasa pinjaman di lembaga keuangan (Ummah & Nuryartono Nunung, 2015). Namun, tidak semua negara yang memiliki data tersebut secara lengkap, terutama dari lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan informal. Untuk mengukur akses terhadap penggunaan jasa simpanan, indikator yang paling tepat digunakan adalah jumlah rekening deposit per 1000 orang dewasa.

Mandira (Sarma, 2012) dalam catatan konsepnya ‘Indeks Inklusi Keuangan’ telah mempertimbangkan tiga dimensi untuk mengukur tingkat inklusi yaitu:

1. Kedalaman (penetrasi) akses menggunakan ukuran proxy dari jumlah rekening bank per 1000 populasi
2. Ketersediaan untuk mengukur kedekatan akses menggunakan jumlah cabang bank dan jumlah ATM per 1000 populasi
3. Penggunaan untuk mengukur tingkat dan frekuensi penggunaan oleh pelanggan. Dengan menggunakan tiga variabel untuk penjangkauan dan satu untuk penggunaan, Sarma mengadopsi konsep yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berikut formulasi perhitungan indeks inklusi keuangan yang diadopsi dari penelitian (Sarma, 2012):

$$d_i = W_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i} \dots \dots \dots (1)$$

i=1,2,3

dimana : d_i = dimensi (penetration, availability and usage); A_i nilai actual dimensi i ; m_i = nilai minimum dari dimensi i ; M_i = nilai maksimum dari dimensi i

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_p^2 + d_a^2 + d_u^2}}{\sqrt{w_p^2 + w_a^2 + w_u^2}} \dots \dots \dots (2)$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_p - d_p)^2 + (w_a - d_a)^2 + (w_u - d_u)^2}}{\sqrt{w_p^2 + w_a^2 + w_u^2}} \dots \dots \dots (3)$$

Setelah itu, indeks inklusi keuangan dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$IFI = \frac{1}{2} [X_1 + X_2] \dots \dots \dots (4)$$

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{p_k^2 + a_k^2 + u_k^2}}{\sqrt{3}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(1 - p_k)^2 + (1 - a_k)^2 + (1 - u_k)^2}}{\sqrt{3}} \right) \right]$$

Dimana p , α , u , menunjukkan dimensi penetrasi, ketersediaan, dan penggunaan

Tabel 1 menyajikan nilai-nilai indeks keuangan inklusi untuk berbagai wilayah di Sumatera Selatan tahun 2010-2017 yang menggunakan data tiga dimensi (*penetration, availability and usage*). Berdasarkan nilai IFI (*Inclusion Financial Index*), setiap wilayah dibedakan menjadi tiga kategori, yakni :

1. IFI 0.5 hingga 1.0 : Tinggi
2. IFI 0.3 hingga 0.5 : Menengah
3. IFI 0 hingga 0.3 : Rendah

Dari Sembilan wilayah dimana perhitungan IFI dilakukan, Palembang memiliki IFI tertinggi dan satu-satunya yang tergolong kedalam IFI tinggi yakni diatas 0.5 kemudian diikuti oleh Lubuk Linggau, prabumulih, lahat dan pagaralam yang tergolong kedalam IFI menengah yakni diantara 0.3 dan 0.5. sedangkan wilayah lainnya yakni OKI, Banyuasin, empat lawang, dan muara enim tergolong kedalam IFI rendah dengan nilai IFI dibawah 0.3.

Dari perhitungan IFI tersebut, dapat dilihat perbedaan yang terjadi pada wilayah kabupaten dan kota. Wilayah yang berbentuk kota umumnya memiliki IFI yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang berbentuk kabupaten. Seluruh kabupaten di sumatera selatan tergolong kedalam IFI rendah kecuali kabupaten lahat yang tergolong IFI menengah. Sedangkan wilayah kota tergolong kedalam IFI menengah kecuali Palembang yang masuk kategori IFI tinggi.

Perbedaan IFI disetiap wilayah di sumatera selatan menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan penggunaan akses jasa perbankan antar wilayah di sumatera selatan. Beberapa wilayah seperti Palembang, Lubuk linggau, dan Prabumulih memiliki jumlah kantor perbankan, rekening deposit, dan penyaluran kredit yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sedangkan wilayah seperti Muara Enim, Empat lawang, Banyuasin, dan OKI yang memiliki IFI rendah menggambarkan jangkauan perbankan terhadap masyarakat begitupun sebaiknya masih sangat rendah.

Tabel 7.1 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan di Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
Lubuk Linggau	0.29	0.38	0.41	0.42	0.35	0.38	0.41	0.46	0.39
Muara Enim	0.07	0.09	0.10	0.12	0.13	0.10	0.10	0.09	0.10
Palembang	0.54	0.68	0.74	0.81	0.81	0.91	0.94	0.97	0.80
Prabumulih	0.29	0.38	0.43	0.45	0.36	0.39	0.39	0.46	0.39
Banyuasin	0.03	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.16	0.18	0.09
Empat Lawang	0.05	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08
Ogan Komering Ilir	0.12	0.17	0.18	0.19	0.06	0.15	0.19	0.22	0.16
Lahat	0.06	0.09	0.18	0.28	0.11	0.11	0.37	0.36	0.20
Pagaralam	0.18	0.22	0.26	0.27	0.29	0.29	0.30	0.31	0.27

Sumber: Perhitungan (Djambak, Andaiyani, Igamo, & Riswan, 2020)

Dalam tujuh tahun terakhir, IFI setiap wilayah di Sumatera Selatan mengalami peningkatan, peningkatan paling signifikan terjadi di wilayah kota Palembang dari 0.54 pada tahun 2010 meningkat menjadi 0.97 pada tahun 2017 dan wilayah kabupaten Lahat dari 0.06 pada tahun 2010 menjadi 0.36 pada tahun 2017. Disisi lain, beberapa wilayah juga mengalami peningkatan, namun dengan kecepatan peningkatan yang sangat lambat, seperti kabupaten Muara Enim sebesar 0.07 pada tahun 2010 menjadi 0,09 pada tahun 2017 dan kabupaten Empat Lawang sebesar 0.05 pada tahun 2010 menjadi 0.11 pada tahun 2017.

Perbedaan kecepatan pertumbuhan IFI antar wilayah di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh perbedaan pertumbuhan antar dimensi. Pertumbuhan IFI yang tinggi di Palembang dan Lahat didukung oleh pertumbuhan jumlah kantor cabang bank, DPK dan DPK yang tinggi

sehingga dimensi *penetration, availability and usage* juga mengalami pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan kabupaten Muara Enim yang hanya mengalami pertumbuhan IFI dari 0.07 ke 0.09 selama tujuh tahun ternyata mengalami penurunan DPK dari tahun 2010 sebesar 4882 juta menjadi 4769 juta pada tahun 2017 sehingga dimensi penggunaan mengalami penurunan.

3. Kesimpulan

Ada perbedaan yang signifikan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Wilayah perkotaan di provinsi Sumatera Selatan memiliki IFI yang relatif lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Berdasarkan hasil estimasi, indeks inklusi keuangan memiliki efek negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan. Penyedia layanan keuangan yang menunjukkan jangkauan yang lebih tinggi kepada kelompok-kelompok ini menerima akses yang lebih baik ke fasilitas-fasilitas ini. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki lebih banyak insentif untuk memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok seperti petani, masyarakat miskin, dan usaha kecil dan mikro. Dengan memberikan layanan keuangan yang lebih merata antara kabupaten dan kota perlu dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djambak, S., Andaiyani, S., Igamo, A. M., & Riswan, M. (2020). Quantifying South Sumatera's Financial Inclusion: Regencies and Cities Levels. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200520.071>
- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*.
- Ummah, B. B., & Nuryartono Nunung, A. L. (2015). ANALISIS INKLUSI KEUANGAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1–27.

BAB VIII

DANA DESA: PERSPEKTIF PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Oleh:

Sukanto, Azwardi dan Wika Indriani

1. Pendahuluan

Sejak kemerdekaan, dekotomi pembangunan daerah selalu menjadi batu sandungan dalam proses pembangunan itu sendiri. Selama ini, pembangunan yang dilakukan cenderung ke wilayah perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan atau dikatakan sebagai *urban bias* (chambers, 1987), dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Tidak heran kalau kemajuan wilayah perkotaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Namun, fokus pembangunan pada wilayah perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya sektor industri tidak disertai oleh transformasi sektor pertanian ke industri. Konsekuensinya terjadi dekotomi antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia, antar Pulau Jawa-Luar Jawa, Kawasan Wilayah Perbatasan, dan Desa-Kota. Proses pembangunan ini menyebabkan jebakan kemiskinan di wilayah-wilayah perdesaan (Fauzi, 2010).

Pemerintah sangat fokus memperhatikan kondisi tersebut, hal ini ditandai dengan mulainya pembangunan wilayah-wilayah pinggiran (*periphery*) sejak tahun 1990-an. Beberapa program dilakukan pemerintah seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT),

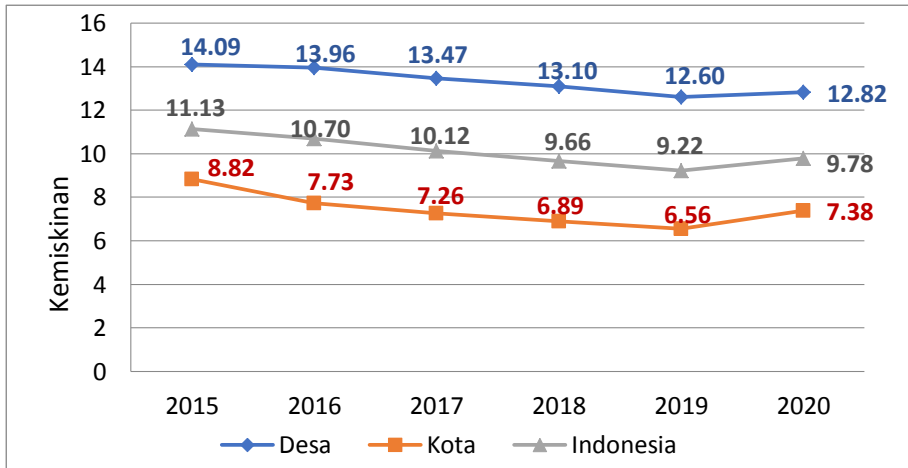
Program Pengembangan Terpadu Antar Desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (*PNPM*) Mandiri, Alokasi Dana Desa. Program-program diluncurkan oleh pemerintah guna mengembangkan wilayah perdesaan untuk mempersempit disparitas desa-kota sehingga diharapkan sebagian masalah perdesaan dapat diatasi. Namun, pembangunan desa yang dilakukan masih menjadikan desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menyebabkan beberapa program tersebut menjadi belum optimal. Perhatian besar terhadap kemajuan desa dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi desa sehingga muncul slogan **desa membangun** sebagai otokritik terhadap **membangun desa**.

Pembangunan wilayah perdesaan dinilai sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan, baik dari aspek ekonomis, politis, maupun sosial masyarakat. Dalam upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan Pembangunan wilayah perdesaan diperkuat oleh pemerintahan Jokowi melalui Program Nawacita, salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gurning, 2020:1).

Masalah kesenjangan dan kemiskinan menjadi isu sentral dalam setiap rezim. Data Bada pusat Statistik, menunjukkan jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta jiwa sementara itu, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 11,16 juta jiwa (7,38

persen) pada bulan maret 2020 dan penduduk miskin wilayah perdesaan sebesar 15,26 juta jiwa (12,82 persen) pada bulan maret 2020.

Secara lebih umum tren kemiskinan di wilayah perdesaan, dan perkotaan di Indonesia pada tahun 2015-2019 menunjukkan penurunan (Gambar 1.1), akan tetapi memasuki tahun 2020 persentase penduduk miskin terlihat meningkat. Secara detail dapat digambarkan, tahun 2015, terdapat 28,51 juta jiwa atau sebesar 11,13 persen penduduk miskin di Indonesia. Memasuki tahun 2018, persentase penduduk miskin menurun satu digit yaitu sebesar 9,66 persen, demikian pula tahun 2019 sebesar 9,22 persen, dan tahun 2020, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen. Kondisi ini disebabkan oleh adanya permasalahan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tren penurunan sehingga pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan melakukan pekerjaan secara *Work From Home* (WFH) dan melakukan aktivitas terbatas di luar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak, hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. *Trade-off* kebijakan PSBB dirasakan dampaknya oleh pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, satu sisi harus tetap berada di rumah, namun sisi lain harus memenuhi kebutuhan hidupnya.



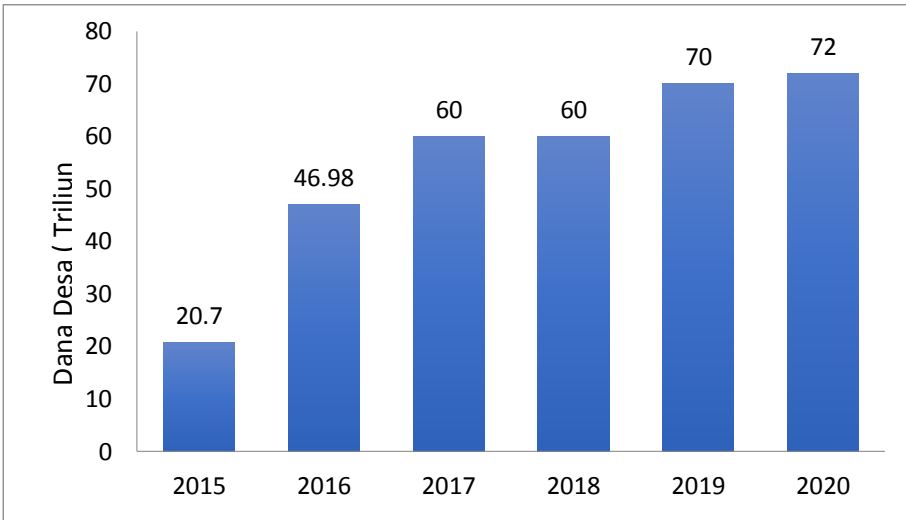
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 8.1 Tren Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020 (persen)

Bila dilihat secara spasial antara desa-kota kemiskinan di desa relatif lebih tinggi. Pada tahun 2015 kemiskinan di desa sebesar 14,09 persen dan menurun menjadi 12,60 persen sedangkan kemiskinan di perkotaan pada periode yang sama masing-masing sebesar 8,82 persen dan 6,56 persen. Fakta ini sekaligus menguatkan bahwa adanya ketimpangan antar wilayah desa-kota.

Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa memiliki posisi yang strategis dalam basis pembangunan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menciptakan implikasi berupa kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke pemerintah Desa. Dalam kerangka membangun otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan Desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengolahan keuangan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Desa melalui program-program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa (Arfiansyah, 2020:3).



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015-2020

Gambar 8.2 Rincian Dana Desa Tahun 2015-2020 (Triliun Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan Dana Desa dari tahun 2015-2020, secara umum jumlah dana desa mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata peningkatan sebesar 34,8 persen per tahun. Pada tahun 2015, Dana Desa sebesar 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 Juta, dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 60 triliun dengan

rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 720 Juta. Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 72 triliun dengan alokasi perdesa sebesar Rp 662 Juta (Kemenkeu, 2017). Besaran jumlah dana desa yang dikucurkan ke desa diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mampu berkontribusi dalam pengembangan wilayah desa.

2. Tinjauan Literatur

Pendekatan pengembangan wilayah lebih bersifat *spatial* dan menjadi jembatan untuk melihat apakah perencanaan yang dilakukan selaras dengan tata ruang (Muta'ali, 2014). Perkembangan wilayah desa dapat menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan regional. Dalam pengertian pengembangan wilayah dalam kajian ini dilihat dari aspek peningkatan status desa. Status desa menggunakan IDM relatif telah mencerminkan pengembangan wilayah berdasarkan dua pendekatan tersebut. Sementara itu, Lowe *et.al* (1998) mengungkapkan pembangunan perdesaan yang bersifat *endogenous*. Ciri pembangunan dengan menggunakan pendekatan ini adalah: prinsip kunci SDA yang spesifik, menjadi faktor penentu pembangunan berkelanjutan, adanya kekuatan dinamis berupa inisiatif lokal dan kewirausahaan, fungsi wilayah perdesaan berupa layanan yang beragam, pengembangan kapasitas dan mengatasi *social exclusion* (keterasingan sosial), dan identifikasi masalah perdesaan seperti adanya keterbatasan kapasitas.

Deaton & Nelson (1992) mengembangkan teori pembangunan desa, dimana pembangunan diartikan sebagai alokasi fisik, sosial, dan

sumber daya manusia dalam pola spasial yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk: menyediakan pendapatan untuk seluruh anggota keluarga, pendidikan, kewirausahaan, tenaga kerja, dan kewarganegaraan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi regional dan ekonomi masyarakat yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi baru, kepemimpinan dan struktur organisasi yang mampu menjamin ekonomi dan kesehatan sosial, lingkungan dan sumber daya alam yang sehat. Kalau demikian pembangunan perdesaan bersifat multidimensi. Glickman (1960), menyatakan efek ganda di perdesaan dapat diciptakan oleh permintaan sektor di luar perdesaan dan juga belanja publik serta transformasi ke perdesaan, oleh karena itu dipandang perlu adanya stimulus baik berupa kemudahan/akses ke desa maupun arus modal yang masuk ke desa guna meningkatkan penghidupan di perdesaan. Pembangunan perdesaan sangatlah penting seperti yang diungkapkan Xiaoping (1978) bila ingin menguasai suatu negara kuasailah desa. Artinya perdesaan identik dengan pertanian sangatlah penting bagi kelangsungan sebuah bangsa.

Pembangunan wilayah atau desa, membutuhkan pembiayaan baik internal maupun eksternal. Salah satu sumber pembiayaan eksternal bersumber dari APBN dan APBD melalui dana transfer keuangan pusat-daerah dan desa. Peran pemerintah yang memiliki fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Musgrave, 1989). Fungsi distribusi mengharuskan pemerintah menciptakan pemerataan dan keadilan, dalam rangka fungsi tersebut salah satunya dengan transfer

dana melalui dana desa sehingga diharapkan kesenjangan antar wilayah/desa bisa dipersempit.

Dana desa yang dikucurkan ke desa-desa setidaknya telah mampu menurunkan kemiskinan di desa Azwardi & Sukanto (2014), Gurning (2020), dan Arfiansyah, (2020). Dilihat dari manfaat dana desa, Saggaf *et al* (2018) mengungkapkan dana desa sangat bermanfaat bagi peningkatan status desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dijumpai pula beberapa kajian yang menunjukkan beberapa desa masih sulit berkembang walaupun dana desa telah dikucurkan (Tambunan *et al*, 2020). Bahkan dana desa tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Gusti, Agustar & Osmet, 2020).

Menurut Bank Dunia kemiskinan adalah hal yang berkenaan dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu berobat kedokter, tidak mampu untuk sekolah, dan tidak tahu baca tulis, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki akses air bersih. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi yang dialami seseorang dimana ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal kebutuhan pokok lainnya. Definisi kemiskinan dapat dipilih menjadi dua aspek, yaitu aspek primer, meliputi miskin berupa harta (aset), pengetahuan, organisasi politik, dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder, meliputi kemiskinan terhadap sumber-sumber keuangan, jaringan sosial, dan informasi (Arsyad, 2010: 299).

Masalah kemiskinan sangatlah kompleks, Nurse dalam Sagir (2009) mengungkapkan adanya lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Masyarakat perdesaan kekurangan modal yang

berdampak pada produktivitas rendah, rendahnya produktivitas berakibat pada pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah berpengaruh pada tabungan juga rendah dan investasi rendah. Di lain pihak, kekurangan investasi SDM berdampak ke penguasaan IPTEK yang rendah dan produktivitas turun, hal tersebut memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Secara garis besar faktor penyebab kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) kemiskinan alami (*natural*), kemiskinan yang disebabkan kondisi geografis wilayah seperti keadaan alam yang gersang, sulit dijangkau (pengunungan, rawa dan lain sebagainya). Misalnya desa-desa miskin di kaki gunung, dan wilayah perairan. 2). Kemiskinan budaya (*cultural*), kemiskinan yang disebabkan kondisi sosial budaya penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. 3). Kemiskinan struktur (*structural*) merupakan kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintahan, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin sebagai hasil dari kebijakan pemerintah.

3. Hasil Kajian

Wilayah perdesaan di Indonesia masih memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak di bandingkan dengan wilayah perkotaan, sehingga tidak jarang banyak yang beranggapan bahwa perdesaan merupakan penyumbang utama terhadap angka kemiskinan secara nasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di perdesaan, salah satunya dikarenakan keterbatasan

lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja, sektor pertanian menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja, rendahnya kepemilikan lahan usaha tani sehingga banyak yang menjadi buruh dengan upah yang rendah, serta masyarakat wilayah perdesaan cenderung memiliki pengetahuan dan skill yang rendah (Gusti *et al.*, 2020:2). Deaton dan Nelson (1992) menyatakan pembangunan wilayah perdesaan tercermin dari alokasi fisik (infrastruktur), sosial dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, tidak heran bila fokus pembangunan wilayah perdesaan adalah infrastruktur fisik, sosial dan sumberdaya manusia. Ketiga unsur ini tercermin dari dimensi pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Prioritas penggunaan Dana Desa diatur berdasarkan Permendesa PDTT, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa, yaitu 1) Prinsip keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakannya, 2) Prinsip kebutuhan prioritas, yaitu dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat Desa, 3) Prinsip Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asasi usul dan kewarganegaraan lokal berskala Desa, 4) Prinsip partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat, 5) Prinsip Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, pelaksanaan secara mandiri melalui pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal, 7) Prinsip Tipologi Desa,

yaitu dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Selain itu, prioritas dana desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, 1) Sarana dan prasarana Desa seperti, dalam lingkungan pemukiman dengan pembangunan rumah sehat, tempat pembuangan sampah, drainase, dalam bidang transportasi antara lain pembangunan jalan pemukiman, jalan Desa, jembatan Desa, dan tambatan perahu, dalam bidang energy antara lain pembangunan pembangkit listrik, tenaga disel, dan distribusi tenaga listrik, dan dalam bidang informasi & komunikasi antara lain membangun jaringan internet, telepon umum, dan website desa. 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, yaitu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan menyediakan air bersih, polindes, posyandu, dan MCK, serta dalam bidang pendidikan dengan menyediakan perpustakaan Desa. 3) Sarana prasarana usaha ekonomi Desa, yaitu usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain dengan menyediakan embung Desa, irigasi Desa, kapal penangkap ikan, dan kandang ternak dan usaha ekonomi pertanian lainnya yang di fokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi pemasaran antara lain lumbung Desa, penggilingan padi, pondok wisata dan pasar Desa. 4) Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, yaitu meliputi kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya, dan pelestarian lingkungan hidup. 5) Sarana dan prasarana lainnya.

Perkembangan pembangunan fisik desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan perbaikan, hal ini terlihat dari terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan Desa, 22.616 unit sambungan air bersih, 914 ribu meter jembatan, 2.201 unit tambatan perahu, 14.597 unit PAUD, 4.004 unit polindes. 3.106 pasar Desa, 19,485 unit sumur, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit posyandu, dan 1.338 unit embung Desa.

Oleh karena itu, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kegiatan non-fisik terutama pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani hal-hal berikut:

- 1). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa,
- 2). Pengembangan kapasitas masyarakat Desa,
- 3). Pengembangan ketahanan masyarakat Desa,
- 3). Pengembangan system informasi Desa,
- 4). Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa penyandang disabilitas,
- 5). Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa / BUMDesa bersama,
- 6). Dukungan pengelolaan usaha ekonomi,
- 7). Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

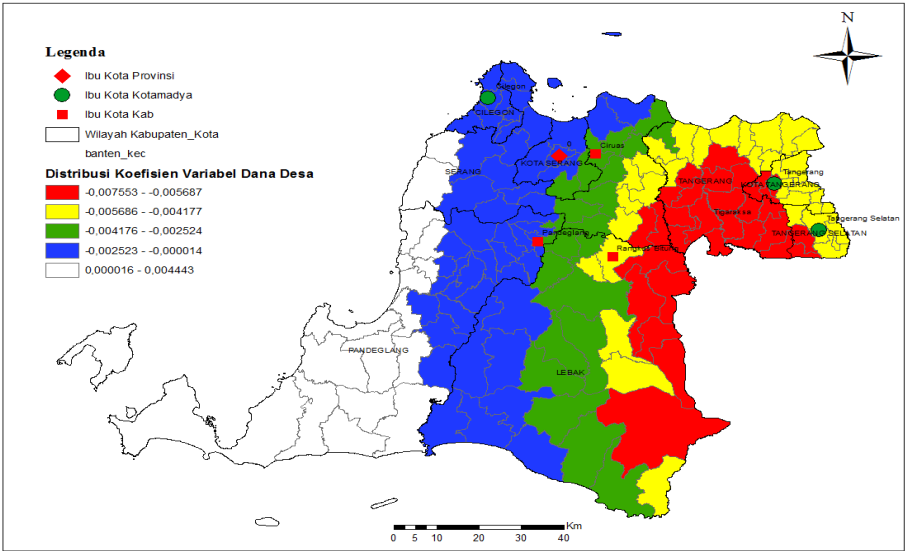
3.1 Pengurangan Kemiskinan

Dana Desa dirasakan mamfaatnya, dan berkontribusi dalam penurunan kemiskinan di desa. Hasil penelitian Sukanto, *et al* (2018) menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Pendekatan *geographical weighted regression* yang digunakan juga mengungkapkan dana desa telah mampu mengurungi tingkat kemiskinan di 121 kecamatan di Provinsi Banten. Dana desa yang diberikan pemerintah telah digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan dana desa belum mampu mengentaskan kemiskinan di 17 kecamatan terutama di wilayah-wilayah desa sangat tertinggal. Kondisi ini disebabkan oleh penggunaan dana desa yang diterima sebagian besar desa dipergunakan untuk membuka akses bagi desa-desa tertinggal terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan. Diketahui desa-desa yang ada di 17 kecamatan yang relatif tertinggal merupakan daerah *hinterland* Kota Pandeglang maupun Kota Serang sehingga pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan dilakukan di pusat kota. Akibatnya terjadi peningkatan arus modal dari desa ke pusat kota dan terjadi *backwash effect*. Artinya, modal yang mengalir ke desa tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat (*capital outflow*) atau ada indikasi kebocoran wilayah (Rustiadi *et al.* 2011).

Beberapa kajian menunjukkan pembangunan infrastruktur seperti pisau bermata dua, satu sisi dapat mendongkrak tingkat kesejahteraan dan sisi ini dapat menyebabkan pengurasan sumber daya yang berdampak pada meingkatnya prose “pemiskinan”.

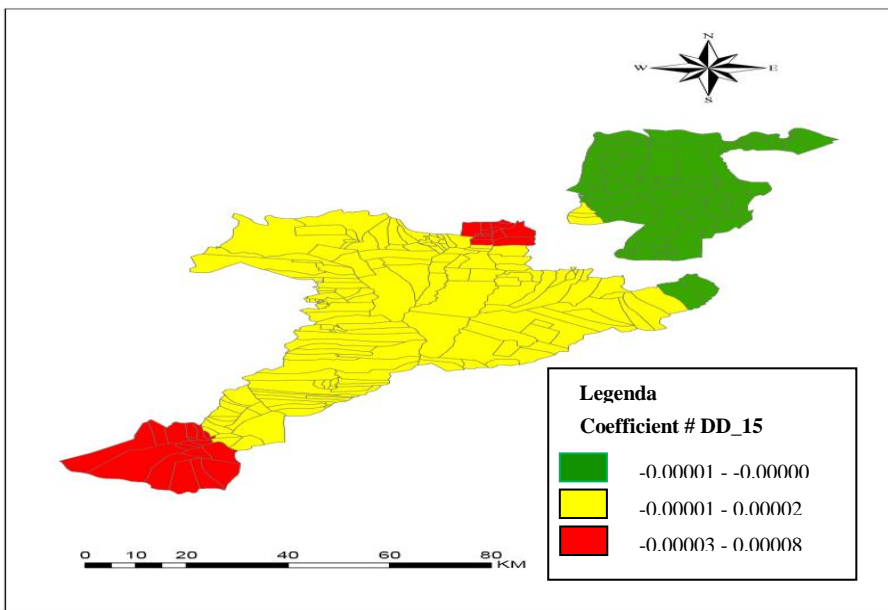
Pemikiran tersebut didukung oleh Yustika dan Baks (2015), pembangunan infrastruktur (jalan) memang sangat penting, akan tetapi harus dibangun setelah situasi ekonomi di suatu tempat (daerah atau desa) telah mapan. Masyarakat lokal yang sudah mapan akan mampu bersaing dengan pelaku ekonomi dari luar daerah. Namun, jika masyarakat lokal belum siap sebaiknya isolasi ekonomi dilakukan. Fenomena *Brain Drain* seringkali terjadi dalam pembangunan wilayah desa. Lancarnya arus barang, modal dan jasa mengakibatkan migrasi sumber daya desa ke kota terutama SDM yang berkualitas. Hasil studi Yudha *et al.* (2018) merekomendasikan agar pemanfaatan dana desa menjadi lebih efisien dan tepat sasaran diperlukan optimalisasi fungsi pendamping desa.



Sumber: Sukanto *et al.* 2018

Gambar 8.3 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

Kajian serupa dilakukan oleh Indriani, Azwardi dan Sukanto (2020) dengan menggunakan pendekatan yang sama menyimpulkan dana desa belum secara optimal berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Secara rinci dijelaskan dana desa mampu mengurangi tingkat kemiskinan di 40 desa di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Belida Darat. Kecamatan Lembak, Kecamatan Lubai, Kecamatan Muara Belida, dan Kecamatan Sungai Rotan. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dana desa digunakan untuk hal-hal produktif seperti pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, pengembangan kawasan wisata melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)



Sumber: Indriani, Azwardi, Sukanto, 2020

Gambar 8.4 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim

3.2 Pengembangan Wilayah

Dana desa digunakan untuk penataan dan pengembangan wilayah, dalam hal pengembangan wilayah dapat dilihat dari membaiknya nilai IDM. IDM dijadikan salah satu tolok ukur perkembangan wilayah. Dimensi-dimensi sebagai indikator pembentuk IDM merujuk pada pembangunan desa. Misalnya Indeks Ketahanan Sosial yang memuat Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Permukiman. Sementara itu Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Perdagangan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah. Selain itu, guna keberlangsungan pembangunan di desa, diukur menggunakan kualitas lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana.

Data publikasi Kementrian Desa menunjukkan penggunaan Dana Desa memberikan manfaat terhadap pengembangan wilayah Desa di Indonesia yang dilihat melalui peningkatan status Desa. Pada tahun 2015 terdapat 13.453 Desa yang berstatus sebagai Desa sangat tertinggal, 33.592 Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal, 22.882 Desa yang berstatus sebagai Desa berkembang, 3.608 Desa yang berstatus sebagai Desa maju, dan 179 Desa yang berstatus sebagai Desa mandiri. Kemudian di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah Desa yang berstatus sebagai Desa sangat tertinggal sebesar 18,11 persen menjadi 2.437 Desa, kemudian Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal juga turut mengalami penurunan sebesar 41,39 persen menjadi 13.905 Desa, sementara untuk Desa yang berstatus sebagai Desa berkembang pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 42,58 persen menjadi 39.850 Desa, sama seperti Desa

berkembang, Desa yang berstatus sebagai Desa maju juga mengalami peningkatan sebesar 69,70 persen menjadi 11.900 Desa, kemudian jumlah Desa mandiri juga mengalami kenaikan sebesar 89,7 persen menjadi 1.742 Desa (Tabel 1.1).

Tabel 8.1

Perkembangan Tipologi Desa di Indonesia Tahun 2015 dan 2020

Status Desa	2015	2020	Pengurangan/ Penambahan Desa
Desa Sangat Tertinggal	13.453	2.449	(11.004)
Tertinggal	33.592	13.939	(19.653)
Berkembang	22.882	39.852	16.970
Maju	3.608	11.900	8.292
Mandiri	179	1.742	1.563

Perubahan status desa tahun 2018 dan tahun 2020 di Pulau Sumatera menunjukkan klasifikasi sangat tertinggal tersisa 894 desa, sementara kategori tertinggal menurun menjadi 11.274 desa. Dua klasifikasi ini identik dengan “kantong” kemiskinan. Kategori desa berkembang mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar 56,27 persen atau meningkat dari 8.565 desa menjadi 13.386 desa. Desa dengan klasifikasi maju naik dari 908 desa menjadi 2.457 desa (170,59 persen), dan desa mandiri meningkat dari 49 desa menjadi 283 desa (477,55 persen). Secara spasial, provinsi yang memiliki desa sangat tertinggal yaitu provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.162 desa pada tahun 2018, dan menurun separuhnya menjadi 623 desa di tahun 2020. Sementara itu, kategori desa tertinggal terbanyak di Provinsi

Aceh, tahun 2018 sebanyak 3.624 desa menurun menjadi 2.404 desa. Kotegori desa maju atau Nagari Maju terbanyak di Provinsi Sumatera barat yaitu sebesar 203 desa dan meningkatkan menjadi 348 desa tahun 2020. Desa mandiri, menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, masing-masing provinsi mencatatkan perkembangan yang baik. Provinsi Jambi merupakan provinsi yang memiliki loncatan terbesar dalam peningkatan jumlah desa mandiri. Bila pada tahun 2018 hanya 6 desa, meningkat menjadi 87 desa di tahun 2020, urutan berikutnya adalah Provinsi Riau meningkat dari 4 desa menjadi 61 desa. Fakta ini menguatkan argumen bahwa dana desa telah mampu mendorong perkembangan wilayah desa, walaupun disadari ada faktor lain yang ikut berperan dalam peningkatan status tersebut.

**Tabel 8.2 Perkembangan Tipologi Desa di Regional Sumatera
2018 dan 2020**

PROVINSI	Perubahan Status IDM dari 2015-2020 Desa-Desa di Pulau Sumatera									
	SANGAT TERTINGGAL		TERTINGGAL		BERKEMBANG		MAJU		MANDIRI	
	2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020
ACEH	560	205	3.624	2.404	2.138	3.458	161	397	13	32
SUMUT	1.162	623	2.760	1.831	1.397	2.726	96	228	2	9
SUMBAR	19	4	189	65	505	466	203	348	12	45
RIAU	113	35	683	35	728	944	63	287	4	61
JAMBI	53	2	551	154	676	871	113	285	6	87
SUMSEL	181	14	1.639	516	981	2.052	51	264	1	7
BENGGULU	41	5	614	290	611	908	71	129	4	9
LAMPUNG	113	6	1.086	6	1.144	1.812	86	370	6	21
BABEL	0	0	17	0	240	102	51	102	1	11
KEPRI	6	0	111	34	145	47	13	47	0	1
JUMLAH	2.248	894	11.274	5.335	8.565	13.386	908	2.457	49	283

Sumber: <https://idm.kemendes.go.id>, 2020 (diolah)

Pada tingkat mikro daerah, Dana Desa mampu berperan dalam pengembangan wilayah melalui peningkatan status Desa di Kabupaten Muara Enim yang pada tahun 2014 memiliki 18 Desa yang berstatus sebagai Desa sangat tertinggal turun menjadi 6 Desa pada tahun 2018, Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal sebanyak 145 Desa turun menjadi 115 Desa di tahun 2018, kemudian Desa yang berstatus sebagai Desa berkembang mengalami peningkatan, yang semula sebanyak 78 Desa di tahun 2014 menjadi 115 Desa di tahun 2018, Desa yang berstatus sebagai Desa maju juga ikut mengalami kenaikan yang semula 4 Desa, kemudian menjadi 5 Desa di tahun 2018. Sedangkan hasil analisis pola spasial sebaran penduduk miskin di kabupaten muara enim bersifat mengelompok (*Clustered*) dan Dana Desa memiliki pengaruh yang beragam pada setiap lokasi pengamatan (Indriani, Azwardi, Sukanto; 2020).

4. Kesimpulan

Dana Desa memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, sambungan air bersih, tambatan perahu, drainase dan irigasi, posyandu, dan embung Desa. Selain itu, Dana Desa juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan, menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Namun demikian, secara spasial diperoleh hasil dana desa belum mampu mengurangi kemiskinan.

Penggunaan Dana Desa juga bermanfaat terhadap pengembangan wilayah Desa di Indonesia yang dilihat melalui peningkatan status desa (Indeks Desa Membangun). Tahun 2015 jumlah Desa di Indonesia yang berstatus sebagai Desa sangat tertinggal sebanyak 13.453 kemudian mengalami penurunan menjadi 2.437 Desa, Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal sebanyak 33.592 Desa dan mengalami penurunan menjadi 13.905 Desa, Desa yang berstatus sebagai Desa berkembang sebanyak 3.608 Desa dan meningkat menjadi 39.850 Desa di tahun 2020. Selanjutnya, Desa yang berstatus sebagai Desa maju juga mengalami peningkatan dari yang semula 3.608 Desa menjadi 11.900 Desa, dan Desa yang berstatus sebagai Desa mandiri yang semula sebanyak 179 Desa menjadi 1.742 Desa.

Oleh karena itu, optimalisasi dana desa memerlukan sinergitas Dana Desa, Bumdes, dan Koperasi Perdesaan agar kemajuan desa dapat berkesinambungan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas petani, nelayan dan warga perdesaan agar mempunyai akses dalam pemanfaatan infrastruktur fisik, akses pasar dan modal sehingga fenomena *brain drain* dan eksploitasi sumber daya alam desa dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah (2020). Dampak dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*,1(1), 91-106.
- Arsyad L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azwardi, Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12 (1). Hal 29-41.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Presentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020*.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Terjemahan. LP3ES. Jakarta
- Deaton B, Nelson G. (1992). Conceptual underpinnings of policy analysis for rural development. *Southern J. Agric. Econ.* 24: 87-99.
- Fauzi A. (2010). *Landasan Pembangunan Perdesaan*. Dalam *Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press. Bogor.
- Gurning, (2020). Analisis pengaruh dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara, 3(1), 27-41.
- Gusti Y, Agustar A & Osmet (2020). Pemanfaatan dana desa dan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(2), 265-285.
- Indriani W, Azwardi, Sukanto. (2020). Manfaat dana desa dalam

pengembangan wilayah dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2019). Dana Desa untuk Mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMDesa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2020) Indeks Desa Membangun Tahun 2015-2020

Kementerian Keuangan RI. (2020).Data Dana Desa Tahun 2015-2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Dana Desa. Jakarta.

Lowe P, Ray C, Wood N, Woodward R. (1998). Participation in Rural Development: a Review of European Experience. Centre for Rural Economy, University of Newcastle, Newcastle, England.

Musgrave R, Musgrave P. (1989). Public Finance in Theory and Practice. New York (US): McGraw-Hill.

Muta'ali L. (2014). Perencanaan Pengembangan Wilayah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana. Badan Penerbit Fakultas Geografi. Universitas Gadjah Mada

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta.

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Permendesa PDTT Nomor 25 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta (ID): Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Jakarta.
- Saggaf A., Nawawi Z, Muslim A, Marwa T, Azwardi, Mukhtaruddin, Sukanto, Mukhlis, Thamrim KMH, Bashir A, Kalsum U, Farhan M, Patmawati, Marissa F, Atiyatna DP, Hamidi I. (2018). Manfaat Dana Desadi Provinsi Sumatera Selatan. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Sagir S. (2009). Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Grup.
- Sari RN, Ribawanto H. & Said H. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1880-1885.
- Sukanto, Juanda B, Fauzi A, Mulatsih S. (2018). Dampak Dana Transfer dan Peran Kelembagaan Terhadap Kinerja

Pembangunan di Provinsi Banten. Disertasi. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Tambunan BH, Sihombing M. & Harahap H. (2020). Peranan dana desa dalam pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolang Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Perspektif*. 9(2), 438-446.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Yustika AE, Baks R. (2015). *Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian dan Kedaulatan Pangan*. Malang (ID): Empat Dua.

Yudha EP, Juanda B, Kolopaking LM, Kinseng RA. (2018). Pengukuran pengaruh belanja desa terhadap kinerja pembangunan desa dengan menggunakan geographically weighted regression. *TATALOKA*. 20(1): 23-34.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Ed. Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasang, I. (2016). ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN PERGESERAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008-2012. *Jurnal Economix*, 4(1), 177–189.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomika Regional: Teori dan Aplikasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Ma`mun, D., & Irwansyah, S. (2013). ANALISIS PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI SEKTOR POTENSIAL WILAYAH PENGEMBANGAN (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 2(1).
- Oktarina, E., & Satrianto, A. (2019). Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-sektor Ekonomi Di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 613–622.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sufriadi, D. (2017). Analisis Transformasi Struktural Perekonomian Aceh. *Jurnal E-KOMBIS*, 3(2).

- Sunoto, Indraswanti, B. I. E., & Tarsilohadi, E. R. (2020). Analisis pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi kabupaten induk di provinsi Bengkulu 1,2,3. *THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT*, 2(1), 54–69.
- Supianto, Urep, S. A., & Putra, W. (2017). Pengembangan Sektor Ekonomi Daerah Tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3), 251–281.
- Tambunan, T. (2003). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional*. Medan: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael, P., & Stephen, C. S. (2008). . 2008. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan*. Erlangga: Jakarta. Jakarta: Erlangga.
- Wiwekananda, I. B. P., & Utama, I. M. S. U. (2016). Transformasi Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Buleleng Periode 2008-2013. *JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, 9(1), 37–45.
- Yulianita, A. (2010). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2).